PRAKTIK SOSIO SPASIAL KOMUNITAS DAERAH PINGGIR RAWA (DPR) DI PERUMNAS, DEPOK

Astarah Fathu Jannah

4825111607

Skripsi ini Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Astarah Fathu Jannah
No Registrasi: 4825111607

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Praktik Sosio Spasial Komunitas Daerah Pinggir Rawa (DPR) di Perumnas, Depok" ini sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Jakarta, 19 Februari 2017

METERAI TEMPEL
TGL.
57870AEF352289434
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Astarah Fathu Jannah

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab / Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta

Dr. Muhammad Zid, M.Si
NIP. 19630412 199403 1 002

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Rakhmat Hidayat, PhD NIP. 19800413 200501 1001 Ketua Sidang		19-02-2017
2.	Achmad Siswanto, M.Si NIDK. 8846100016 Sekretaris Sidang		18-02-2017
3.	Asep Suryana, M.Si NIP. 19710403 200501 1 003 Penguji Ahli		17-02-2017
4.	Rusfadia Saktiyanti Jahja, M. Si NIP. 19781001 200801 2 016 Dosen Pembimbing I		17-02-2017
5.	Syaifudin, M.Kesos NIP. 198801810 201404 1 001 Dosen Pembimbing II		18-02-2017

Tanggal Lulus: 07 Februari 2017

ABSTRAK

ASTARAH FATHU JANNAH. Praktik Sosio Spasial Komunitas Daerah Pinggir Rawa (DPR) di Perumnas, Depok. Skripsi. Jakarta: Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai konteks sosial historis masyarakat warga DPR Kampung Lio. Tujuan lain adalah Mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihfungsian ruang sebagai komoditi masyarakat lokal. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Mendeskripsikan bentuk-bentuk alih fungsi ruang di DPR Kampung Lio.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta kajian dokumen dan literatur. Subjek dari penelitian ini adalah warga DPR Kampung Lio serta warga RT 06 Perumnas yang mewakili kepemilikan dari lahan di Kampung Lio. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep untuk menunjang penelitian, diantaranya, pemukiman kumuh liar (squatter)dan produksi ruang sosial.

Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan suatu lahan bermula dari lemahnya pengawasan pemerintah terhadap fasilitas publik seperti dalam hal ini wilayah di sekitar Situ Rawa Besar. Berkembangnya suatu lahan yang hingga kini menjadi permukiman karena tingginya kebutuhan akan tempat tinggal yang murah serta terdapatnya kelompok strategis lokal yang menguasai lokasi tersebut. Dalam menjalani kehidupan di tanah squatter warga DPR Kampung Lio menempuh berbagai cara untuk memperoleh kebutuhan hidup seperti dengan membuat surat-surat resmi kependudukan, memperoleh fasilitas publik serta mensiasati berbagai musibah melalui kemampuannya masing-masing. Hubungan sosial warga pun terjalin antara pemilik lahan dan sesama warga DPR Kampung Lio. Hubungan sosial antara warga Perumnas tidak sedekat antara sesama warga DPR Kampung Lio

Kata kunci: **Ruang,** ***Masyarakat Squatter,Produksi Ruang.***

MOTTO

“Anakku, jika engkau menulis 10 huruf, perhatikan apakah ada padamu perasaan semakin takut kepada Allah, semakin lembut, dan semakin tenang. Jika tidak merasakannya, ketahuilah apa yang engkau pelajari memudharatkanmu. Tidak bermanfaat untukmu.”

Ummu Sufyan Ats-Tsauri

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala limpahan pertolongan, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan kuliah lapangan yang sederhana ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam*, yang telah membawa ajaran untuk menuntun kita menuju kepada kehidupan yang berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat.

Skripsi yang berjudul *"Praktik Sosio Spasial Komunitas Daerah Pinggir Rawa (DPR) Di Perumnas, Depok"* ditulis untuk memenuhi salah satu persayaratan dalam memperoleh gelar sarjana sosial di Program Studi Sosiologi Pembangunan, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

Isu permukiman kumuh liar (*squatter)* di ibukota sudah menjadi fenomena yang selalu ada di setiap kota. Isu ini sudah hadir ketika pembangunan suatu wilayah dimana masyarakat marjinal yang tidak memiliki kekuatan terutama secara ekonomi harus mempertahankan kehidupan dengan cara mengisi ruang-ruang kosong yang ada diperkotaan secara ilegal. Berbagai faktor yang melandasi munculnya permukiman tersebut tersebut menjadi ketertarikan untuk selanjutnya melihat penguasaan lahan di wilayah tersebut. Pada kesempatan ini turut disampaikan pula rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Dr. Muhammad Zid, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
2. Dr. Robertus Robert, M.A selaku Koordinator Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta.
3. Rusfadia Saktiyanti Jahja, M.Si selaku dosen pembimbing satu yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukkan, motivasi dan semangat kepada peneliti selama masa penyusunan skripsi ini berlangsung.

4. Syaifudin, M.Kesos selaku dosen pembimbing dua yang juga senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukkan, motivasi dan semangat kepada peneliti selama masa penyusunan skripsi ini berlangsung.
5. Asep Suryana, M.Si selaku penguji ahli yang memberikan arahan dan masukkan terhadap penulisan skripsi.
6. Rakhmat Hidayat, PhD selaku ketua sidang dan Achmad Siswanto, M.Si selaku sekretaris sidang yang memberikan arahan dan masukkan terhadap penulisan skripsi.
7. Seluruh keluarga peneliti yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama masa kuliah. Setiap dukungan dan doa yang tercurahkan memberikan kekuatan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
8. Informan dan warga RT 06 Perumnas serta warga DPR Kampung Lio yang senantiasa rela membantu peneliti dalam memberikan informasi yang sebaik-baiknya demi kebutuhan penelitian ini.
9. Segenap pihak yang turut membantu dalam memperoleh data maupun informasi tambahan yang dapat menunjang penelitian dan juga membantu kelancaran skripsi ini.
10. Teman-teman perkuliahan yang pada masa perkuliahan telah bekerjasama dengan baik dalam masa menuntut ilmu serta teman-teman yang telah membantu untuk terus menyemangati dan mengingatkan dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari ketidaksempurnaan penelitian ini. oleh sebab itu, saran dan kritik selalu diharapkan bagi kebaikan bersama. Semoga ksripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam melihat isu-isu perkotaan terutama dalam hal permukiman di perkotaan.

Jakarta, Februari 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	**i**
LEMBAR PENGESAHAN	**ii**
ABSTRAK	**iii**
MOTTO	**iv**
KATA PENGANTAR	**v**
DAFTAR ISI	**vi**
DAFTAR BAGAN	**viii**
DAFTAR GAMBAR	**ix**
DAFTAR TABEL	**x**
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Permasalahan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Studi Sejenis	8
F. Kerangka Konsep	
1. Pengertian Permukiman Kumuh Liar *(Squatter)*	15
2. Produksi Ruang Henri Lefebvre	17
G. Metodologi Penelitian	24
1. Subjek Penelitian	25
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3. Peran Peneliti	28
4. Proses Pengumpulan dan Analisis Data	29
5. Triangulasi Data	31
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II KONTEKS SOSIAL HISTORIS PERKEMBANGAN DAERAH PINGGIR RAWA KAMPUNG LIO	
A. Pengantar	34
B. Sejarah Kampung Lio	36
1. Kampung Lio Pada Zaman Belanda	36
2. Kampung Lio Pada Zaman Perumnas	38
3. Kampung Lio Pada Zaman Sekarang	44
C. Gambaran Umum Daerah Pinggir Rawa	44
D. Profil Informan	52
1. Nanang Penggarap Awal Daerah Pinggir Rawa dari Warga DPR	52
2. Amar Pemilik Garapan dari Perumnas	54

3. Robi Ketua RT 06 Perumnas dan Pemilik Garapan DPR..... 55
4. Tia Pembeli dan Penghuni Garapan DPR..... 55
E. Penutup 59

BAB III RUANG SEBAGAI MODE PRODUKSI DI LINGKUNGAN DAERAH PINGGIR RAWA
A. Pengantar 60
B. Ruang Sebagai Produk di Daerah Pinggir Rawa 62
1. Daerah Pinggir Rawa Sebagai Komoditi Ekonomi..... . 73
C. Ruang Sebagai Penentu Relasi dan Tindakan Sosial Perumnas dengan Komunitas DPR 76
1. Relasi Sosial dan Tindakan Sosial Warga DPR dengan Perumnas 80
2. Relasi Sosial dan Tindakan Sosial Antara Sesama Warga DPR .. 82
D. Dominasi di Dalam Ruang..... 86
E. Penutup 91

BAB IV PRAKTIK SOSIO SPASIAL KOMUNITAS DAERAH PINGGIR RAWA (DPR) DI PERUMNAS, DEPOK
A. Pengantar 93
B. Beralihfungsinya Suatu Ruang 95
C. Alih Fungsi Ruang dalam Praktik Spasial 110
1. Peran Pemerintah Lokal 107
D. Alih Fungsi Ruang dalam Representasi Ruang 112
E. Alih Fungsi Ruang dalam Ruang Representasional 117

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 120
B. Rekomendasi 122

DAFTAR PUSTAKA 123
RIWAYAT HIDUP 127

DAFTAR BAGAN

Halaman

II.1 Konseptualisasi Perkembangan di Daerah Pinggir Rawa 35
III.1 Proses Produksi Ruang di DPR 62
III.2 Perubahan Sosial DPR 66
III.3 Penggunaan Lahan Berdasarkan Status Sosial 75
III.4 Jenis Status Kependudukan di Daerah Pinggir Rawa 77
III.5 Alur Penjagaan Ketertiban DPR 88
IV.1 Proses Alih Fungsi Ruang di DPR..... 95
IV.2 Kepemilikan wilayah Situ Rawa Besar di DPR..... 102
IV.3 Bentuk Hubungan Antara Warga Perumnas dengan Warga DPR 105

DAFTAR GAMBAR

Halaman

II.1 Ilustrasi Kampung Lio Saat Awal Pembangunan Perumnas Depok Jaya 43
II.2 Peta Lokasi Permukiman *DPR* Kampung Lio 45
II.3 Rumah Keluarga Tia 56
II.4 Anco milik keluarga Tia 58
III.1 Permukiman Garapan Nanang 69
III.2 Lapak penyewa di tanah garapan Opik 70
III.3 Jalan Masuk Tanah Garapan Opik 72
III.4 Permukiman di Daerah Pinggir Rawa Yang Sudah Berbentuk Permanen 73
III.5 Permukiman Perumnas dan DPR 81

DAFTAR TABEL

Halaman

I.1 Matriks Tinjauan Pustaka 14
I.2 Tiga Rangkaian Konseptual Henri Lefebvre 23
I.3 Subyek Informan Utama 26
I.4 Subyek Informan Pendukung 27
II.1 Perubahan Sosial Kota Depok 37
II.2 Pertumbuhan Populasi Kota Depok Tahun 1976-1999 39
II.3 Potensi Sosial Kecamatan Pancoran Mas 48
III.1 Matriks Perubahan Sosial DPR 64
III.2 Penggunaan Lahan Berdasarkan Kepemilikan Tanah 68
IV.1 Tiga Rangkaian Konseptual di *DPR* Kampung Lio 103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan DKI Jakarta secara langsung maupun tidak langsung ikut berpengaruh terhadap daerah sekitarnya. Pembangunan tersebut dilakukan dengan cepat dari segi sarana maupun prasarana untuk menunjang keberlangsungan warga. Akibat hal tersebut, masyarakat dari daerah sekitar dan daerah lain di Indonesia tertarik untuk pindah ke DKI Jakarta melihat perkembangan yang lebih menjanjikan daripada di daerah asalnya. Para pendatang mencoba peruntungan untuk meningkatkan taraf ekonomi. Akibat migrasi tersebut, menyebabkan terjadinya peningkatan penduduk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 jumlah penduduk DKI Jakarta berjumlah 8.347.10 pada tahun 2010 jumlah penduduk DKI Jakarta berjumlah 9.607.80 pada tahun 2012 berjumlah 9.862.10 pada tahun 2013 berjumlah 9.969.90 dan pada tahun 2014 berjumlah 10.075.30 ribu penduduk.[1]

Peningkatan penduduk di DKI Jakarta meningkat sedangkan luas lahan tidak bertambah. Peningkatan ini ikut berpengaruh terhadap peningkatan akan permintaan kebutuhan tempat tinggal. Masyarakat yang memiliki kelebihan ekonomi dapat memperoleh tempat tinggal yang layak di DKI Jakarta. Sedangkan masyarakat yang tidak

[1]Statistik Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2000, 2010-2014, (URL: http://bappedajakarta.go.id/?page_id=1131), diakses pada 20 maret 2016.

memiliki kelebihan ekonomi akan memperoleh tempat tinggal yang kurang strategis bahkan kurang layak huni.

Salah satu kota yang terkena dampak dari DKI jakarta adalah kota Depok. Kota Depok menjadi salah satu kota permukiman masyarakat urban. Lokasi kota Depok yang bersebelahan dengan DKI Jakarta memungkinkan warga pulang pergi antara DKI Jakarta ke Kota Depok. Tetapi seiring berjalannya waktu, kota Depok menghadapi permasalahan yang sama dengan DKI Jakarta yaitu peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan penduduk Kota Depok terus terjadi dari tahun-ketahun. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Kota Depok mencapai1.898.567 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 961.876 jiwa dan penduduk perempuan 936.691 jiwa.[2] Sedangkan pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2.033.508 jiwa terdiri atas 1.025.784 jiwa laki-laki (50,44%) dan 1.007.724 jiwa perempuan (49,56%).[3]

Sedangkan untuk tingkat kepadatan pada tahun 2012 kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 9.479 jiwa/km². Kecamatan Sukmajaya merupakan kecamatan terpadat di Kota Depok dengan tingkat kepadatan 14.062 jiwa/km2 kemudian Kecamatan Pancoranmas dengan tingkat kepadatan 12.624 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sawangan yaitu sebesar 5.210 jiwa/km.[4] Pada tahun 2014 kepadatan penduduk mencapai 10.255 jiwa/km2. Kecamatan Sukmajaya merupakan kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan 15.063 jiwa/km2 kecamatan Pancoran Mas dengan tingkat kepadatan 13.522 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan

---

[2] Depok Dalam Angka (Depok,2012) hlm. 31.
[3] Depok.go.id, (URL: www.depok.go.id/profil-kota/demografi) diakses pada 17 Desember 2016.
[4] *Ibid.*,

kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sawangan 5.580 jiwa/km2.[5] Peningkatan penduduk sama dengan meningkatnya kebutuhan akan permukiman warga. Permukiman yang terdapat di Kota Depok tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh pemerintah Kota Depok karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam hal penyediannya. Ketidakmerataan kemampuan dalam mengakses permukiman dan belum meratanya fasilitas publik, membuat pembangunan permukiman menjadi tidak terkendali yang pada akhirnya membuat kota Depok tidak luput dari fenomena permukiman kumuh *(slum)* dan pemukinan liar ilegal *(squatter)*.

Permukiman kumuh dan permukiman liar di Kota Depok berkembang cukup pesat di lokasi-lokasi strategis Kota Depok. Permukiman tersebut dapat ditemui seperti di tempat-tempat publik seperti stasiun kereta, terminal, pinggir kali, kolong jembatan dan lain lain. Pemerintah Kota Depok sudah beberapa kali mencoba untuk mengatasi permukiman kumuh dan liar, salah satu lokasi yang dianggap cukup berhasil adalah permukiman kumuh yang berada di permukiman Perumnas yang diberdayakan oleh pemerintah kota Depok menjadi salah suatu Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota berupa taman kota. Namun hingga saat ini belum semua daerah kumuh dan liar berhasil ditangani oleh pemerintah.

Permukiman kumuh sekaligus liar yang masih berdiri adalah permukiman yang terdapat di RT 03 Kampung Lio yang disebut dengan Daerah Pinggir Rawa atau disingkat

[5] Depok.go.id (URL: www.depok.go.id/profil-kota/demografi), diakses pada 17 Desember 2016.

dengan DPR (Selanjutnya akan disebut DPR).[6] Kampung Lio merupakan kampung yang kehadirannya sudah ada jauh sebelum pembangunan Perumnas. Kampung Lio berlokasi di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas yang bersebelahan langsung dengan Situ Rawa besar, lokasi yang strategis dekat dengan fasilitas publik dan Pusat kota Depok. Sebelum kehadiran DPR, Kampung Lio dengan Perumnas dipisahkan dengan Situ Rawa besar, hingga saat ini wilayah Kampung Lio meluas karena penambahan jumlah permukiman di DPR. Kehadiran penduduk di lokasi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, mulai dari permasalahan lingkungan hingga permasalahan sosial.

Permukiman kumuh liar *(Squatter)* yang terdapat di Kampung Lio merupakan permukiman kumuh yang hadir sejak pembangunan Perumnas. Pembangunan perumahan pertama di Kota Depok membuat warga dari luar Kota Depok datang untuk mencari peruntungan. Permukiman ini mendapatkan predikat sebagai permukiman kumuh liar terbesar di Kota Depok pada tahun 2005 hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reni Siti Nuraeni.[7] Data tersebut diperkuat dengan pernyataan ketua RT 03 Kampung Lio. Hingga saat ini permukiman kumuh liar (*squatter)* di Kampung Lio terdapat lebih dari 150 rumah yang tergabung kedalam satu Rukun Tetangga (RT) yaitu RT 03 Kampung Lio.

---

[6] Daerah Pinggir Rawa (DPR) merupakan sebutan dari masyarakat sekitar (warga Perumnas dan Kampung Lio) untuk warga yang tinggal didaerah garapan permukiman kumuh liar, penyebutan ini lebih terkenal daripada penyebutan sebagai RT 03 Kampung Lio. Istilah ini muncul karena permukiman kumuh liar tersebut berlokasi di daerah sempadan Situ Rawa Besar.

[7] Reni Siti Nuraeni, Pola Persebaran Permukiman Squatter di Kota Depok, Tesis, Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Magister ilmu geografi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2005.

Isu pengentasan wilayah kumuh di RT 03 Kampung Lio sudah menyebar beberapa kali. Namun belum terdapatnya tindakan tegas dari pemerintah membuat permukiman tersebut bertambah dari tahun ke tahun. Hingga saat ini kondisi permukiman kumuh liar yang sebelumnya hanya berisi bangunan semi permanen telah terdapat beberapa rumah yang sudah berbentuk permanen.

Pemerataan pembangunan terutama untuk golongan menengah kebawah hingga saat ini masih menjadi tanggung jawab bersama. Mengingat pertumbuhan permukiman kumuh lebih cepat dari penanganan pemerintah. Pembangunan suatu kota tidak hanya bertumpu pada pertimbangan ekonomi dan keindahan saja tetapi juga terhadap faktor sosial agar semua warga dapat menikmati sarana dan prasarana yang nyaman dan aman. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi suatu alih fungsi ruang permukiman kumuh liar di daerah RT 03 Kampung Lio, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, kota Depok.

B. Permasalahan Penelitian

Setelah melihat pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan permukiman menjadi salah satu permasalahan yang terus terjadi di suatu kota, menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kondisi permukiman mempengaruhi tata ruang kota. Kondisi tata ruang yaitu lingkungan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan kumuh liar harus beradaptasi dan berusaha lebih keras dalam menunjang kehidupan di lokasi yang kurang memadai.

Ruang hingga saat ini menjadi salah satu komoditi yang bernilai ekonomi. Seperti diketahui ruang dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan, semakin dekat dengan pusat kota semakin tinggi perebutan ruangnya. Penggunaan ruang bermakna lain oleh masing-masing individu yaitu sebagai tempat tinggal, tempat usaha, tempat membangun kehidupan dan sebagainya. Pentingnya keberadaan ruang dalam menunjang kehidupan membuat semua orang membutuhkan sebuah ruang untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

Permukiman DPR merupakan salah satu dari permukiman kumuh liar di Kota Depok yang terletak di Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas bersebelahan langsung dengan pusat Kota Depok. Permukiman tersebut secara resmi masuk kedalam wilayah perkampungan yang berdiri sudah cukup lama yaitu Kampung Lio. Kampung merupakan permukiman yang muncul begitu saja, bukan merupakan bagian dari suatu rencana penataan jalan dan penempatan bangunan. Kampung-kampung tak jarang hadir di pusat perkotaan. Kadangkala, ia merupakan suatu daerah kumuh yang ditinggalkan, namun lebih sering merupakan wilayah pedesaan yang tercakup oleh perluasan ruang kota. Perkampungan pada mulanya dibangun sebagai ruang yang kemudian melalui proses intensifikasi pembangunan menyerap semakin banyak orang pindah untuk bermukim di kampung-kampung.[8] Dalam hal ini Permukiman DPR, dari segi lokasi permukiman DPR masuk ke daerah Perumnas daripada Kampung Lio. Seiring

[8] Lea Jellinek, Seperti Roda Berputar Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta (Jakarta: LP3ES, 1994) hlm. 1-15.

berjalannya waktu warga DPR masuk kedalam daerah RT 03 Kampung Lio berdasarkan oleh berbagai faktor.

Berdasarkan gambaran situasi tersebut, maka dirumuskanlah pertanyaan penulisan untuk mengeksplorasi bagaimana proses warga DPR di Kampung Lio menempati suatu lahan negara, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari alih fungsi ruang di Daerah Pinggir Rawa?
2. Bagaimana bentuk alih fungsi ruang di RT 03 Daerah Pinggir Rawa? dan apa dimensi sosiologis yang memengaruhi pemanfaatan ruang tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dampak dari alih fungsi ruang di Daerah Pinggir Rawa.
2. Untuk menjelaskan bentuk alih fungsi ruang di Daerah Pinggir Rawa. Dan apa dimensi sosiologis yang memengaruhi pemanfaatan ruang tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang mendetail dengan mendeksripsikan alih fungsi ruang yang dilakukan oleh warga DPR serta aktor dibalik kepemilikan lahan yang terdiri warga RT 06 Perumnas dan warga Kampung Lio. Tulisan ini juga bermanfaat dalam menggambarkan perkembangan suatu permukiman di wilayah perkotaan. Diharapkan dari tulisan ini dapat memberikan pandangan alternatif dalam penanggulangan isu permasalahan sosial di perkotaan. Dengan melihat perkembangan permukiman kumuh liar dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk menanggulangi munculnya permasalahan tersebut dan menemukan solusi terhadap

permasalahan permukiman yang dapat dinikmati oleh semua warga yang tinggal di perkotaan.

Manfaat akademis dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan pembangunan perkotaan. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat dalam studi sosiologi perkotaan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa mendatang. Tulisan ini diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan bagi kelompok akademis untuk melakukan observasi lebih lanjut dan mendalam mengenai alih fungsi ruang terutama di permukiman kumuh liar.

E. Tinjauan Studi Sejenis

Tema penelitian yang diambil pada hakekatnya telah banyak dilakukan oleh kalangan akademisi. Umumnya penelitian tersebut bertolak dari pemahaman permukiman kumuh liar *(squatter)* sebagai dampak pembangunan perkotaan yang mendasarkan pada studi tentang tata ruang. Oleh karena itu, meskipun saat ini telah banyak penelitian tentang permukiman tersebut dan berbagai persoalan yang menyertainya, namun penelitian ini mencoba untuk secara spesifik melahirkan suatu pandangan intelektual yang bersifat konstruktif, bahkan dengan melihat pada keberadaan masyarakat tersebut dalam menjalani kehidupan di tengah permukiman permanen. Dengan kata lain, meski terjadi penguasaan suatu lahan yang terbilang ilegal, terkait dengan upaya mencari hakekat hubungan ilmu sosiologi dengan realitas sosial dalam memaknai konsep.

Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang penguasaan suatu permukiman, tidak hanya dilakukan oleh kalangan mahasiswa jenjang sarjana hingga pasca sarjana yang ada di beberapa universitas, melainkan juga telah banyak dilakukan

oleh para peneliti dari luar negeri, seperti dari Australia yaitu Lea Jellinek, maupun dari Inggris oleh Susanne Wendt. Namun analisa yang kerap dilakukan umumnya bersandar pada studi arsitektur, geografi dan Antropologi, yang menekankan pada kajian kuantitatif dan etnografi.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, setidaknya juga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan bagi peneliti yang saat ini mengusung tema tentang alih fungsi ruang permukiman kumuh liar dalam perspektif sosiologi, dengan melihat hakekat pemaknaan yang diberikan oleh pemilik, penghuni maupun masyarakat yang tinggal berdampingan di lingkungan DPR. Penelitian terdahulu sangat berperan bagi peneliti saat ini untuk melakukan kajian analisis kritis agar memperoleh suatu konstruksi baru tentang pemaknaan permukiman kumuh liar. Dalam melakukan penulisan mengenai *"Praktik Sosio Spasial Komunitas Daerah Pinggir Rawa (DPR) di Perumnas, Depok"*, penulis melakukan peninjauan terhadap penulisan-penulisan terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Penulis mengambil enam hasil penelitan yang terkait dengan penulisan yang akan dilakukan:

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Reni Siti Nuraeni.[9] Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pola persebaran permukiman yang ada di kota Depok. Reni Siti Nuraeni menggunakan metode penelitian secara positivis bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini adalah kelompok masyarakat yang tinggal di permukiman *squatter* di Kota Depok. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Tetangga Dekat.

---

[9] Reni Siti Nuraeni, *Loc. Cit.*,

Hasil penelitian Reni Siti Nuraeni menunjukkan Pola persebaran permukiman *Squatter* di Kota Depok adalah mengelompok terutama di sekitar bantaran situ dan sungai atau kali. Terdapatnya permukiman *squatter* karena lahan kosong yang belum dikelola, lemahnya pengawasan pemerintah dan *law enforcement*. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu perbedaan dalam menggunakan metode penelitian. Adapun kesamaan diantara keduanya dalam hal subjek yakni pada masyarakat *squatter* dan kesamaan terhadap lokasi yang mengambil di daerah Kota Depok.

Penulisan yang kedua dilakukan oleh Lea Jellinek.[10] Tujuan penelitian ini adalah memahami dinamika lingkungan perkotaan yang kecil dan individu-individu yang tinggal di dalamnya. Ia melihat bagaimana orang-orang yang tinggal di Kebon Kacang bisa bertahan dalam kondisi perkotaan serta bagaimana hubungan sosial masyarakat kampung dalam kondisi perkotaan yang saat itu mengalami beberapa perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian kualitatif yaitu melakukan sejumlah wawancara dan survai. Teori penelitian yang digunakan yaitu Kebudayaan Kemiskinan dan involusi serta struktur sosial.

Hasil Penelitian ini menunjukkan Perkembangan permukiman liar di perkotaan hingga menjadi kampung masyarakat membuat suatu jaringan-jaringan kekerabatan. Penduduk kampung Kebon Kacang memiliki kecakapan dalam bertahan di dalam perkotaan. Perbedaan Lea Jellinek dengan peneliti adalah dalam hal lokasi yang diambil serta subjek penelitian serta teori yang digunakan oleh peneliti. Adapun kesaamaan

[10] Lea Jellinek, *Loc., Cit*

penelitian Lea Jelinek adalah dalam meneliti perubahan sosial suatu kampung yang terdapat di suatu kota.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Asep Suryana.[11] Tujuan penelitian ini adalah menyelami pola-pola kontestasi ruang sosial yang terbentuk ditengah proses suburbanisasi sebuah wilayah tertentu terhadap kota metropolitan pinggiran. Dalam penelitian ini melihat bagaimana kontestasi ruang sosial sebagai fenomena sosial kemasyarakatan yang menyumbang signifikan terhadap proses suburbanisasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengamatan, wawancara mendalam, dan wawancara sambil lalu. Teori yang digunakan yaitu *Peripheralization* dan *People Making Suburban*. Perbedaan terjadi pada lokasi penelitian yang diamati serta teori yang digunakan. Adapun kesamaan penelitian Asep Suryana dengan peneliti yakni dalam hal memahami perubahan sosial pada suatu kota serta persamaan dalam hal pendekatan.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Susanne Wendt.[12] Tujuan penelitian ini adalah Melihat kemunculan kemiskinan dan untuk memahami bagaimana masyarakat berjuang di wilayah seperti itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan yaitu Ketergantungan dan pendekatan politikal ekonomi internasional, paradigma modernisasi, Konsep dari kemiskinan dan marjinalisasi.

---

[11] Asep Suryana, *Suburbanisasi dan Kontestasi Ruang Sosial di Citayam*,Tesis, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2005.

[12] Susanne Wendt, *Slum and Squatter Settlements in Dhaka: A Study of Consolidation Processes in Dhaka's Low Income Settlement areas*, Disertasi, Fakultas Geografi dan Pembangunan Internasional, Universitas Roskilde, Inggris, 1997.

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan antara ekonomi, politik, dan sosiokultural menjadi faktor munculnya proses konsolidasi yang berfungsi sebagai sistem distribusi tanah atau perumahan. Faktor ekonomi dan politik menentukan munculnya proses konsolidasi. Perbedaan peneliti dengan penelitian ini yaitu dengan lokasi yang diambil. Adapun kesamaan penelitian dengan Susanne Wendt yaitu dengan teori yang digunakan serta subjek penelitian yaitu kelompok masyarakat *squatter* di kota Dhaka.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Agus Surono. [13] Tujuan penelitian ini adalah Mendapatkan informasi dan menganalisis tentang P4T terhadap tanah adat atau ulayat yang ada saat ini, mengkaji dan menganalisis tentang kontribusi P4T terhadap tanah adat atau ulayat terhadap kesejahteraan rakyat, mengkaji dan menganalisis pola P4T yang efektif dan ideal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mendapatkan informasi dan mengkaji tentang kemungkinan alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap pola P4T terhadap tanah adat atau ulayat untuk mensejahterakan masyarakat. Agus Surono menggunakan metode penelitian Pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis, lain halnya dengan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kelompok masyarakat yang tinggal di enam provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua. Teori yang digunakan dalam

---

[13] Agus Surono, *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)*, Fakultas Hukum, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013) (URL: http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/990/1/Buku%20P4T_OK%20FINAL.pdf), diakses pada 22 April 2016.

penelitian ini adalah Teori Negara Kesejahteraan, Teori Keadilan, Teori Hukum Pembangunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan Lebih dari 50 responden setuju bahwa pola penguasaan tanah adat mengarah pada individualisasi. Pola P4T yang ada saat ini masih menggunakan sistem konvensional. Kontribusi pola P4T belum dapat secara maksimal dapat mensejahterakan masyarakat. P4T harus lebih memperhatikan potensi masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar kawasan tanah ulayat tersebut dalam berbagai perspektif seperti ekonomi, sosial, budaya dan aspek lainnya. Perbedaan peneliti dengan Agus Surono yaitu perbedaan terhadap lokasi, subjek penelitian yang diambil serta teori yang digunakan. Adapun kesamaan peneliti yaitu kesamaan dengan metodologi penelitian yang digunakan serta konsep penguasaan.

Tabel I.1

Matriks Tinjauan Pustaka

Nama Peneliti	**Reni Siti Nuraeni**	**Lea Jellinek**	**Asep Suryana**	**Susanne Wendt**	**Agus Surono**
Judul Penelitian	Pola Persebaran Permukiman Squatter di Kota Depok	Seperti Roda Berputar, Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta	Suburbanisasi dan Kontestasi Ruang Sosial di Citayam, Depok	*Slum and Squatter Settlements in Dhaka, A Study of Consolidation Processes in Dhaka's Low Income Settkemment Areas*	Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
Tujuan Penelitian	• Mengetahui pola persebaran permukiman Squatter • Mengetahui tipologinya serta faktor apa yang mempengaruhi persebaran permukiman kumuh di Kota Depok.	• Memahami dinamika lingkungan perkotaan yang kecil • Memahami individu-individu yang tinggal didalamnya.	• Menyelami pola-pola kontestasi ruang sosial yang terbentuk ditengah proses suburbanisasi sebuah wilayah tertentu terhadap kota metropolitan pinggiran.	• Melihat kemunculan kemiskinan • Untuk memahami bagaimana masyarakat di tengah perkotaan	• Mendapatkan informasi dan menganalisis tentang P4T terhadap tanah adat atau ulayat. • Mengkaji dan menganalisis tentang kontribusi P4T terhadap tanah adat atau ulayat terhadap kesejahteraan rakyat. • Mengkaji dan menganalisis pola P4T yang efektif dan ideal.
Metode Penelitian	• Korelasi/Superimpose Peta • Suvey lapangan • pemberian kuesioner dengan menggunakan metode acak	• Pendekatan Kualitatif dengan metode wawancara, survai	• Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus	Pendekatan kualitatif	Pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis
Teori Penelitian	Analisa Tetangga Terdekat	• Kebudayaan Kemiskinan • Involusi • Struktur sosial	• *Peripheralization* • *People Making Suburban*	Ketergantungan dan pendekatan politikal ekonomi internasional. Paradigma modernisasi. Konsep dari kemiskinan dan marjinalisasi	Teori Negara Kesejahteraan, Teori Keadilan, Teori Hukum Pembangunan
Objek Penelitian	Kota Depok	Kebun Kacang,	Citayam	Dhaka	Provinsi Sumatera Barat, Sumatera

Nama Peneliti	Reni Siti Nuraeni	Lea Jellinek	Asep Suryana	Susanne Wendt	Agus Surono
		Jakarta			Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua
Hasil Penelitian	• Pola persebaran permukiman *Squatter* di Kota Depok mengelompok terutama di sekitar bantaran kali. • Permukiman *squatter* karena lahan kosong. • Lemahnya pengawasan dan *law enforcement*.	• Perkembangan permukiman liar di perkotaan membuat suatu jaringan-jaringan kekerabatan. • Diidentikan dengan perilaku budaya kemiskinan • Penduduk kampung memiliki kecakapan dalam bertahan di perkotaan.	• Suburbanisasi epifenomena, yang digerakan proses mobilitas kapital di sekitar kota metropolitan pinggiran • Suburban terbangun sebagai produk mekanisme pasar rumah yang "diatur" negara	• Faktor ekonomi dan Politik menentukan munculnya proses konsolidasi Hubungan • Munculnya proses konsolidasi yang berfungsi sebagai sistem distribusi tanah atau perumahan.	• Pola penguasaan tanah Mengarah pada individualisasi • pola P4T yang ada masih menggunakan sistem konvensional • kontribusi pola P4T belum secara maksimal mensejahterakan masyarakat.

Sumber: Olah referensi penulis, 2016.

F. Kerangka Konsep

1. Pengertian Permukiman Kumuh Liar *(Squatter)*

Squatter town adalah permukiman *(settlement)* yang berupa perumahan di bawah standar, sering tanpa status yang jelas mengenai tanahnya, dan berlokasi di dalam atau di batas-batas pinggiran kota. Fenomena penghuni liar *(squatter's)* di atas terdapat pula di daerah-daerah lain dengan nama yang lain pula. Di Amerika Latin, permukiman liar semacam itu disebut dengan *"barrios"*, *barridas"*, *"vacindades"*, *"favelas"*, di Turki

disebut *"gecekondu"*, dan di Irak disebut *"Sarifas"*.[14] Permukiman Kumuh dan Permukiman ilegal *(squatters)* adalah dua fenomena yang tidak dapat dipertukarkan secara operasional yang mana mengarah pada kediaman yang ditempati oleh seseorang atau sekeluarga yang:

1. Melanggar hak milik seseorang atas *private* dan properti pemerintahan tanpa surat izin yang legal;
2. Hidup dalam mutu dibawah standar (tidak terpelihara dan padat penduduk) penghuninya;
3. Mereka umumnya hidup dibawah garis kemiskinan. [15]

Bagaimanapun, beberapa penulis memberikan sedikit perbedaan kepada dua hal tersebut. *Squatter* terutama adalah konsep legal yang mana bersangkutan pada pemilikan potongan dari tanah atau pembangunan tanpa izin dari pemilik mengingat permukiman kumuh terutama berkenaan pada kehidupan dalam rumah bahwa terdapatnya rumah yang tidak terpelihara dan padat sungguh-sungguh itu masuk dalam kondisi penduduk mengenai kesehatan, kebakaran dan risiko kriminal tidak hanya untuk semua yang hidup dalam permukiman kumuh tetapi juga untuk keseluruhan komunitas urban. Sebetulnya, beberapa penghuni permukiman *squatter* mempunyai rumah di desa atau kampung lain.

Dalam studi kasus Indian mendeskripsikan, *squatter* adalah orang yang hidup di sebelah jalan kereta api karena kebutuhan untuk pindah, saat penawaran alternative yang layak tak lebih dari program perpindahan tempat tinggal yang dapat mereka atur. Banyak

---

[14] S.Menno, dkk, *Antropologi Perkotaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992) hlm. 63.
[15] Wahyudi Kumorotomo, dkk, *The Implementation of Slum and Squatter Improvement Programs in The River Basins of Yogyakarta* (1995) hlm. 2.

kelompok *low-income* adalah petani penyewa atau orang-orang yang tinggal sementara (indekos) oleh karena itu, tidak memiliki kemungkinan dari pembangunan rumah yang mana saat ini mereka tinggali. Tetapi banyak rumah tangga *low-income* lebih suka untuk tinggal dimana mereka tempati saat ini dengan kedudukan, infrastruktur dan peningkatan pelayanan yang meningkat. Mereka juga mengeluarkan banyak biaya untuk pindah, terutama jika perpindahan ke tempat yang lebih murah dengan lokasi yang tidak bagus dengan menganggap untuk kesempatan pekerjaan. Perpindahan juga mengganggu jaringan sosial mereka.[16]

2. Produksi Ruang Henri Lefebvre

Analisis ruang Lefebvre diperkenalkan kedalam konteks alam, kota, penduduk kota, dan kehidupan sehari-hari. Tujuan akhir analisis Lefebvre mengenai ruang mempertunjukkan bahwa ruang bersifat politik. Teori Lefebvre memahami bahwa produksi ruang menekankan kebutuhan untuk mempertimbangkan antara produk (benda) dan hal yang menentukan (proses) hubungan sosial dan tindakan.[17]

> *(Social) space is not a thing among other things, nor a product among other product: rather, it subsumes things produced, and encompasses their irrelationship in their coexsistence and simultaneity- their (relative) order and/or (relative) disorder.*[18]

Ruang sosial bukanlah sebuah benda diantara benda yang lainnya, bukan juga produk diantara produk yang lainnya, ini lebih digolongkan sebagai produksi benda, meliputi hubungan timbal-balik mereka dalam hidup berdampingan dalam waktu yang

---

[16] Diana Mitlin, et al, *Empowering Squatter Citizen : Local Government, Civil Society and Urban Poverty Reduction* (United Kingdom: Earthscan, 2004) hlm. 264.
[17] Andrzej Zieleniec, *Space and Social Theory* (first published, London: Sage Publications,2007) hlm. 60.
[18] Henri Lefebvre, *The production of Space* (English translation first published, Massachusetts: Basil Blackwell,1991) hlm. 73.

bersamaan – aturan keluarga mereka dan aturan ketidakteraturan keluarga mereka. Ini adalah hasil dari rangkaian.

Ruang juga merupakan produk ideologi, ekonomi dan kekuatan politik (bidang kekuasaan) yang mencoba membatasi, mengatur dan mengontrol kegiatan yang terjadi didalam dan melalui hal ini.[19]

> *What we are concerned with, then, is the long history of space, even though space is neither a 'subject' nor an 'object' but rather a social reality – that is to say a set of relations and forms. This history is to be distinguished from an inventory of things in space ... as also from ideas and discourses about space. It must account for both represantional spaces and representations of space, but above all for their interrelationships and their links with social practice. The history of space thus has its place between anthropology and political economy.*[20]

Yang menjadi perhatian ini adalah sejarah panjang mengenai ruang, walaupun ruang bukan 'subjek' bukan juga 'objek' tapi lebih kepada realitas sosial – ruang dapat dikatakan sebagai kumpulan hubungan dan bentuk-bentuk. Sejarah ini menjadi pembeda dari sebuah inventaris berbagai hal di dalam ruang, juga dari bentuk gagasan-gagasan dan diskursus tentang ruang. Ini menjadi catatan antara ruang representasional dan representasi ruang, tapi diatas semua itu hubungan timbal balik yang berkaitan dengan praktik sosial. Sejarah ruang mempunyai tempat antara antropologi dan ekonomi politik.

Ruang dalam suatu perkotaan menjadi suatu sumber daya yang terbatas menurut salah satu sosiolog marxist Henri Lefebvre. Marx mengatakan bahwa dalam sistem kapitalis, buruh sebagai entitas konkret (mutlak) telah teralienasi menjadi entitas yang abstrak. Buruh dihitung keberadaannya sebagai satuan waktu kerja yang nantinya masuk kedalam perhitungan komoditi yang dihasilkan, sehingga buruh sebagai entitas mutlak

---

[19] *Ibid.,*
[20] *Ibid.,*

(manusia) berubah menjadi abtraksi didalam sebuah komoditi. Demikian juga ruang, Lefebvre memandangnya sejalan dengan pemikiran Marx tersebut, bahwa ruang dalam dunia kapitalis saat ini telah mengalami "sublasi" sehingga teralienasi menjadi sesuatu yang abstrak.[21]

> *Instead of uncovering the social relationships (including class relationships) that are latent in spaces, instead of concentrating our attention on the production of space and the social relationships inherent into production, so echoing the contradiction between private ownership of the means of production an the social character of the productive forcs- we fall into the trap of treating space "in itself" as space as such.*[22]

Politik penciptaan (penataan) ruang merupakan sebuah reproduksi ruang dalam konteks kontrol, dominasi dan akumulasi kapitas. Penataan ruang adalah cara menciptakan batas-batas legal untuk alokasi penggunaan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya didalamnya. Disatu sisi membuka jalan bagi proses penyingkiran dan penggusuran warga secara legal, disisi lain membatasi ruang gerak dan akses warga untuk memanfaatkan sumber daya alam.[23]

Ruang sebagai entitas abstrak inilah terus diproduksi oleh kapitalisme. Kekuatan modal menentukan rancangan dan peruntukan ruang-ruang baru sesuai kepentingannya. Ruang tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang konkret yang menghadirkan realita aktivitas manusia penghuninya, akan tetapi dilihat sebatas sebagai rancangan gagasan ideal dengan membawa kepentingan modal dibelakangnya. Lefebvre juga merinci beberapa kontradiksi yang menyertai berkembangnya ruang-ruang abstrak produk kapitalisme ini, salah satunya hilangnya ruang-ruang bersama yang dikuasai oleh rezim Hak Milik

---

[21] Andi Setiawan, *Produksi Ruang Sosial Sebagai Konsep Pengembangan Ruang Perkotaan*, Universitas Sebelas Maret, hlm. 46.

[22] Andy Merrifield, *Henri Lefebvre a Critical Introduction* (Great Britain: Routledge, 2006) hlm. 106-107.

[23] Dedi Gustian, Astuti N Kilwouw dkk, *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik Atas Ruang di Tingkat Lokal* (Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), 2014) hlm. 24.

(*private property).* Akibatnya lenyaplah ruang-ruang komunal yang sarat dengan aktivitas sosial berganti ke ruang-ruang *private* yang sarat dengan kepentingan modal untuk bisa mengaksesnya.[24]

> *We now come to a basic and essential idea: capitalism is maintained by the conquest and integration of space. Space has long since ceased to be a passive geographical milieu or an empty geometrical one. It has become instrumental. This instrumentality was evident in what Lefebvre saw as the development of capitalism as a system in which space itself came to be viewed as a scarce resource and was treated as a homogenous and quantifiable commodity, with an exchange value to be traded, like any other commpdity on the market.*[25]

Kapitalisme dipertahankan dengan cara penaklukan dan integrasi ruang. Ruang telah lama berhenti menjadi lingkungan geografis pasif atau ruang geometris kosong. Ruang menjadi instrumental dan menjadi media dari perkembangan kapitalisme. Artinya, ruang merupakan sebuah sistem yang dipandang sebagai sumber daya langka, homogen, memiliki komoditas kuantitatif dan nilai tukar yang diperdagangkan seperti komoditas lainnya di pasar.

Ruang dapat memainkan beberapa fungsi sosio-ekonomi. Pertama, ruang berfungsi sebagai salah satu kekuatan produksi. Kedua, ruang dapat berupa beragam komoditas (*real estate/property)* yang dikonsumsi. Ketiga, ruang secara politik memfasilitasi kontrol sistem ekonomi dan politik. Keempat, ruang akan memperkuat reproduksi hubungan produktif. Oleh sebab itu, ruang bukan suatu wadah kosong yang bersifat geometris dan menjadi ruang bagi keberlangsungan kehidupan sosial semata, tetapi ruang adalah produk sosial.[26]

---

[24] Andi Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 3.
[25] Andrej Zieleniec, *Op. Cit.*, hlm. 67.
[26] Siti Aminah, Konflik dan Kontestasi Penataan ruang Kota Surabaya, Jurnal Sosiologi 20, 2015) hlm. 65.

Sesungguhnya tidak ada ruang yang sepenuhnya "ideal" karena ruang itu sendiri secara spasial dalam masyarakat kapitalis modern merupakan arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai diperebutkan. Semua pihak yang berkepentingan akan terus berusaha mencari cara untuk mendominasi pemakaian atau pemanfaatan atas suatu ruang dan mereproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan ruang tersebut. Dengan kata lain, ruang bersama *(common space)* akan selalu menyesuaikan kepentingan kapital dalam rangka menjamin relasi atau hubungan produksi dan reproduksi yang bersifat kapitalistik.[27]

Tiga rangkaian konseptual atas ruang yang dimaksud Lefebvre menjelaskan bagaimana suatu ruang sosial dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik Spasial *(Spacial Practice)*

Praktik spasial mengacu pada produksi dan reproduksi hubungan spasial antar objek dan produk. Hal inilah yang turut menjamin berlangsungnya kontinuitas produksi ruang sosial dan kohesivitasnya. Dalam hal ini, ruang sosial meliputi pula keterlibatan setiap anggota masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan tertentu terhadap kepemilikan atas ruang itu. Dengan demikian, kohesi sosial atas suatu ruang ditentukan oleh derajat kompetensi dan tingkat konerka atas pemakaian ruang (fisik atau material).

2. Representasi Ruang *(Representations of space)*

Representasi ruang tergantung pada pola hubungan produksi dan tatanan yang bertujuan memaksakan suatu pola hubungan tertentu atas "pemakaian" suatu ruang.

[27] Andrej Zieleniec, *Op. Cit.*, hlm. 68.

Maka, representasi ruang berkenaan dengan pengetahuan, tanda-tanda, atau kode-kode, bahkan sikap atau suatu hubungan yang bersifat "frontal".

Representasi ruang ini memberikan gambaran atau konseptualisasi sehingga sesuatu didefinisikan sebagai ruang. Representasi ruang muncul pada tingkat wacana, dia muncul dalam bentuk yang diucapkan seperti deskripsi, definisi, dan terutama teori ruang. Lefebvre memberi contoh representasi ruang ini bisa dilihat pada peta, gambar rencana ruang, informasi dan notasi dalam gambar ruang. Ilmu khusus yang berkaitan dengan representasi ruang ini adalah arsitektur, desain interior, perencanaan wilayah, dan juga ilmu-ilmu sosial (dalam hal khususnya geografi).[28]

3. Ruang Representasional *(Represantional Space)*

Dimensi ketiga dari produksi ruang merupakan kebalikan dari "representasi ruang". Ruang representasi menyangkut dimensi simbolik ruang. Ruang representasi tidak mengacu pada ruang itu sendiri tetapi pada sesuatu lain: kekuatan adi kodrati, pikiran, negara, prinsip maskulin atau feminin, dan sebagainya.[29]

Ruang representasional mengacu pada ruang yang secara nyata "hidup" *(Lived Space)* dan berkaitan secara langsung dengan berbagai bentuk pencitraan serta simbol yang terkait dengannya. Hal ini termasuk bagaimana para penghuni ruang atau orang-orang yang menggunakannya saling berinteraksi melalui praktik dan bentuk visualisasi di dalam suatu ruang. Konsepsi atas ruangpun muncul berdasarkan praktik spasial dan

---

[28] Andi Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 4.
[29] Andi Setiawan, *Loc. Cit.*

representasi ruang. Ruang menjadi sesuatu yang secara khusus dipersepsikan oleh individu, kelompok, atau masyarakat; ruang yang dipersepsikan *(perceived space)*

Tabel I.2

Tiga Rangkaian Konseptual Henri Lefebvre

Praktik Spasial *(Spatial Practices)*	Representasi Ruang *(Representations of Space)*	Ruang Representasional *(Representational Space)*
• Produksi dan reproduksi hubungan antar objek dan produk • Ruang sosial : keterlibatan setiap anggota masyarakat yang memiliki hubungan / keterkaitan tertentu terhadap kepemilikan atas ruang • Ruang yang hidup *(Lived Space)*	• Tergantung pada pola hubungan produksi dan tatanan yang bertujuan memaksakan suatu pola hubungan tertentu atas "pemakaian" suatu ruang • Pengetahuan, tanda-tanda, / kode-kode, sikap / suatu hubugan yang bersifat "frontal"	• Ruang yang secara nyata "hidup" *(Lived Space).* Berbagai bentuk pencitraan serta simbol yang terkait dengannya • Ruang yang dipersepsikan *(perceived space)*

Sumber : Andriej Zieleniec

Selanjutnya Lefebvre (1991) memandang ketiga konsep produksi ruang diatas menjadi tiga pengalaman:[30]

1. ***Perceived space***: ruang memiliki aspek perseptif yang dapat ditangkap oleh panca indera. Aspek ini merupakan komponen integral dari setiap praktik sosial, terdiri dari segala sesuatu yang bisa dicerap oleh panca indera; tidak hanya dilihat tapi didengar, dicium, disentuh, dan dirasa. Aspek ini berkaitan dengan materialitas "elemen" yang pada akhirnya menyusun sebuah "ruang".
2. ***Conceived space*:** ruang tidak dapat dipersepsi tanpa memahaminya terlebih dahulu didalam pikiran. Merangkai berbagai elemen untuk membentuk suatu

[30] Andi Setiawan, *Loc. Cit.*

"kesatuan yang utuh" yang kemudian disebut sebagai "ruang" merupakan tindakan pikiran dalam memproduksi pengetahuan.

3. ***Lived space*:** dimensi ketiga dari produksi ruang adalah pengalaman hidup di dalam ruang. Dimensi ini menunjukkan dunia seperti yang dialami oleh manusia dalam praktek kehidupan sehari-hari mereka. Pada titik ini Lefebvre sangat tegas: bahwa realitas hidup, pengalaman praktis, tidak akan selesai melalui analisis teoritis. Akan selalu terdapat surplus, sisa, atau residu berharga yang tak terjelaskan atau teranalisis, yang terkadang hanya dapat dinyatakan melalui cara-cara artistik.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Naratif. Dalam hal ini peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka.[31] Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya seseorang atau sekelompok orang dalam menguasai suatu lahan ilegal (*squatter)*. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan dalam proses pengumpulan data sekaligus dalam penulisan hasil penelitian.

Penelitian dengan metode kualitatif ini berjudul *"Praktik Sosio Spasial Komunitas Daerah Pinggir Rawa di Perumnas, Depok"* penulis menganggap bahwa permasalahan yang diteliti merupakan permasalahan yang perlu dibahas dengan pemahaman mendalam (*verstehen)* sehingga tidak memungkinkan permasalahan tersebut dilakukan dengan

[31] John W Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*, Edisi 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm. 58.

metode penulisan lainnya. Informasi seperti ini tidak dapat dipenuhi dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena tidak dapat menggali lebih dalam makna-makna dari kepemilikan suatu lahan. Terlebih dalam memperoleh informasi mengenai sebab, pola hingga dampak yang dirasakan secara subjektif bagi informan.

Pemilihan metode ini membutuhkan informasi yang mendalam dalam mengidentifikasi makna warga DPR dalam membangun permukiman di lingkungan tersebut. Penggunaan pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat karena penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan proses penguasaan ruang oleh warga dengan melihat dari persepsi informan, menemukan tanda-tanda bermakna (*in vivo),*

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih para informan secara *purposive*. Sesuai karakter pendekatan dalam kualitatif yang lebih menekankan sisi investigatif dan tidak didasarkan perhitungan statistik, kemudian dikatakan sudah cukup jika data tersebut telah mencapai kejenuhan (tidak memperoleh informasi yang berulang).[32] Informan yang relevan dalam penulisan kualitatif meliputi: 1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penulisan. 2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. 3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.[33]

---

[32] Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,* Alfabeta, (Bandung, 2010) hlm. 220.
[33] Sutinah Suyanto, *Metode Penulisan Sosial Bebagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 156.

Informan dalam penulisan ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dan bersangkutan dengan penghuni DPR juga beberapa Informan yang dikira mampu memberikan informasi yang sesuai dengan rancangan penulisan. Informan dalam penulisan ini dibagi menjadi tiga macam yaitu, informan kunci, informan utama dan informan pendukung, yaitu sebagai berikut:

- **Informan Utama**

Informan utama terdiri dari warga RT 06 Perumnas dan warga DPR yang merupakan aktor sebagai para penggarap di DPR RT 03 Kampung Lio. Warga RT 06 Perumnas terdiri dari tiga orang yaitu pemilik tanah garapan DPR yaitu Amar dan Robi serta satu orang dari warga DPR yaitu Nanang. Ketiganya merupakan penggarap yang terlibat dalam proses penggarapan pada tahun 1980-2016. Pemilihan informan tersebut agar dapat mewakili dalam memberikan informasi mengenai fenomena yang diambil. Informan berperan untuk memperkuat dan melengkapi data dari penelitian sebelumnya. Seperti tabel berikut ini :

Tabel I.3

Subyek Informan Utama

NO	NAMA	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1.	Amar	Pensiunan	4
2.	Nanang	Pensiunan	4
3.	Robi	Advokat/ Ketua RT 06 Perumnas	4

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2016

Untuk mendukung penelitian tersebut maka yang menjadi subyek penelitian yaitu penguni yang bertempat tinggal di DPR. Berikut ini informan kunci berupa *stakeholder* di DPR yang mendukung memperkuat data dalam penelitian ini yang dicantumkan bukan dengan nama sebenarnya, seperti tabel berikut ini:

Tabel I.4

Subyek Informan Pendukung

NO	NAMA	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1.	Asmi	Satpam	5
2.	Eli	Wiraswasta	4
3.	Masni	Aktivis dan Ketua RT 03 Kampung Lio	6
4.	Tia	Asisten Rumah Tangga	12

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2016

Berdasarkan tabel I.3 dan I.4 menunjukkan bahwa yang menjadi subyek penelitian tentang penguasaan ruang terdiri dari warga Perumnas dan warga RT 03 kampung Lio. Informan pendukung adalah pihak dari ketua RT 03 yang menaungi permukiman DPR, pihak penyewa tanah permukiman DPR, serta pihak penghuni permukiman DPR yang telah tinggal di lokasi tersebut dalam waktu yang cukup lama.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dalam penulisan kualitatif yang bermaksud mendapatkan data secara alamiah dapat terjadi di sekolah, perusahan, lembaga pemerintah, jalan, rumah, gereja dan lain sebagainya.[34] Lokasi penelitian yang diambil yaitu permukiman kumuh

[34] *Ibid*, hlm. 399.

ilegal yang berlokasi di pinggir Situ Rawa Besar DPR yang masuk kedalam RT 03 Kampung Lio, Kecamatan Pancoan Mas, Kelurahan Pancoran Mas, Depok. lokasi ini merupakan salah satu lokasi permukiman liar ilegal di Kota Depok. Lokasi ini merupakan salah satu permukiman kumuh ilegal yang terlama dan terbesar di kota Depok. Hingga saat ini permukiman DPR dihuni oleh ratusan kepala keluarga baik yang tercatat secara resmi maupun yang tidak resmi.

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini sekitar dimulai sejak bulan Februari 2015 sampai dengan April 2016. Waktu tersebut digunakan untuk melakukan pengambilan data di lapangan sampai penulisan hasil penelitian. Pengambilan data mulai dari karakteristik penduduk, sejarah konflik, hingga aktivitas warga DPR dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam periode waktu tersebut digunakan untuk melihat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat DPR di dalam ruang milik pemerintah. Selama periode penelitian dilakukan pengambilan sampel sebagai informan untuk kebutuhan pengumpulan data.

3. Peran Peneliti

Dalam melakukan penulisan, sejumlah penghuni DPR telah penulis kenal. Hal tersebut memudahkan penulis dalam perolehan data yang berkualitas. Hubungan antara penulis dengan informan kuncipun sudah cukup dekat dikarenakan sebelum penulisan ini dilakukan penulis dengan informan sebagai dua pihak yang saling membutuhkan dalam hal pekerjaan rumah tangga, informan bekerja dalam kediaman penulis selama kurang lebih dua tahun lamanya. Dalam jangka waktu dua tahun tersebut penulis berkomunikasi dengan informan, untuk sekedar mengobrol hal ini menjadi salah satu bentuk kemudahan

karena jarak batas antara penulis dan informan sudah ‘cair’ sehingga memudahkan peniliti dalam hal wawancara.

Selain itu, posisi penulis yang bermukim bersebelahan dengan permukiman DPR memudahkan penulis dalam hal akomodasi menuju tempat yang diteliti. Rumah yang penulis huni masih termasuk ke dalam perumahan Perumnas Depok Satu, tepat bersebelahan dengan permukiman DPR. Meski tinggal dalam satu kawasan, penulis tetap melalui prosedur izin penulisan sebagaimana lazimnya. Penulis mengumpulkan data secara bertahap menurut urutan serta pemenuhan data untuk melengkapi hasil penulisan.

4. Proses Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan data primer. Peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk membangun gambaran yang menyeluruh. Metode yang dipilih adalah wawancara, pengamatan, dan berbagai materi audio visual. Ketiga metode dilakukan secara bersamaan. Teknik penelitian yang digunakan yaitu teknik observasi langsung yaitu pengamatan langsung terhadap objek maupun subjek penelitian. Kedua, teknik wawancara yaitu memperoleh data berupa keterangan dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dan informan. Ketiga, teknik dokumentasi yaitu perolehan informasi dari berbagai sumber tertulis berupa dokumen, gambar foto maupun lampiran dari respoden.

Perolehan keterangan mengenai sejarah penguasaan dan pembangunan permukiman, peneliti melakukan dengan beberapa teknik. Teknik yang digunakan adalah dengan mengambil gambaran sejaran berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah berupa penelitian yang dilakukan oleh Asep Suryana. Peneliti melakukan wawancara dengan warga DPR dan RT 06 perumnas untuk mendapatkan pernyataan langsung sebagai data penguat.

Wawancara dipilih karena melalui teknik tersebut peneliti dapat menggali secara lebih dalam informasi yang sesuai dengan interpretasi informan. Dalam melakukan hal tersebut peneliti menggunakan kerangka atau pokok besar masalah yang menjadi pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, pertanyaan diajukan sesuai jawaban informan.

Penelitian dilakukan dengan cara mengamati lokasi dan kegiatan warga DPR. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lingkungan serta memperkuat keterkaitan data dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Pengamatan dilakukan bersaam dengan berlangsungnya proses wawancara. Peneliti mengamati situasi alami, hubungan sosial warga DPR dengan RT 06 Perumnas maupun sesama warga DPR serta aktivitas yang dilakukan warga.

Penelitian menggunakan alat pendukung dalam memperoleh data seperti alat perekam dan camera. Alam perekam digunakan untuk mengumpulkan informasi dari informan agar dapat diperoleh dengan lebih rinci serta karena keterbatasan peneliti dalam pencatatan semua informasi. Penggunaan alat perekam dengan persetujuan informan. Untuk kamera digunakan agar memperoleh gambaran lingkungan secara lebih jelas. Selain data primer peneliti juga mengumpulkan data sekunder terkait perkembangan Kampung Lio melalui penelusuran dokumen yang diakses dari beberapa

portal berita online seperti website, dan situs lain yang mendukung. Selain itu data berupa hasil penelitian orang lain ikut memperkuat data.

Dalam melakukan analisis data, peneliti juga mengumpulkan data dalam bentuk catatan kecil serta hasil rekaman. Proses analisis dilakukan setelah peneliti merasa cukup mengumpulkan data primer dan dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data sekunder. Selanjutnya peneliti membaca dan mendengarkan hasil pengumpulan data primer tersebut dengan teliti. Tujuan dari hal tersebut untuk mengetahui kecukupan data yang diperoleh agar data relevan dengan fokus penelitian.

Kegiatan membaca dan mendengarkan ini dilakukan secara berkali-kali untuk menemukan konsep penting yang disampaikan informan dalam sesi wawancara. Peneliti kemudian melakukan deskripsi pengalaman di lapangan untuk menggambarkan situasi dan konteks yang dapat membantu memahami jawaban informan. Selanjutnya peneliti mengkaji kata-kata yang relevan dengan fenomena yang diteliti dengan mengelompokkan kata-kata tersebut. Peneliti berusaha menemukan makna universal dan arti dari kata-kata yang berhasil dikelompokkan.

5. Triangulasi Data

Triangulasi dan pendeskripsian yang kaya serta mendalam, menjadi strategi validasi temuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi yang merupakan sejumlah teknik pengumpulan data yang berlainan untuk memperoleh bukti dari sumber informasi yang berbeda yang ditujukan untuk validasi informasi tersebut. Seperti pada penelitian ini, proses wawancara, pengamatan, serta studi tinjauan pustaka sejenis menjadi rangkaian sumber informasi yang dapat memvalidasi informasi tersebut.

Deskripsi yang kaya serta mendalam juga diterapkan dalam penelitian ini agar temuan dalam makalah ini menjadi lebih hidup.

Informasi-informasi yang didapat peneliti merupakan hasil temuan lapangan seperti wawancara pada informan yaitu penduduk permukiman kumuh liar serta penyewa tanah permukiman mengenai bagaimana terjadinya proses penguasaan ruang, bagaimana kecakapan penduduk dalam hidup di lingkungan. Deskripsi mendalam dibutuhkan sebagai bukti dari tema, isu ataupun pola yang ditemukan.

H. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab: satu bab pendahuluan, dua bab uraian temuan penelitian, satu bab analisis, dan satu bab penutup. Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang peneliti memilih fokus penelitian, permasalahan yang dikaji dalam penelitian, metode yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan hingga uji validitas penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka teori penelitian mengenai permukiman kumuh liar (*squatter)* dan produksi ruang Henri Lefebvre. Dalam hal ini juga berisi subjek, lokasi, dan waktu penelitian serta peran peneliti dalam penelitian.

Bab kedua menguraikan hasil temuan berupa konteks sosial historis dari permukiman DPR di Kampung Lio yang didalamnya dideskripsikan mengenai sejarah, tujuan, dan kegiatan warga DPR. Selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan profil dari penghuni yang mengacu pada latar belakang personal pengelola, alasan bermukim di DPR dan tujuan dari pemilihan lokasi permukiman.

Bab ketiga dalam tulisan ini ditujukan pada penjelasan mengenai bagaimana ruang sebagai mode produksi di DPR. Peneliti akan menjelaskan bentuk-bentuk produksi ruang, fungsi ruang yang dilakukan oleh pengelola dan penghuni. Selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan juga bagaimana produksi ruang tersebut digunakan oleh pengelola dalam memperoleh suatu lahan dilokasi tersebut. Pada bab ini akan dijelaskan juga tentang strategi dari pemilik tanah dalam mengelola tanah tersebut. Bab ini berisikan mengenai bagaimana proses jual beli tanah ingin melihat terdapatnya kelompok strategis lokal yang menguasai wilayah tersebut dan menjelaskan perjuangan hidup masyarakat DPR dalam menghadapi kehidupan perkotaan.

Bab keempat akan menguraikan tentang proses penguasaan suatu lahan oleh seorang atau sekelompok aktor serta hubungan sosial masyarakat DPR dengan permukiman Perumnas Depok Jaya. Bagian ini akan menjelaskan hal tersebut bagaimana suatu ruang menjadi komoditi yang diperebutkan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan.

Bab kelima merupakan bagian akhir atau penutup dari penulisan yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian, serta dilengkapi dengan rekomendasi yang mungkin dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi berisi saran yang diberikan peniliti untuk melihat proses terbentuknya ruang.

BAB II

KONTEKS SOSIAL HISTORIS PERKEMBANGAN DAERAH PINGGIR RAWA KAMPUNG LIO

A. Pengantar

Pada bab ini akan dipaparkan konteks sosial historis Daerah Pinggir Rawa Kampung Lio. Melalui aspek historis penulis memperlihatkan keadaan sosial atau perubahan pada setiap aspeknya. Menurut Pitirim Sorokin, perubahan sosial merupakan setiap perubahan subjek tertentu dalam perjalanan waktu, entah itu perubahan tempatnya dalam ruang, atau modifikasi aspek kuantitatif atau kualitatifnya.[35] Berdasarkan hal tersebut penulis akan memaparkan mengenai perubahan sosial melihat dari berbagai perubahan sosial di DPR yang masuk kedalam wilayah Kampung Lio, beberapa ulasan mengenai kondisi masyarakat dari zaman kota Depok sebelum menjadi sebuah kota yaitu pada zaman Belanda hingga menjadi sebuah kota yang sudah berkembang dengan pesat.

Untuk mengenal pembahasan mengenai permukiman ini lebih rinci, bab dua ini akan menguraikan kembali menjadi beberapa subbab. Subbab pertama, akan menerangkan Sejarah Kampung Lio yang dibagi kembali kedalam tiga bagian. Pertama, Kampung Lio pada Zaman Belanda. Kedua, Kampung Lio pada zaman Perumnas. Ketiga, Kampung Lio pada tahun 1990 hingga sekarang. Adapun Subbab Kedua, Gambaran Umum Lingkungan DPR yang berisi penjabaran lokasi, keadaan geografis,

[35] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2006) hlm. 6.

dan situasi sosial ekonomi Kampung Lio seca mum. Subbab ketiga yang berjudul Profil Warga Pendatang akan menggambarkan kehidupan warga yang tinggal di DPR serta warga yang berkaitan dengan warga Kampung Lio yaitu *stakeholder*.

Bagan II.1

Konseptualisasi Perkembangan di Daerah Pinggir Rawa

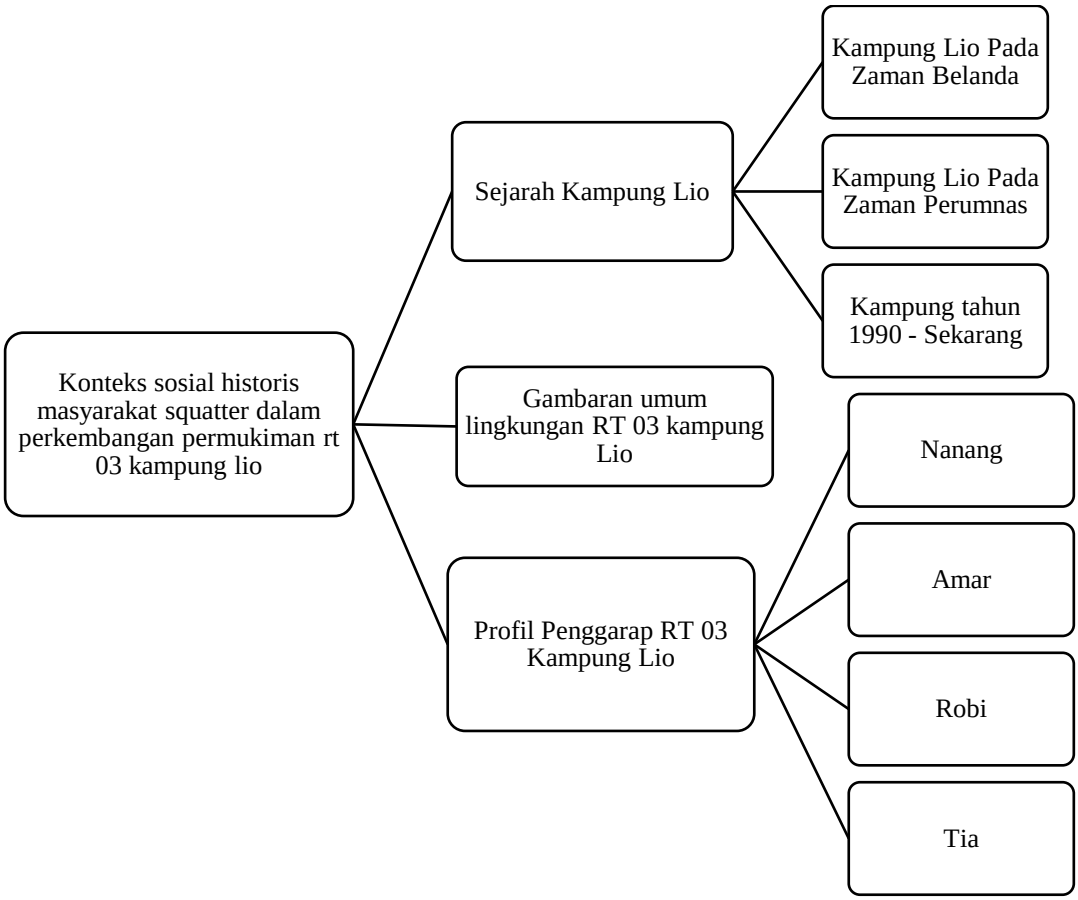

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2016

B. Sejarah Kampung Lio

1. Kampung Lio Pada Zaman Belanda

Permukiman permanen di Kota Depok sudah terbentuk kedalam wilayah yang disebut Kota Perkebunan Depok Lama. Hal ini berhubungan dengan Depok sebagai produsen dari salah satu komoditas *Verenidge Oost Indische Compagne* (VOC) untuk pasar dunia. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan *eigendom,* Cornelis Chastelein petinggi VOC, membeli perkebunan Depok dari Tio Tiong Ko (pemilik dari perkebunan sebelumnya) pada 18 mei 1691.[36]

Pertama, Chastelein membebaskan para pekerja budaknya bagi yang masuk agama protestan. Setiap budak diberikan bagian tanah dan alat-alat pertanian untuk membajak tanah sebagus rumahnya. Kedua, Chastelein juga mengatur asas-asas dalam kehidupan sosial dan administrasi dari perkebunan kota Depok yang dilaksanakan suatu badan yang mengatur masyarakat Depok Lama berdasarkan etika protestan. Dahulu pusat Kota Depok Lama adalah gereja Immanuel yang dibangun pada tahun 1700. Gereja tersebut merupakan pusat kegiatan keagamaan di Depok Lama.[37]

Keberadaan Kampung Lio yang sudah hadir sejak zaman tersebut ikut membantu dalam pembangunan rumah orang-orang Belanda. Disekitar kampung terdapat danau kecil (Situ) yang bernama Lio atau disebut juga sebagai Situ Rawa Besar. Menurut salah seorang warga Depok Jaya, sebelum tahun 1990-an, di tepi Situ banyak orang yang

---

[36] Asep Suryana dalam *Growing Metropolitan Suburbia a Comparative Sociological Study on Tokyo and Jakarta*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 33.
[37] *Ibid.*,

membuat genteng. Orang-orang mengeruk dasar Situ dan diambil lempungnya yang kemudian lempung tersebut dibentuk menjadi genteng. Proses pembuatan dan pembakaran genteng tersebut dilakukan di sekitar Situ, karena itulah nama Situ Rawa Besar lebih dikenal dengan sebutan Lio, yang artinya tempat pembuatan genteng.

Penduduk asli kampung Lio terdiri dari warga keturunan cina dan betawi. Beberapa lokasi sebelum hadirnya pendatang banyak tanah Kampung Lio yang kosong. Seperti pada daerah bagian selatan yang bersebelahan dengan Jalan Dewi Sartika. Daerah tersebut merupakan tempat pemotongan hewan ternak seperti Sapi, Babi, Kambing dan sebagainya. Belum terdapatnya permukiman padat di Kampung Lio membuat pemandangan Situ Rawa Besar terlihat melalui Jalan Dewi Sartika. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Masni yaitu ketua DPR:

> "Saya orang Cirebon. Tahun 1976 saya kesini pas peresmian Perumnas. Saya liat tuh pas diresmikan Pak Harto. Dulu belum ada ini... dulu mah bagus, dari Dewi Sartika keliatan rawa.. Ini kan tempat jagal. Jagal sapi, tapi sekarang udah pindah.[38]

Tabel II.1

Perubahan Sosial di Kota Depok

Tahun	Bentuk Perubahan Sosial
1691	Cornelis Chastelein membeli perkebunan Depok dari Tio Tiong Ko
1700	Pembangunan Gereja Immanuel sebagai pusat kegiatan keagamaan di Depok Lama
1972	Presiden Soeharto membentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN)
1975	Pembangunan perumahan Perum Perumnas sebagai perumahan pertama di Depok.
1976	Daerah sempadan Situ Rawa Besar berbentuk 'empang-empang'
1980	Proses pembuatan dataran di *DPR*
1990	Munculnya permukiman *DPR*

Sumber : Diolah peneliti, 2016

[38] Wawancara Masni Maret 2016.

2. Kampung Lio Pada Zaman Perumnas

Transformasi sosial ekonomi Depok pada zaman modern dimulai dengan kehadiran perumahan "Perumnas" pada tahun 1976. Di samping perumahan "Perumnas", relokasi Universitas Indonesia ke Depok pada 5 September 1987 merupakan titik penting lainnya dalam transformasi sosial ekonomi Depok. Kedua hal tersebut berdampak pada dua pembangunan, pertama populasi dan peningkatan infrastruktur kota. Kedua, corak dari perumahan dalam Depok saat ini. Ketiga, struktur sosio ekonomi Depok, dan keempat otonomi dan perubahan status administratif.[39]

Setelah pembangunan, Perumnas siap dihuni oleh masyarakat. Dalam waktu empat tahun (1976-1980), populasi Depok meningkat sebanyak 20%.[40] Kelurahan Depok Jaya yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan Perumnas Depok I yang diresmikan presiden Soeharto tanggal 12 Agustus 1976, ditandai penandatanganan prasasti disebuah rumah di Jalan Manggis V, Depok Jaya, dan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada Sugito wartawan harian angkatan bersenjata mewakili 180 keluarga wartawan dan karyawan pers. Saat itu presiden juga meresmikan penggunaan Taman Kanak-kanak Pertiwi di Jalan Kedondong Raya. Peresmian tersebut sekaligus meresmikan beroperasinya Kereta Api Listrik (KRL) Depok-Bogor.[41]

Perumahan Perumnas merupakan proyek percobaan yang dibangun Perum Perumnas (Perusahaan Umum Perumahan Nasional, badan usaha milik pemerintah yang

---

[39] *Ibid.*
[40] Asep Suryana, *Loc.Cit*. hlm. 38.
[41] H.Harun Nurochadi, Tiga Dasawarsa Perumnas Depok 1, (Gemari Edisi 69/Tahun VII/Oktober 2006) hlm. 45.

menyediakan perumahan untuk masyarakat menengah kebawah), menyediakan 20,867 unit untuk masyarakat menengah kebawah. Pemilihan Kota Depok sebagai proyek percobaan berdasarkan dua hal. Pertama, Kota Depok tidak jauh dari Kota Jakarta. Kedua, Kota Depok merupakan wilayah yang dilintasi oleh jalan kereta api antara Jakarta–Bogor, yang mana ini memungkinkan penduduk perumahan Perumnas untuk pulang pergi ke Kota Jakarta.[42]

Tabel II.2

Pertumbuhan Populasi Kota Depok Tahun 1976-1999

Tahun	Jumlah Populasi	Kepadatan Populasi
1976	94,144	1,400.0
1978	113,671	1,690.4
1979	131,252	1,951.8
1980	203,499	3.026,2
1982	233,799	4.169,8
1990	280,916	5.010,1
1992	329,309	5.872,2
1995	345,935	6.169,7
1999	866,214	4.224,5

Sumber : Asep Suryana dalam *Growing Metropolitan Suburbia*, 2004

Populasi Kota Depok meningkat lebih lanjut, saat kampus Universitas Indonesia dipindahkan ke Kota Depok. Pemindahan ini membuat anggota dari kampus, terutama mahasiswa ikut pindah ke Kota Depok. Kebanyakan dari mereka datang dari keluarga kelas menengah yang memiliki kekuatan ekonomi kuat. Mereka membutuhkan tempat untuk hidup, makan, dan memenuhi berbagai macam kebutuhan. Beberapa dari mereka membeli semua kebutuhan tersebut kepada penduduk asli, walaupun beberapa dari mereka dilayani dengan kepemilikan modal besar yang membuka rumah makan besar,

[42] Asep Suryana,*Op. Cit*. hlm. 38.

kamar sewa, dan juga menyediakan hiburan yang digerakan secara profesional.[43] Untuk menunjang kegiatan kampus, infrastruktur Kota Depok ditingkatkan, terutama kereta listrik dan jalan. Sebagai contoh pada tahun 1989, Jalan Margonda (jalan utama yang menghubungkan Depok dan Jakarta) diperluas kedalam dua jalur (beberapa melebar 5 M) sejajar dengan jalur kereta.[44]

Pembangunan Perumnas merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan populasi. Perlahan tapi pasti, Perumnas membuka suatu pusat kegiatan sosio ekonomi dan administrif yang pada awalnya berlokasi di wilayah Depok Lama. Beberapa sektor ekonomi mulai beroperasi. Sektor ekonomi informal juga bermunculan mencoba menyediakan kebutuhan penduduk sehari-hari. Sektor ini bertindak sebagai distributor yang menghubungkan antara pusat perdagangan dan penduduk yang hidup di daerah pedalaman. Pada tingkat Administrasi, terdapat percepatan peningkatan sosio ekonomi yang akhirnya menampung dalam perubahan status Depok menjadi kota administratif.[45]

Dalam wilayah ini juga terdapat empat jenis permukiman, mewakili tingkatan paling awal dari transformasi. Pertama, perumahan yang berada di Depok Lama merupakan perumahan yang berdiri selama periode kolonial. Sekarang ini, permukiman ini menjadi simbol sejarah kota Depok. Kedua yaitu perumahan Perumnas, permukiman ini menjadi titik keseluruhan terhadap tingkatan awal dari transformasi. Perumnas menjadi "*trade mark"* kota Depok. Ketiga, yaitu *real estate* yang tumbuh dengan subur

---

[43] *Ibid.,*
[44] *Ibid.,*
[45] Asep Suryana,*Op.Cit*. hlm. 40.

secara cepat setelah infrastruktur Depok dibangun dengan lengkap, pembangunan wilayah suburb ini dilakukan oleh pihak swasta. Akhirnya urban kampung, sebuah jenis permukiman yang tumbuh dengan cepat ditengah-tengah perkembangan kota.[46]

Perkembangan Depok menjadi semakin pesat sejak Presiden RI ke II HM Soeharto memberikan perhatian lebih dalam pembangunan perumahan Perumnas.[47] Peningkatan pembangunan di Kota Depok sebagai konsekwensi, semua jenis sektor ekonomi swasta (bersamaan dengan keberadaan sektor ekonomi negara) telah berjalan baik di wilayah primer Depok. Dalam kerangka ini, sektor ekonomi informal menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk pegawai sipil, pekerja dalam sektor formal, dan mahasiswa yang berada di wilayah primer Depok. Dampak sosio ekonomi lain dari relokasi kampus adalah dalam pembentukan wilayah sekunder di Depok. Beberapa permukiman di Beji, contohnya terjadi setelah kampus direlokasi pada tahun 1980-an. Ini memotivasi pendatang baru untuk pindah ke wilayah sekunder salah satunya dengan membangun sendiri rumah mereka maupun dengan menyewa rumah.[48]

Wilayah tersier dibentuk pada pertengahan tahun 1990-an sejak bagian selatan Depok menjadi target utama para pembangun untuk membangun perumahan. Di daerah Rangkapan jaya contohnya, perumahan dibangun pada tahun 1990-an. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut wilayah infrastruktur sedang ditingkatkan. Sebagai tambahan,

---

[46] *Ibid.*,
[47] Asep Suryana,*Op.Cit*. hlm. 1.
[48] Asep Suryana,*Op.Cit*. hlm. 41.

harga yang ditawarkan pada tanah wilayah ini juga memungkinkan pembeli yang datang dari latar berlakang menengah kebawah.[49]

Setelah pembangunan Perumnas selesai jumlah penduduk Kampung Lio meningkat. Warga yang tidak bisa mengakses rumah Perumnas memilih tinggal di Kampung Lio yang lebih terbuka dan lebih terjangkau. Peningkatan jumlah penduduk tersebut salah satunya karena masuknya *Daerah Pinggir Rawa (DPR)* Kampung Lio pada bagian barat dan utara Situ Rawa Besar yang sebelumnya merupakan Rawa. Istilah *DPR* mengacu kepada permukiman kumuh liar hasil dari pembentuka Rawa menjadi dataran. Sebelum masuk kedalam *DPR*, daerah tersebut dikenal oleh warga setempat sebagai *DPR*..

Berbagai penduduk yang datang berasal dari berbagai daerah, mayoritas berasal dari daerah Pulau Jawa. Hingga saat ini jumlah penduduk asli Kampung lio hanya 10 % dari seluruh penduduk Kampung Lio.

> "Orang asli ada, orang cina sama betawi.....ya ada kali 10 sampe 20 orang disitu sama disana".[50]

Peningkatan jumlah penduduk salah satunya karena masuknya 'Daerah Pinggir Rawa' yaitu daerah yang sebelumnya merupakan dataran buatan warga setempat. Belum terdapatnya batas permanen antara Situ Rawa Besar dengan dataran membuat warga setempat memanfaatkan lokasi tepi rawa tersebut (pada bagian barat dan utara) untuk dijadikan 'empang-empang' ikan air tawar. Empang tersebut dimiliki oleh warga

---

[49] *Ibid.*,
[50] Wawancara Masni maret 2016

Perumnas dan Pendatang. Seiring berjalannya waktu ‘empang’ tersebut diubah menjadi dataran hasil dari pengurugkan.

Gambar II.1

Ilustrasi Kampung Lio Saat Awal Pembangunan Perumnas Depok Jaya

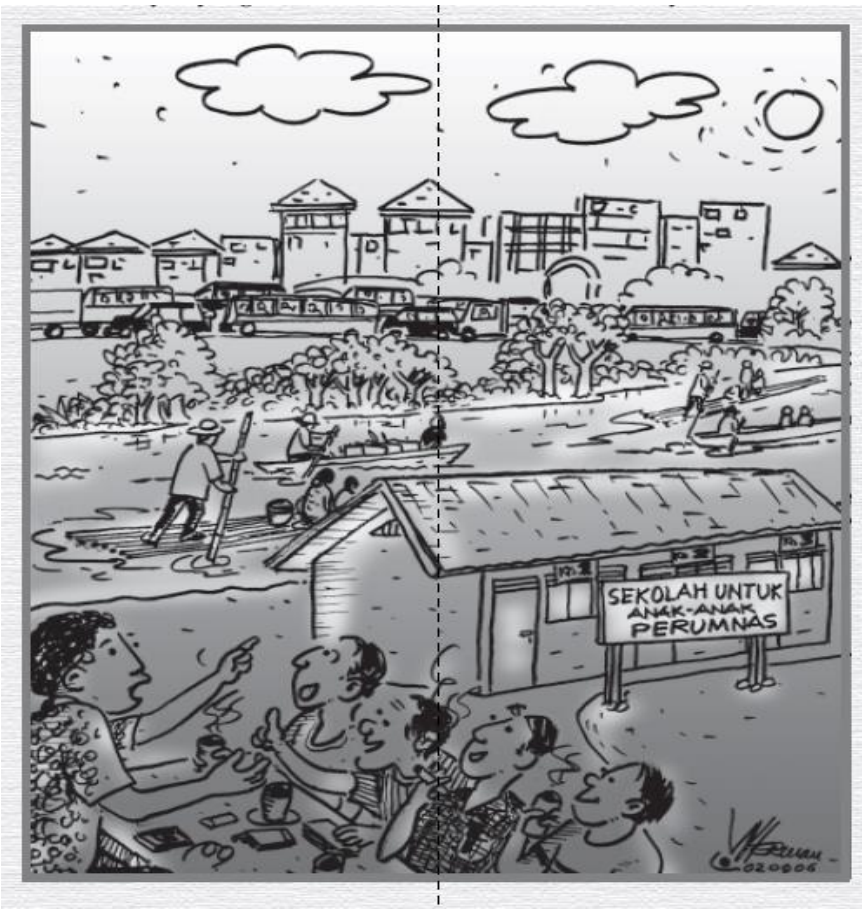

Sumber : Gemari, 2006

“Wilayah yang dahulu penuh “misteri” berubah menjadi serba ‘waaah’. Depok Jaya dibilangan Kecamatan Pancoran Mas dahulu hanyalah situ (telaga) dan dikenal dengan nama Situ Beji yang dipanen rame-rame setahun sekali. Diseputarnya kebun atau kandang ternak milik orang-orang Cina dan Belanda serta sebagian milik penduduk setempat. “Orang-orang keturunan Cina dahulu memang banyak yang mondok di Pondok Cina dan berusaha/dagang di Depok”.[51]

[51] Nurochadi,*Op.Cit*. hlm. 1.

3. Kampung Lio Pada Zaman Sekarang

Dahulu luas situ Rawa Besar sekitar 25 hektar, sekarang tinggal 15 hektar.[52] Salah satu faktor pengurangan luas Situ Rawa Besar adalah akibat pembuangan sampah yang dilakukan oleh warga Perumnas dan Pendatang. Pembuangan tersebut sengaja dilakukan untuk bahan dasar pengurugkan didaerah sempadan Situ Rawa Besar. Dataran tersebut di dimanfaatkan oleh warga Perumnas dengan pembangunan rumah-rumah semi permanen. Pembangunan rumah tersebut berkembang hingga sekarang terdapat lebih dari 150 rumah yang pada tahun 1990-an bergabung menjadi warga Kampung Lio. Sejak saat itulah Kampung Lio bertambah luasnya.

Saat ini kampung Lio berisi lebih dari 150 bangunan yang terdiri dari berbagai macam bentuk dan kebutuhan. Selain berisi permukiman wilayah *DPR* memiliki fasilitas publik seperti mushola, masjid, PAUD dan lapangan. Fasilitas tersebut dibangun oleh warga perumnas yang pada awal pembangunannya ditujukan untuk warga Perumnas. Pengelolaan fasilitas publik tersebut diserahkan oleh warga perumnas kepada warga DPR.

C. Gambaran Umum *Daerah Pinggir Rawa*

Letak Perumnas dan Kampung Lio berdampingan dipisahkan dengan Situ Lio atau yang biasa disebut Situ Rawa Besar. Kampung Lio merupakan permukiman berbentuk mengelompok. Bentuk rumah-rumah yang terdapat di Kampung Lio beragam, pada bagian sisi Situ Rawa Besar didominasi dengan rumah-rumah semipermanen. Pada

---

[52] Pramono, *Situ Lio Depok, Riwayatmu Dulu* (http://www.depoknews.id/situ-lio-depok-riwayatmu-dulu/) diakses pada 10 Maret 2016.

bagian lebih kedalam dari wilayah Situ Rawa Besar, masyoritas permukiman di Kampung Lio sudah berbentuk permanen. Jalan-jalan Kampung Lio sudah berbentuk permanen, namun kondisi sanitasinya tidak sebaik permukiman Perumnas.

Gambar II.2

Peta Lokasi Permukiman *DPR*

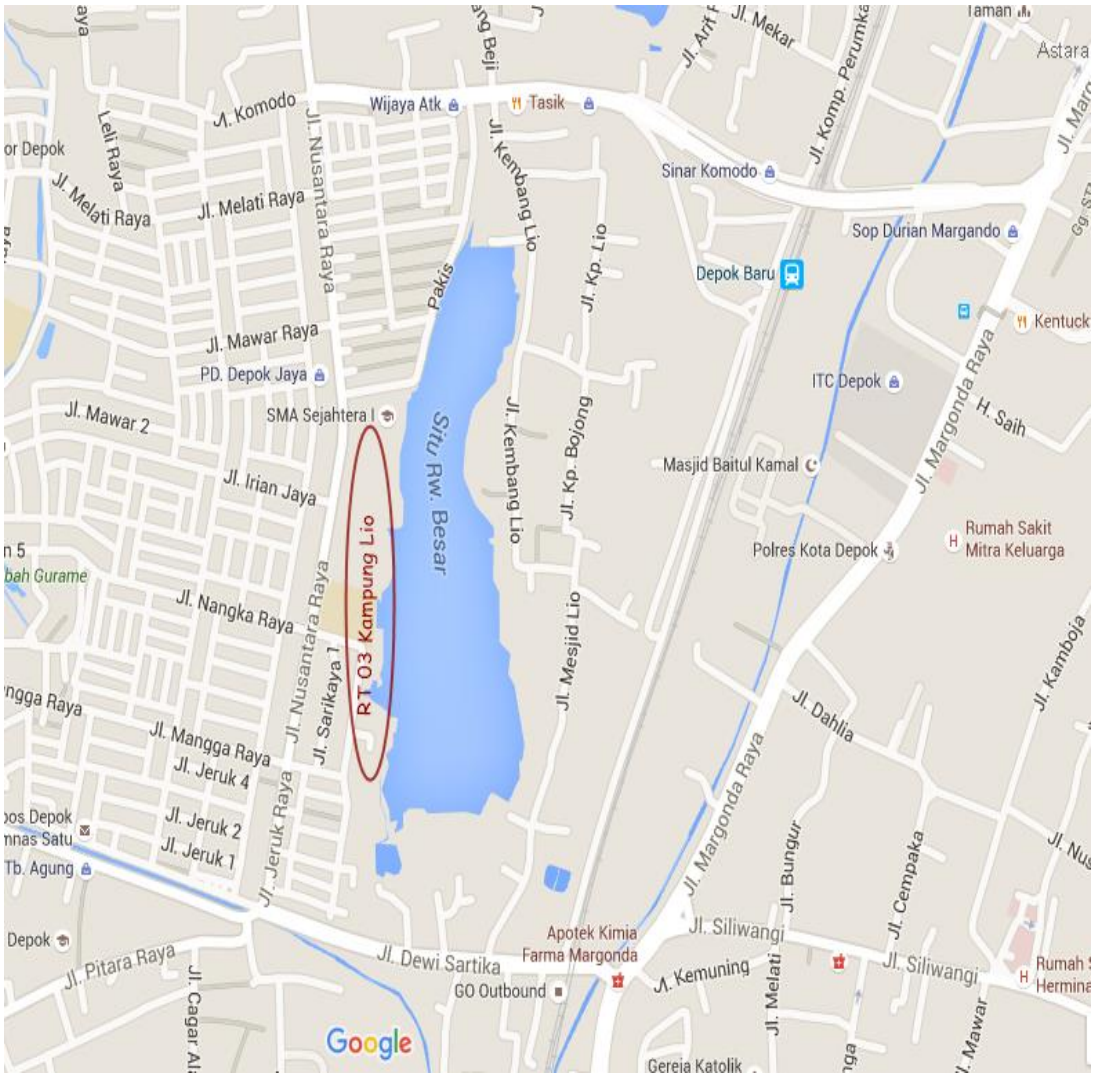

Sumber : Google Maps, 2016

Perumnas merupakan perumahan pertama di Depok yang dibangun dengan jumlah besar memiliki berbagai fasilitas penunjang masyarakat yaitu fasilitas publik seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, kegamaan, perdagangan serta rekreasi. Untuk fasilitas pendidikan di daerah Perumnas terdapat taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta, Universitas Negeri dan Swasta serta terdapat beberapa lembaga-lembaga pelatihan keterampilan seperti bahasa, menjahit, berhitung, teknologi informasi dll. Fasilitas perdagangan terdapat pasar modern dan pasar tradisional. Fasilitas kesehatan terdapatnya rumah sakit, klinik dan puskesmas. Untuk fasilitas keagamaan terdapat gereja dan masjid. Fasilitas rekreasi terdapatnya ruang terbuka hijau yaitu berupa taman kota. Letak antara pasar, tempat rekreasi, serta pendidikan terdapat di lingkungan Perumnas, untuk kelurahan Depok Jaya terutama di sepanjang jalan utama, yaitu Jalan Nusantara Raya.

Permukiman DPR dibatasi oleh beberapa tempat. Pada bagian utara, berbatasan dengan Pasar Lama dan Jl. Dewi Sartika. Pada bagian selatan berbatasan dengan SMA Negeri dan Kampung Lio RT 05 dan RW 04. Pada bagian Timur, berbatasan dengan Situ Rawa Besar. Satu setengah kilometer dari Situ Rawa Besar terdapat kantor Walikota Depok dan Stasiun Depok Baru.

Permukiman DPR berada pada bagian barat tepi Situ Rawa Besar. Permukiman ini berbatasan langsung dengan Perumnas Depok Jaya. Untuk masuk kedalam permukiman ini dapat melalui Jalan Nusantara Raya. Pintu masuk melalui jalan besar milik Perumnas, jalan ini cukup besar karena dapat dilalui oleh dua buah mobil dan

motor. Memasuki jalan ini pada sisi bagian kanan terdapat minimarket dan bimbingan belajar, pada bagian kirinya terdapat SMA Negeri. Masuk kebagian yang lebih dalam terlihat bangunan-bangunan semipermanen pada arah timur yaitu sisi Situ Rawa Besar serta bangunan permanen milik Perumnas pada bagian baratnya, kedua permukiman tersebut dipisahkan oleh jalan sarikaya.

Pada wilayah yang didominasi oleh bangunan semi permanen inilah keberadaan DPR. Selain berisi permukiman rumah tinggal warga DPR, tanah tersebut digunakan untuk tempat parkir angkutan umum, becak, lapak pemulung, bengkel, dan UKM milik warga DPR seperti warung kelontong. Fasilitas publik yang berada di daerah DPR terdapatnya lapangan dan masjid milik Perumnas yang juga digunakan oleh warga DPR dan Perumnas.

Permukiman ini memiliki gambaran permukiman yang kontras dengan permukiman Perumnas yang berjejer rapi. Permukiman Perumnas antara satu blok dengan blok yang lain dipisah oleh jalan besar sedangkan permukiman DPR masing-masing blok tidak beraturan, dibangun sesuai kebutuhan warganya. Jalan perumnas sudah diaspal, sehingga permukiman ini tertata rapi serta memungkinkan kendaraan seperti mobil dan motor untuk masuk dan keluar antar jalan. Berbeda halnya dengan permukiman Kampung Lio terutama pada daerah DPR, pada bagian dalam permukiman DPR sebagian besar masih beralaskan tanah dan bebatuan. Parit DPR dibangun dengan seadanya, bentuknya yang tidak rapi masih berupa tanah dan terdapatnya rumput liar yang pada musim hujan akan berdampak pada becek dan banjir karena ketidakteraturannya.

Permukiman DPR berada di lokasi yang strategis dekat dengan berbagai fasilitas publik. Untuk akses menuju terminal dan stasiun Depok, dapat ditempuh melalui jalan setapak melalui jalan kaki maupun kendaraan. Hal ini dikarenakan terdapatnya jalan setapak kondisi jalan yang sudah permanen memungkinkan untuk dilaluinya pejalan kaki maupun kendaraan roda dua. Untuk pejalan kaki yang menuju ke arah barat maupun ke arah timur terdapat kendaraan tradisional berupa getek yaitu perahu kecil yang dikaitkan dengan seutas besi yang dioperasikan oleh warga Kampung Lio menggunakan tenaga manusia untuk warga yang ingin menyeberang dapat menggunakan transportasi ini dengan tarif Rp 500,- perorang.

Tabel II.3

Potensi Sosial Kecamatan Pancoran Mas

No	Lembaga	Jumlah
	Sekolah	
1.	Pendidikan Anak Sekolah dini (PAUD)	65
2.	KB	37
3.	TPA	-
4.	SPS	16
5.	Sekolah Dasar Negeri	40
6.	Sekolah Dasar Swasta	22
7.	Sekolah Menengah Pertama Negeri	2
8.	Sekolah Menengah Swasta	26
9.	Sekolah Menengah Atas	14
10.	Sekolah Menengah Kejuruan	22
11.	Sekolah Tinggi	4
	Kesehatan	
1.	Rumah Sakit	4
2.	Puskesmas	4

Sumber : Depok Dalam Angka, 2012

Pasar Lama dengan Pasar Depok Jaya pun berbeda, Pasar Lama lebih seperti pasar kaget yang hanya menggunakan meja untuk menaruh barang dagangan serta tiang

penyangga dari bambu atau kayu untuk menyangga atap yang dilapisi terpal, beberapa pedagang hanya menggunakan meja kecil untuk menaruh dagangan tanpa menggunakan atap, bahkan beberapa pedagang menaruh dagangannya didepan toko-toko dengan bangunan permanen, memanfaatkan trotoar dan atap dari toko untuk tempat berlindung dan menaruh barang dagangannya. Lain halnya dengan Pasar Depok Jaya yang sudah berbentuk gedung tiga lantai. Bangunan yang lebih tertata rapih dan bersih dengan fasilitas parkir dan jajaran mesin ATM pada bagian depannya. Pengunjung Pasar Depok Jaya mayoritas warga Perumnas yang berbelanja di pasar tersebut bahkan banyak juga pengunjung dari perumahan elit yang berburu bahan pangan di pasar ini.

Kondisi Kampung Lio yang bersebelahan denga Situ Rawa Besar memanfaatkan Situ tersebut dengan membangun keramba. Padahal air dalam Situ tersebut sudah di atas ambang baku mutu bagi keperluan budi daya perikanan air tawar.[53] Situ Rawa Besar berisi puluhan *Anco* dan Keramba. Selain menggunakan alat budidaya ikan. Warga Kampung Lio maupun dari luar Kampung Lio memancing ikan di Situ Rawa Besar. Saat ini jumlah pemancing tidak sebanyak dahulu karena hasil pengerugkan Situ Rawa Besar yang menyebabkan mengecilnya tempat untuk melemparkan kait pancingan.

Antara Perumnas dan Kampung Lio terdapat jalan setapat kurang lebih 50 meter bersebelahan dengan jalan tersebut terdapat tempat pembuangan sampah liar yang terletak di tepi sudut Situ Rawa Besar. Akibat sampah-sampah yang tidak beraturan

---

[53] *Kualitas Air Situ Rawa Besar di Atas Ambang Baku Mutu* (Digilib-ampl.net/detail/detail.php?row=3&tp=kliping&ktg=drainase&kode=451).

tersebut beberapa sampah masuk kedalam pinggiran Situ Rawa Besar. Masuknya sampah ke dalam Situ Rawa Besar mempengaruhi kondiris air yang saat ini sudah sangat keruh.

Permukiman DPR dikelola oleh warga Perumnas dan pendatang. Bentuk permukiman tergantung dari kebijakan para pengelola tersebut. Bentuk rumah yang digunakan untuk dikontrakkan dengan yang diperjualbelikan memiliki perbedaan, seperti pada rumah yang dikontrakkan bentuknya lebih teratur, berbentuk memanjang, rumah yang satu dengan rumah yang lainnya saling menyatu, luas masing-masing per rumah memiliki luas yang sama. Untuk tanah yang diperjualbelikan bentuk rumahnya lebih tidak teratur karena kebijakan untuk menentukan arah, tinggi dan bentuk rumah di berikan sepenuhnya kepada pemilik rumah.

Tanah garapan Nanang dan Amar yang pembangunannya diperuntukkan untuk rumah kontrak memiliki bentuk yang teratur. Rumah-rumah kecil semi permanen yang berdempetan dibagi kedalam dua bagian yang saling berhadap-hadapan. Diantara rumah tersebut terdapat jalan setapak yang terdiri dari tanah dan semen. Dalam rumah lantai kontrakan tersebut diratakan dengan semen. Sebuah ruangan yang berfungsi sebagai kamar tidur ruang keluarga dan dapur.

Untuk rumah yang dibangun sendiri menyebabkan rumah-rumah berbentuk tidak merata. Rumah dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing keluarga, seperti Informan Tia yang membentuk rumah dibagi kedalam dua bagian karena memiliki dua buah keluarga, MCK terletak pada bagian depan rumah bersebelahan dengan ruang tamu sekaligus dapur rumah, hal ini dikarenakan MCK tersebut diperuntukkan untuk dipergunakan bersama-sama semua warga terutama warga yang masuk kedalam wilayah tanah Opik. Bentuk

rumah Anis lebih tertutup karena hanya ditinggali oleh satu keluarga inti, dengan jendelanya yang besar yang dipergunakan untuk berjualan makanan kecil dan kebutuhan sehari-hari seperti sabun, kopi, gula dan lain-lain.

Tanah garapan milik Opik terdiri dari delapan bangunan dan dua lapak. Delapan bangunan tersebut terdiri dari rumah, warung serta kontrakan, dua lapak (gudang tempat mengumpulkan barang-barang bekas yang akan dijual kembali seperti kardus bekas, botol air mineral, koran serta besi). Oleh karena itu, jalan utama permukiman ini tergolong lebih luas dibanding dengan wilayah pemilik lainnya yang dikhususkan untuk dikontrakan. Terdapatnya aspal pada jalan ini diperuntukan untuk memudahkan akses keluar masuk mobil yang mengangkut barang-barang untuk lapak seperti bekas kemasan air mineral dan kardus yang dikumpulkan oleh pemulung. Selain mobil *pick up* punya lapak, terdapat juga mobil-mobil angkutan umum milik penghuni *DPR* yang diparkirkan di sekitar lapak dengan dikenakan uang sewa tempat sebesar Rp. 10.000,- per-bulan.

Berbeda halnya dengan tanah garapan milik Robi. Tanah tersebut disewakan kepada tiga orang. Tanah Robi merupakan yang paling besar diantara para penggarap yaitu sebesar 1000 meter. Tanah garapan milik Robi diperuntukkan untuk pengguna Lapak. Untuk masalah pengelolaan Robi berikan kepada para pelapak. Penyewa tanah Robi tersebut selain berisi satu buah lahan untuk mengumpulkan hasil lapak. Ia juga membangun sejumlah rumah untuk para pegawainya.

D. Profil Informan

1. Nanang Penggarap Awal Daerah Pinggir Rawa dan Penggarap dari Warga DPR

Nanang merupakan imigran yang datang dari daerah Cikarang kecamatan Sukatani, Bekasi. Ia memiliki enam orang anggota keluarga yaitu satu istri dan lima orang anak. Saat ini ia berprofesi sebagai pensiunan, sebelumnya ia merupakan buruh borongan Perumnas dan penarik becak. Pada saat pembangunan Perumnas tahun 1975-1976, pada tahun tersebutlah Ia pindah ke Kota Depok atas ajakan teman. Selama bekerja di Perumnas Tatang berprofesi sebagai staff bagian administrasi dibawah mandor. Pendapatan selama bekerja di Perumnas menurut Ia mendapatkan pendapatan yang lebih baik daripada dikampung halamannya.

Dalam pembangunan dataran, salah satu warga pendatang yang berasal dari daerah cikarang yaitu Nanang. Pembangunan dataran dan rumah didasari oleh berbagai macam tujuan. Untuk warga Pendatang seperti Nanang, mengutarakan bahwa alasan mereka membangun dan menetap di DPR adalah karena alasan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Depok lebih menjanjikan daripada di daerah asalnya. Sebelum pindah ke Kota Depok Nanang berprofesi sebagai petani. Penghasilan sebagai Petani didaerah asalanya yang tidak menentu membuat Nanang memutuskan untuk pindah ke Kota Depok menjadi salah satu buruh dalam proses pembangunan Perumnas.

Setelah berhenti sebagai buruh Pembangunan Perumnas Nanang beralih profesi sebagai tukang dan penyewa becak.Dalam pembangunannya Nanang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menjadikan Situ Rawa Besat menjadi padat seperti sekarang.

Pembangunan dataran tidak dilakukan sendiri, sebagai pengusaha becak didaerah tersebut, Ia dibantu oleh pegawai becaknya dengan balasan imbalan sejumlah uang dan penyediaan rumah kontrak untuk para pegawainya.

Setelah pekerjaan pembangunan Perumnas selesai, berbekal uang dari pekerjaannya ia membeli 50 buah becak sebagai modal melanjutkan pekerjaan di Kota Depok. Pada saat itu kebutuhan akan becak sedang tinggi-tingginya selain karena belum terdapatnya trasportasi yang memadai pada saat tersebut, pekerjaan sebagai penarik becakpun memiliki penghasilan yang cukup menjanjikan. Tingginya permintaan akan becak membuat salah seorang warga Perumnas ikut berinvestasi becak melalui Nanang. Becak yang sebelumnya hanya berjumlah 50 buah bertambah menjadi 100 buah. Semua becak tersebut ditarik oleh warga pendatang dari luar Depok. Salah satu pegawai Nanang yaitu pendatang yang ikut menarik becak yaitu Asmi. Asmi yang sebelumnya merupakan guru pada saat datang ke Kota Depok Ia berprofesi sebagai penarik becak. Seperti yang diungkapkan oleh Asmi:

> "Awal dateng disini ngebecak lama malah jadi humor. Kenapa pak guru dari kampung kenapa mau jadi tukang becak. Karena tukang becak turunan senang, bukan turunan orang melarat. Kalau ditempat turunan ga genjot..... Anak mantu ponakan di Pasar Baru tukang becak. Sekarang lingkungan, gemeter saya juga. Gemeter kenapa ni, saya karena kehendak Allah mungkin juga tidak sombong akan menjadi orang yang boleh dikata sukses".[54]

Penghasilan dari menyewakan becak Nanang kelola dengan membuat rumah dan kontrakan yang saat ini Ia tempati. Pemasukan dari segi ekonomi yang lebih stabil dari pekerjaannya di Desa membuat Nanang membangun rumah di daerah sempadan Situ

[54] Wawancara Asmi April 2016.

Rawa Besa. Pembangunan rumah yang dibantu oleh anak buahnya hingga saat ini telah berjumlah 12 buah. Faktor ekonomi jugalah yang mendasari Nanang untuk mengajak keluarganya tinggal di DPR.

> "Narik sampe 4 bulan terus istri jemput kesini ngajakin pulang, kata bapak enggak, bapak udah betah disini. Kalau tinggal disini bisa kejamin daripada di desa, kalau di kampung 3 bulan kelamaan nunggu panen itu juga kalau memang kalau disini kan kalau kita rajin udah pasti ketemu. Jadi istilah kata ngedidik anak 5 yang 4 nya udah jadi, udah selesai kalau disana ga cukup lahan tanah 2 hektar ga cukup buat 4 orang dan biaya anak hingga SMA".[55]

Saat ini karena banyaknya jenis transportasi dan kurangnya peminat sebagai penarik becak membuat pemasukkan sebagai pengelola becak tidak sebanyak dahulu. Hal tersebut yang membuat Ia mengembalikan becak kepada warga Perumnas yang sebelumnya telah berinvestasi. Beberapa becakpun sudah ia jual kepada para pendatang. Saat ini pemasukan yang Ia peroleh bertumpu pada 11 kontrakan dan pekerjaan anak. Untuk mengisi kesibukan Ia memelihara ayam yang juga dijual serta bertugas sebagai pengawas ketika terjadi pemilihan kepala desa di kampung halamannya.

2. Amar Pemilik Garapan dari Warga Perumnas

Amar merupakan pendatang dari Garut saat ini Ia berprofesi sebagai pensiunan. Sebelum pensiun Amar berprofesi sebagai guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) di daerah Jakarta. Setelah menjadi guru Amar berprofesi sebagai pengawas sekolah. Amar juga merupakan salah satu ketua RT 06 Perumnas sebelum Robi. Perpindahan Amar ke RT 06 Perumnas didasari oleh pernikahannya dengan salah satu warga Perumnas. Atas permintaan mertua Amar pindah ke Perumnas. Rumah dan tanah garapan yang saat ini ia miliki merupakan milik mertuanya yang diberikan kepada Amar.

---

[55] Wawancara Nanang Februari 2016.

3. Robi Ketua RT 06 Perumnas dan Pemilik Garapan DPR

Robi merupakan pendatang dari Jakarta Kota yang datang pada tahun 1980. Rumah yang saat ini ia tempati merupakan rumah orang tuanya yang berprofesi sebagai PNS. Saat ini Ia menjabat sebagai ketua RT 06 Perumnas, jabatan tersebut ia pegang sejak tahun 2014. Selain sebagai ketua RT 06 Perumnas Robi berprofesi sebagai Advokat. Alasan robi untuk tinggal di RT 06 Perumnas karena ikut dengan orang tua. Ketika Robi menikah rumah ini berpindah tangan kepadanya. Saat ini robi telah memiliki 4 orang anak.

4. Tia Pembeli dan Penghuni Garapan DPR

Salah satu keluarga yang bermukim di DPR adalah keluarga Tia. Ia dan keluarga merupakan pendatang yang berasal dari Cianjur. Ia menetap di kota Depok atas ajakan orang tua yang pindah pada tahun 1980-an dengan alasan pekerjaan. Pada awal kepindahannya ke Kota Depok Ia dan keluarga tinggal di kecamatan Beji Depok. Orang tua Tia pada saat itu bekerja di sektor informal bidang pelayanan yaitu sebagai penjaga toilet umum di Pasar Depok Jaya kecamatan Pancoran Mas Depok. Pada tahun berikutnya orang tua Tia beralih dari penjaga toilet menjadi pegawai di sebuah toko isi ulang air mineral yang dikelola oleh salah satu warga Perumnas yang dikenal dengan nama Opik.

Tia memiliki 15 anggota keluarga yaitu suami, anak, kedua orang tua, dua orang kakak,dua orang adik dan tiga orang keponakan. Kakak pertamanya berprofesi sebagai supir, kakak perempuannya berprofesi sebagai Ibu rumah tangga. Adiknya yang pertama berprofesi sebagai supir angkot jurusan Stasiun Depok Baru, sedangkan adiknya yang

terakhir bersekolah di SMK. Dari semua anggota keluarga, Tia tinggal dirumah tersebut dengan 11 anggota keluarga.

Gambar II.3

Rumah Keluarga Tia

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015

Selain tinggal di DPR, Tia memiliki rumah di kampung halamannya yang saat ini di tinggali oleh suami. Suami Tia lebih memilih tinggal di kampung halaman sebagai buruh. Oleh sebab itu Tia memiliki status tinggal ganda yaitu memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di kedua tempat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Ia memenuhinya sendiri tanpa bantuan suami. Tia tinggal di DPR bersama kedua anaknya. Alasan Tia tinggal di DPR daripada di kampung halamannya adalah karena pekerjaan suami yang belum memadai serta peluan pekerjaan yang lebih banyak. Tia sudah tidak memiliki sawah, semua sawah yang Ia miliki telah ia jual.

Tia tinggal di DPR sejak tahun 1994-an. Usianya hingga saat ini berusia 29 tahun. Saat ini Ia berprofesi sebagai asisten rumah tangga paruh waktu, sebelumnya ia pernah bekerja sebagai penata rambut di sebuah salon daerah Perumnas. Setelah diperkenalkan dengan pekerjaan yang satu, Tia dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan berikutnya baik melalui relasi yang telah terjalin dengan pemilik sebelumnya ataupun dari sesama temannya.

Tinggalnya keluarga Tia di DPR karena hubungan relasi antara pekerja dengan pemilik yaitu Opik. Selain bekerja sebagai supir orang tua Tia membantu proses penggarapan Opik. Atas jasa orang tua tia yang telah lama bekerja dengan Opik. Keluarga Tia yang sebelumnya hanya mengontrak di lokasi tersebut kini memiliki sebidang tanah garapan yang dibeli dari Opik. Tanah tersebut diperoleh dengan harga murah.

Bentuk rumah Tia hampir serupa dengan rumah lain di DPR. Rumah semi permanen dengan luas ± 80 M sebagian menggunakan batu bata sebagai bahan dindingnya, sebagian lagi menggunakan triplek serta kayu dan bambu sebagai dindingnya. Pada bagian depan rumah Tia terdapat MCK umum, pembuatan MCK tersebut digagas oleh orang tua Tia. MCK tersebut terbagi kedalam dua bagian, yang pertama untuk tempat mandi dan kakus yang kedua tempat pompa air serta tempat menampung air sekaligus tempat keluarga Tia mencuci baju, piring dan lain-lain.

Rumah tersebut dibuat dua belah sisi yang di batasi oleh sekat berupa tembok. Sisi pertama ditinggali oleh tujuh orang keluarga sedangkan dalam sisi yang satunya diisi dengan empat orang keluarga. Ruangan terdiri dari tiga ruangan yang berfungsi sebagai

tempat tidur dan tempat berkumpul keluarga. Untuk dapur terletak pada sisi luar rumah Tia dalam keadaan terbuka.

Gambar II.4

Anco milik keluarga Tia

Sumber : Dokumentasi Pribadi. 2015

Pada bagian timur rumah Tia terdapat Situ Rawa Besar. Rawa Besar ini dimanfaatkan oleh warga DPR untuk menangkap ikan, serta rekreasi. Dalam Situ Rawa Besar terdapat keramba ikan dan *Anco* (Alat penangkap ikan) untuk menangkap ikan milik warga Kampung Lio. Terdapat banyak keramba ikan, mayoritas milik warga yang tinggal di tepi Situ Rawa Besar. Keluarga Tia pun ikut memanfaatkan Situ Rawa Besar dengan mebuat alat penangkap ikan yang disebut dengan Anco.

Selain bekerja sebagai di sektor informal, keluarga Tia memanfaatkan rawa yang terdapat di belakang rumahnya untuk mengambil ikan dengan menggunakan alat yang

bernama *Anco*. Dari gambar tersebut terlihat salah satu anggota keluarga Tia yang sedang mengambil hasil tangkapan ikan. *Anco* milik keluarga dikelola oleh kakak iparnya yang berprofesi sebagai supir ojek *online*. Hasil tangkapan tersebut dikonsumsi sendiri, jika tangkapannya besar seperti pernah menangkap sebanyak 30 Kg, kelebihan tersebut dijual kembali. Selain menangkap ikan keluarga Tia juga memelihara beberapa ekor ayam.

E. Penutup

Permukiman permanen di Kota Depok sudah terbentuk sejak zaman Belanda. Anggota VOC Chastelein membebaskan para pekerja budaknya dan diberikan bagian tanah dan alat-alat pertanian untuk membajak tanah sebagus rumahnya Keberadaan Kampung Lio yang sudah hadir sejak zaman tersebut ikut membantu dalam pembangunan rumah orang-orang Belanda. Menurut salah seorang warga Depok Jaya, sebelum tahun 1990-an, di tepi Situ banyak orang yang membuat genteng.

Transformasi sosial ekonomi Depok pada zaman modern dimulai dengan kehadiran perumahan “Perumnas” pada tahun 1976. Disamping perumahan “Perumnas”, relokasi Universitas Indonesia ke Depok pada 5 September 1987 merupakan titik penting lainnya dalam transformasi sosial ekonomi Depok. Kedua hal tersebut berdampak pada dua pembangunan, pertama populasi dan peningkatan infrastruktur kota. Kedua, corak dari perumahan dalam Depok saat ini. Ketiga, struktur sosio ekonomi Depok, dan keempat otonomi dan perubahan status administratif.

Pada Bab selanjutnya akan dibahas mengenai ruang sebagai mode produksi di lingkungan daerah pinggir rawa Berbagai bentuk-bentuk produksi ruang serta bentuk relasi dan tindakan sosial yang terbentuk di lingkungan Daerah Pinggir Rawa.

BAB III

RUANG SEBAGAI MODE PRODUKSI DI LINGKUNGAN DAERAH PINGGIR RAWA

A. Pengantar

Pada Bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa warga DPR merupakan warga pendatang dari luar Kota Depok. Masyarakat datang ke Kota Depok berdasarkan motif ekonomi. Perkembangan ekonomi yang lambat di Kampung halamannya menyebabkan warga tersebut pindah ke Kota Depok yang pada saat itu sedang dalam masa pembangunan. Kondisi perekonomian yang belum stabil menyebabkan masyarakat memilih untuk tinggal di derah yang strategis dekat dengan tempat kerja serta lebih ekonomis dengan harga sewa yang terjangkau. Berdasarkan alasan tersebut, warga pendatang menempati salah satu lokasi yang cukup strategis yaitu di DPR.

Status kepemilikan tanah di DPR saat ini merupakan milik pemerintah. Para pendatang yang memiliki kelebihan ekonomi membangun ‘ruang’ di pinggir daerah sempadan Situ Rawa Besar. Ruang tersebut merupakan bagian dari Situ Rawa Besar yang kemudian dijadikan sebuah dataran. Oleh karena itu, penggarap dan pembeli yang tinggal di daerah tersebut melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan melihat peluang ekonomi dari hasil pemadatan ruang Situ Rawa Besar menjadi dataran.

Bab ini akan mendeskripsikan proses produksi ruang di Situ Rawa Besar beserta bentuk-bentuknya yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok warga. Pengalihfungsian ruang oleh sekelompok orang secara ilegal menimbulkan berbagai permasalahan sosial terutama berdampak terhadap kehidupan warga DPR. Berbagai dampak negatif bermunculan dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh warga yang tinggal di daerah tersebut. Begitupun dengan pemerintah Kota Depok, hal tersebut menjadi permasalahan perkotaan yang saat ini belum dapat diselesaikan.

Bab ini ditulis dengan membagi kedalam tiga subbab. *Pertama,* ruang sebagai produk di Daerah Pinggir Rawa, subbab ini mendeskripsikan jenis dan hasil dari pengalihfungsian ruang dan pemanfaatannya. *Kedua,* ruang sebagai penentu relasi dan tindakan Sosial perumnas dengan komunitas DPR. Subbab ini mendeskripsikan bentuk-bentuk relasi yang terjadi antara warga Perumnas dengan DPR. *Ketiga,* dominasi didalam ruang. Subbab ini mendeskripsikan bentuk dari penguasaan suatu ruang oleh seorang atau sekelompok warga.

Bagan III.1

Proses Produksi Ruang di DPR

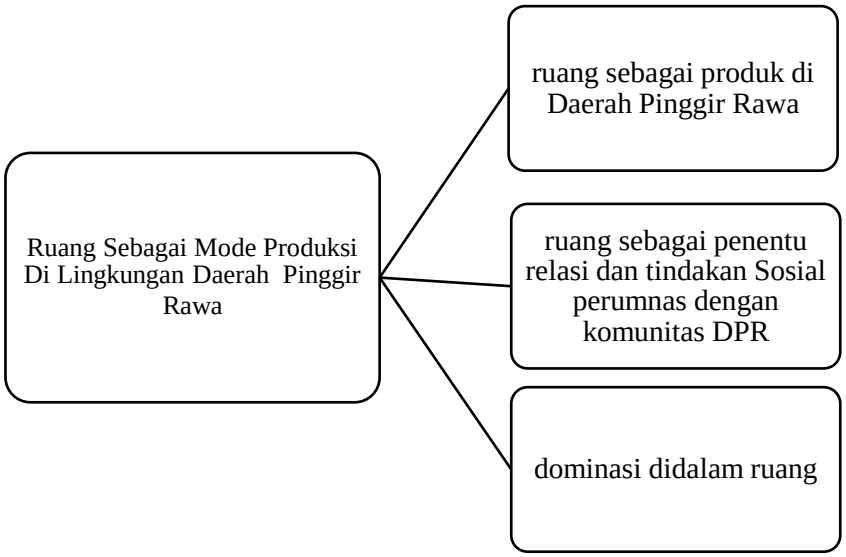

Sumber : Diolah oleh penulis, 2017.

B. Ruang Sebagai Produk di Daerah Pinggir Rawa

Permukiman DPR berdiri secara resmi sejak tahun 1990-an, yaitu sejak berkembangnya permukiman dan Pasar Lama sebagai pusat ekonomi. Kampung Lio bersebelahan langsung dengan Situ Rawa Besar. Menurut Sejarah, sebelum terjadinya pemadatan dan pelebaran dataran yang dilakukan warga Perumnas dan pendatang, Situ Rawa Besar memiliki luas ± 35 hektar.[56] Luas tersebut terdiri dari aliran Situ Rawa Besar yang mengalir hingga ke Situ Beji.

[56] *Situ Rawa Besar Depok Tak Terurus* (M.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/01/10/nhy8zx-situ-rawa-besar-di-depok-tak-terurus), diakses pada 09 Oktober 2015.

> "Yang saya tahu emang disamping itu dari jaman Belanda. Emang buat resapan, itu tembusnya kesana lho sampe Agung Shop Beji. Ini situ Rawa Besar disini Situ Beji tapi lewat rawa ini jalurnya itu yang deket Apotik Sehati."[57]

Pada tahun 1976 Perumnas hadir sebagai perumahan pertama di Kota Depok. Pembangunan Perumnas disahkan oleh Presiden Soeharto. Setelah pembangunan Perumnas, disusul pembangunan infrastruktur, transportasi publik dan kampus Universitas Indonesia yang menjadi beberapa faktor penarik warga dari luar Kota Depok untuk datang ke Kota Depok.

Warga yang datang ke Kota Depok terdapat warga yang datang secara resmi maupun tidak resmi. Warga yang datang secara resmi menempati rumah-rumah Perumnas sedangkan warga yang datang secara tidak resmi menempati lokasi-lokasi yang belum dikelola oleh pemerintah. Tertutupnya kepemilikan Perumnas dikarenakan pembangunanya permukiman Perumnas ditujukan untuk warga yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk warga yang tidak berstatus di perusahaan negara tidak dapat memiliki rumah pada saat tersebut. Salah satu warga yang sudah hadir sejak pembangunan Perumnas adalah Masni yang saat ini menjabat sebagai ketua DPR. Ia merupakan warga pendatang yang berprofesi sebagai guru dan pedagang yang hadir sejak pembangunan Perumnas. Walaupun kondisi ekonominya pada saat tersebut mencukupi untuk membeli rumah Perumnas ia memilih tinggal di Kampung Lio karena tidak memenuhi persyaratan.

---

[57] Wawancara Robi April 2016.

Tabel III.1

Matriks Perubahan Sosial DPR

No	Pembentukkan DPR	Tahun 1975-1990	1990-Sekarang
1.	Pemilik	• Warga Perumnas	• Warga Perumnas dan Pendatang.
2.	Situ Rawa Besar	• Situ Rawa Besar seluas ± 35 Hektar	• Luas Situ ± 13 Hektar
3.	Situasi Lingkungan DPR	• Empang	• Berbentuk tanah dataran
4.	Pembentukan Dataran	• Tumpukan Sampah rumah tangga, Industri dan Pasar.	• Dataran berupa tanah hasil pemadatan warga
5.	Penggunaan	• Situ Rawa Besar	• Tempat pemancingan umum. • Kebun berupa buah dan sayur
6.	Status Kependudukan	• Tidak terdapat bukti tertulis	• Memiliki bukti resmi seperti KTP dan KK
7.	Jumlah Rumah	• ± 30 Rumah	• ≥ 150 Rumah

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2016

Setelah pembangunan Perumnas pemanfaatan Situ Rawa Besar bagian barat pun dimulai. Ruang tersebut pertama kali dimanfaatkan oleh pendatang yang bekerja di Perumnas. Setelah digarap oleh pendatang, pemanfaatan ruang Situ Rawa Besar disusul oleh warga Perumnas yang bermukim di Jalan Nangka dan Jalan Sawo. Selesainya keseluruhan Pembangunan Perumnas menambah aktor baru yang memanfaatkan ruang di Situ Rawa Besar bagian barat, yaitu warga Perumnas yang bermukim di Jalan Sarikaya disusul oleh warga Kampung Lio serta warga pedatang lainnya.

Situ Rawa Besar yang berlokasi di bagian barat dimanfaatkan oleh warga Perumnas, pendatang dan Kampung Lio. Oleh warga Perumnas Jalan Nangka dan Jalan Sawo ruang Situ Rawa Besar dimanfaatkan dengan membuat empang-empang yaitu

sebuah kolam besar yang berisi ikan-ikan air tawar. Pembuatan empang tersebut dilakukan sebelum RT 06 Perumnas Jalan Sarikaya hadir. Hasil dari empang-empang tersebut dimanfaatkan pengelola untuk konsumsi pribadi.

> "Pas saya liat ada orang garap ini saya ikutan. Yang pertama orang-orang sana orang-orang sawo. Ini kan bangunan terakhir perumnas. Sawo udah yang lebih dulu baru ini. Jadi mereka yang pertama garap.....Orang jalan nangka malah pernah. Semuanya sudah dipegang orang sini semua".[58]

Setelah hadirnya warga Jalan Sarikaya yaitu RT 06 Perumnas, pengelolaan ruang dari empang-empang tersebut pun diambil alih. Salah satu faktor kenyamanan pun menjadi pertimbangan. Pertimbangan 'risih' jika warga lokasi lain keluar dan masuk ke daerah lingkungannya serta berbagai bahaya yang ditimbulkan dari alam yang tidak dikelola dengan baik menjadi beberapa pertimbangan warga Perumnas Jalan Sarikaya.

> "Saya liat aja. ..Pas saya liat ada orang garap ini saya ikutan. Yang pertama orang-orang sana orang-orang sawo. Ini kan bangunan terakhir Perumnas. Sawo udah yang lebih dulu baru ini jadi mereka yang pertama garap. Terus saya pikir orang jauh ko yang garap yaudah kita pikir mending kita aja yang megang. Soalnya ada orang lain masuk lingkungan kita kan risih. Orang jalan nangka malah pernah juga.. Semuanya sudah dipegang orang sini semua. .... Lebih baik begitu daripada penghuni lain yang garap. Ada penghuni liar-liar kan waduh. Itu lebih susah ngontrolnya. Jadi kalau inikan koordinatornya gampang. Kemarin ada dari kepolisian yang ditanya ya yang pemilik lahan aja yang bertanggung jawab. "[59]

Sebuah upaya pemanfaatan ruang Situ Rawa Besar yang sebelumnya rawa menjadi sebuat dataran pun dilakukan. Pembuatan dataran dilakukan oleh warga RT 06 Perumnas serta warga pendatang. Proses pemadatan yang dilakukan oleh pendatang dimulai pada tahun 1978-an yaitu pemanfaatan ruang yang pertama kali digagas oleh Nanang yang juga menjadi cikal bakal munculnya permukiman di DPR. Sedangkan untuk warga RT 06 Perumnas memulainya pada tahun 1980.

---

[58] Wawancara Robi April 2016.
[59] Wawancara Robi April 2016.

Bagan III.2

Perubahan Sosial DPR

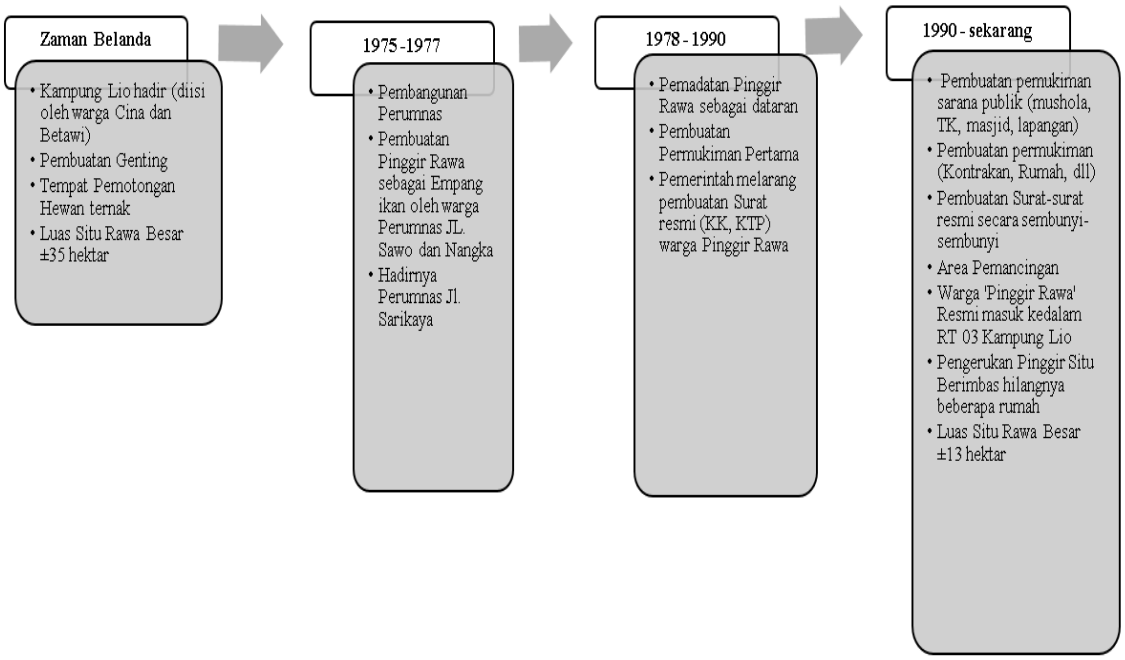

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2016

Pembuatan dataran dilakukan dengan cara penumpukan sampah yang dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok dan terstruktur (menggunakan jasa pengangkut sampah). Sampah tersebut terdiri dari sampah rumah tangga, sampah industri dan sampah pasar. Seiring berjalannya waktu, hasil dari penumpukan sampah tersebut membuat endapan Situ Rawa Besar bertambah menjadi dataran yang padat.

Terbatasnya modal warga pendatang menyebabkan pembangunan memakan waktu yang lebih lama daripada warga Perumnas. Pembangunan rumah yang dilakukan pendatang, seperti Nanang memakan waktu hingga bertahun-tahun. Setelah dataran garapan Nanang pun selesai dikerjakan. Ia membangun rumah tinggal. Pada saat satu

rumah telah selesai dibangun yang diperuntukan untuknya ia membangun kembali beberapa rumah untuk kontrakan.

> "Yang pertama bapak disini yang lain ga ada. Pertama kali bapak dipinggir rawa ini. Bapak yang nampung anggota penarik becak, jadi semua yang dateng tinggal disini....".[60]

Pemanfaatan ruang selanjutnya dilakukan oleh warga RT 06 Perumnas. Situ Rawa Besar yang sebelumnya merupakan perkembangbiakan ikan dimanfaatkan oleh warga RT 06 Perumnas menjadi tempat bercocok tanam. Tumbuhan yang ditanam terdiri dari tanaman pisang, jambu, singkong, kangkung dan sebagainya. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Robi:

> "Jadi waktu itu ya kita juga saya juga sempet buah pepaya, jambu".[61]

Pernyataan tersebut sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Masni Ketua RT 03 Kampung Lio:

> "Awalnya ditanemin pisang. Eh ditanemin pisang lama-lama dibikin kontrakan...".[62]

Setelah pengelolaan tempat bercocok tanam, warga RT 06 Perumnas menggantinya dengan membangun berupa fasilitas publik seperti mushola, masjid, PAUD dan lapangan. Pembangunan tersebut terjadi pada tahun 1990-an yang digagas oleh Yono, Wadin, Opik, Amar dan Robi. Pembangunan fasilitas tersebut terutama diperuntukkan untuk warga RT 06 Perumnas, namun tidak menutup kemungkinan warga lain yang mau memanfaatkan fasilitas tersebut. Pembangunan fasilitas tersebut dilakukan secara gotong royong oleh warga RT 06 Perumnas.

---

[60] Wawancara Nanang Februari 2016.
[61] Wawancara Robi April 2016.
[62] Wawancara Masni Maret 2016.

Tabel III.2

Penggunaan Lahan Berdasarkan Kepemilikan Tanah

No	Nama	Jumlah Bangunan
1.	Nanang	• 12 Rumah Kontrak • 1 Rumah Pribadi • 1 Parkiran
2.	Amar	• 26 Rumah • 1 Parkiran Pribadi
3.	Opik	• 8 Rumah • 2 Lapak • 1 Parkiran Warga
4.	Robi	• 3 Lapak
5.	Yono	• 30 Rumah Kontrak

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2016

Melihat perkembangan Kota Depok yang cukup pesat, warga RT 06 Perumnas memutuskan untuk membuat fasilitas bagi para pendatang. Fasilitas tersebut seperti rumah kontrakan, tempat parkir, dan tempat usaha. Kekuatan modal yang cukup besar, membuat para penggarap yang berasal dari warga Perumnas membangun permukiman tersebut kurang dari setahun.

Dalam pemanfaatannya antara satu penggarap dan penggarap lain memiliki kebijakannya sendiri. Pada awalnya Amar mempunyai tiga buah rumah kontrak. Sedangkan untuk Robi menyewakan tanah untuk lapak, untuk kebebasan pembangunan diberikan Robi kepada penyewa. Penyewa tersebut pun selanjutnya membangun rumah untuk para pekerja lapaknya. Untuk Opik menyewakan beberapa bidang tanah, membangun rumah kontrak, serta sebuah tempat usaha berupa warung kelontong.

Permintaan akan tempat tinggal di Kelurahan Depok Jaya semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah bangunan di DPR. Saat ini Nanang telah mempunyai 12 rumah dan satu buah MCK. Satu rumah ia tempati bersama keluarganya,

sisanya Ia kontrakan baik kepada pegawainya maupun pendatang lainnya. Untuk Amar saat ini telah mempunyai 26 rumah kontrak sedangkan Yono telah memiliki 30 Rumah kontrak.

Bentuk bangunan rumah kontrak yaitu rumah semi permanen. Hal tersebut dilakukan oleh warga RT 06 Perumnas karena menyadari bahwa tanah tersebut milik pemerintah yang suatu saat akan digusur. Suatu bentuk antisipasi akan kerugian yang lebih banyak nantinya. Selain itu, murahnya harga sewa memungkinkan warga kelas menengah kebawah untuk menyewa rumah kontrak tersebut.

Gambar III.1

Permukiman Garapan Nanang

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016

Berdasarkan gambar III.1 terlihat deretan becak milik Nanang yang juga menandakan Ia sebagai pengelola becak. Ia memiliki sejumlah halaman yang cukup luas yang dipagari dengan bambu. Halaman tersebut digunakan untuk memarkirkan becak dan menanam tanaman seperti pisang. Disebelah permukiman Nanang terdapat lapangan serba guna, lapangan tersebut dibangun oleh warga Perumnas yang digunakan oleh warga

DPR dan warga RT 06 Perumnas. Lapangan ini dibatasi oleh pagar kecil berupa besi sebagai batas antara lapangan dan DPR.

Lain halnya dangan bentuk garapan Robi dan Opik. Untuk Permukiman Opik terlihat tidak teratur dari pada pemilik lain yang dikhususkan untuk rumah kontrak. Pembangunan wilayah Opik lebih kepada ‘menjual ruang’ yaitu ruang sebagai komoditi yang menghasilkan dari segi ekonomi dengan cara pemindahan kepemilikan penggunaan ruang. Pembangunan rumah tergantung kebutuhan masing-masing pemilik wilayah.

Gambar III.2

Lapak penyewa di tanah garapan Opik

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015

Berdasarkan gambar III.3 terlihat timbunan sampah warga DPR yang tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah dilakukan secara individu seperti timbun di tanah ataupun dibakar. Dari gambar tersebut juga terlihat beberapa gerobak untuk

mengangkut barang bekas yang digunakan oleh para pegawai Lapak. Bangunan semi permanen tempat mengumpulkan barang serta rumah kontrak para pekerja lapakpun terlihat.

Selain pembangunan rumah, warga lain yang telah memiliki ijin membangun tempat lapak di wilayah Opik atau yang disebut tempat ‘rongsok’ oleh warga setempat. Warga yang memiliki lapak memiliki pekerjanya sendiri yang kemudian membuat pemilik lapak juga membangun rumah kontrak untuk pekerjanya. Lapak atau tempat ‘rongsokan’ tersebut akan terlihat ketika memasuki permukiman garapan Opik karena besarnya tempat tersebut. Selain sebagai permukiman dan lapak, tanah milik Opik juga digunakan sebagai tempat parkir kendaraan roda empat.

Sedangkan untuk tanah garapan Robi hanya menyewakan tanah untuk para pengusaha Lapak, pembangunan rumah yang saat ini berdiri di tanahnya merupakan hasil pembangunan dari pemilik Lapak. Para pemilik Lapak hanya perlu meminta ijin kepada Robi dalam hal pembangunan.

Gambar III.3

Jalan Masuk Tanah Garapan Opik

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015

Berdasarkan gambar III.3 terlihat bahwa tanah garapan Opik memiliki pintu masuk yang besar. Hal tersebut dikarenakan dalam tanah garapan Opik terdapat tanah yang disewakan untuk parkir kendaran. Parkiran tersebut dimanfaatkan oleh para penghuni lapak dan warga yang memiliki kendaraan seperti keluarga Tia yang memiliki angkutan umum. Setiap bulannya warga yang menggunakan fasilitas tanah tersebut dikenakan biaya untuk pemeliharaan.

Gambar III.4

Permukiman di Daerah Pinggir Rawa Yang Sudah Berbentuk Permanen

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016

Selain permukiman semi permanen, DPR saat ini sudah banyak warga yang membuat permukiman permanen. Berdasarkan gambar tersebut terlihat permukiman padat penduduk dengan rumah permanen. kondisi rumah tersebut lebih tertata rapih dikarenakan bentuk bangunannya yang kokoh. Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa warga DPR sebagian memiliki taraf ekonomi yang baik, seperti terdapatnya kendaraan pribadi dan kondisi jalan yang juga sudah berbentuk permanen.

1. Daerah Pinggir Rawa Sebagai Komoditi Ekonomi

Hadirnya DPR tidak terlepas dari motif ekonomi. Untuk Nanang sebagai warga yang pertama kali menggarap di wilayah DPR. Dengan membangun rumah di dataran tersebut Ia dapat menghemat pengeluaran akan tempat tinggal. Lokasi yang strategis yaitu bersebelahan langsung dengan permukiman Perumnas dan Pusat Kota Depok

memungkinkan Ia memperoleh pendapatan yang cukup besar. Perkembangan kota Depok Ia lihat sebagai peluang ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk serta belum banyaknya transportasi yang memadai membuat Ia mengisi kesempatan tersebut dengan menjadi pengusaha becak.

Keuntungan yang menjanjikan dari usaha becak pada saat itu menarik hati salah seorang warga Perumnas. Salah satunya adalah Hari yang berprofesi sebagai hakim. Menurut pengalaman Nanang selama merintis usaha becak, pada saat permintaan akan becak tinggi Hari menginvestasikan uangnya kepada Nanang untuk dikelola dalam usaha becak. Becak milik Nanang yang semula hanya berjumlah 50 buah berkat investasi Hari menjadi 100 buah becak. Dari kasus tersebut tergambarkan bahwa Hari memiliki kekuatan ekonomi yang kuat serta melihat peluang ekonomi yang cukup menjanjikan pada saat tersebut.

Selain sebagai pengusaha becak Nanang juga mempunyai usaha lainnya yaitu dengan membangun rumah kontrak. Akibat dari loyalitas para penyewa becak Nanang dapat menekan angka pengeluaran Sumber Daya Manusia dalam proses pembangunannya. Pegawai Nanang selain ikut membangun mereka juga ikut mencarikan bahan-bahan untuk pemadatan dataran dan pembuatan rumah kontrak. Oleh sebab itu, Nanang dapat membangun rumah kontrak yang juga dihuni oleh pegawai becak sebagai balasannya. Pendapatan selawa tinggal di DPR yang cukup menjanjikan membuat Nanang membawa keluarganya dari kampung halaman ke Kota Depok. Hingga saat ini

semua anak dari keluarga Nanang dapat bersekolah hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Bagan III.3

Penggunaan Lahan berdasarkan Status Sosial

Warga Perumnas	Warga DPR
• Berkebun (Pisang, Singkong, Ubi dll) • Area Pemancingan • Kontrakan • Penjualan Tanah • Penyewaan Tanah Lapak • Penyewaan Tanah Parkiran • Parkiran Pribadi • Pembangunan Mushola • Pembangunan Lapangan	• Kontrakan • Pembuatan Rumah Pribadi • Tempat Usaha Lapak • Tempat Usaha (Warung) • Tempat Berteduh

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2016

Bagi Asmi menetap DPR merupakan tempat dimana Ia mengumpulkan uang. Alasan utamanya pergi dari kampung halaman adalah mencari pekerjaan di Kota Depok. Saat ini Asmi berprofesi sebagai hansip Perumnas sekaligus DPR. selain sebagai hansip Asmi juga memiliki toko kelontong. Hasil dari penjualan toko kelontong saat ini tidak sebanyak ketika Ia pertama kali datang ke DPR yaitu sebelum terjadinya pengerukan. Luasnya lahan DPR sebelum terjadi pengerukan digunakan warga setempat dan sekitar DPR untuk memancing di DPR, banyaknya warga yang datang membuat banyaknya pengunjung yang datang ke toko Asmi. Walaupun pendapatan saat ini tidak sebanyak sebelumnya, pendapatannya hingga saat ini membuat Asmi dapat membuat rumah permanen, menyekolahkan anak hingga membeli kendaraan pribadi seperti mobil di kampung halamannya.

Selain memiliki pekerjaan yang stabil disektor formal para penggarap di RT 06 Perumnas mendapatkan pendapatan lain dari DPR. Para penggarap seperti Amar mempunyai kontrakan semi permanen yang dikenakan tarif seharga Rp.150.000 – Rp 200.000. / rumah. Selain rumah kontrak Amar juga membangun bangunan permanen untuk memarkirkan kendaraan pribadinya di DPR. Kemudian, lahan garapan Opik dikomersialkan dengan menjual beberapa lahan garapan kepada pendatang seperti Tia dan pengusahan lapak. Selain itu, lahan garap Opik digunakan juga sebagai tempat parkir kendaraan roda empat. Untuk warga atau pihak luar yang menaruh kendaraannya di lokasi tersebut akan dikenai iuran untuk perbaikan jalan sebesar 50 ribu per Bulan.

C. Ruang Sebagai Penentu Relasi Dan Tindakan Sosial Perumnas Dengan Komunitas DPR

Peningkatan jumlah rumah dan rumah kontrak membuat jumlah penghuni DPR ikut meningkat. Banyak warga terutama ketika hari raya Idul Fitri membawa saudara dari kampung halamannya ke Kota Depok untuk ikut mencari pekerjaan. Beberapa sanak saudara yang dibawa menempati rumah-rumah yang telah didirikan keluarganya atau menempati rumah kontrak yang telah disediakan oleh penggarap.

Sebagai penghuni di lokasi yang bertsatus ilegal, penduduk tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan tempat tinggal serta tidak memiliki identitas yang resmi. Warga DPR dalam menjalani kehidupan sehari-hari menyadari pentingnya status sebagai warga Kota Depok untuk mengakses fasilitas publik. Warga DPR yang merupakan warga

yang bertempat tinggal di wilayah tidak resmi pun menghadapi hambatan dalam perolehan status.

Bagan III.4

Jenis Status Kependudukan di Daerah Pinggir Rawa

Warga DPR	Warga DPR dan Warga di Kampung Halamannya	Warga RT 06 Perumnas	Tidak Memiliki Status Kependudukan
• Seluruh warga berstatus DPR • Tidak memiliki rumah utama di daerah asalnya	• Warga yang memiliki rumah utama di daerah asalnya • Masih memiliki peran dikedua tempat	• Warga DPR yang memiliki salah satu keluarga yang tinggal di Perumnas	• Warga yang tinggal secara perorangan • Tinggal dalam jangka waktu yang tidak lama • Status Kependudukan masih berstatus daerah asal

Sumber : diolah oleh peneliti,2016

Pada awalnya warga DPR mengajukan permohonan status tempat tinggal untuk dimasukkan kedalam wilayah RT 06 Perumnas. Namun mendapat penolakan dari pemimpin setempat walaupun pemimpin tersebut merupakan salah satu pemilik garapan. Penolakkan ini diberikkan dengan anggapan bahwa warga pendatang tersebut tidak dapat masuk kedalam wilayah Perumnas bedasarkan aturan Perumnas. Akan tetapi untuk warga DPR yang mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu warga Perumnas dapat mengakses status sebagai warga Perumnas walaupun rumah yang sebenarnya ia tempati berlokasi di DPR.

> "Waktu itu lagi mau melahirkan anak disini, nah kan butuh surat tinggal. Teteh minta surat tinggal ke Pak RT Perumnas. Cuma aja ditolak, katanya.. Elu kan orang luar bukan orang sini, rumahnya masuk mana lu. Gitu katanya" [63]

Meskipun hampir semua wilayah DPR digarap oleh warga Perumnas, serta lokasinya lebih dekat dengan wilayah Perumnas dari pada Kampung Lio, warga DPR

[63] Wawancara Tia Oktober 2015.

menyebutkan dirinya sebagai bagian dari DPR, yaitu masuk kedalam Kelurahan Pancoran Mas daripada Kelurahan Depok Jaya. Warga DPR pada awal kehadirannya mendapatkan penolakan dari RT Perumnas Setempat dalam kepengurusan surat pindah.

Beberapa warga DPR yang memiliki status sebagai warga Perumnas adalah Ana. Ana merupakan salah satu penghuni wilayah garapan Opik ia masuk kedalam kartu keluarga Perumnas melalui keluarganya yang tinggal di wilayah Perumnas. Sedangkan bagi warga DPR yang tidak mempunyai relasi memilih masuk kedalam wilayah DPR.

Berubahnya warga DPR menjadi warga DPR atas inisiatif masing-masing individu. Tidak ada penawaran dan pemaksaan dari pihak Kampung Lio setempat untuk masuk kedalam Kampung Lio. Bagi warga yang membutuhkan status kependudukan mereka mengajukan permohonan untuk masuk ke DPR dengan membawa surat pindah. Permintaan akan status warga Kampung Lio disambut dengan baik oleh ketua DPR.

> "Ya surat pindah dari daerah. Ngasih surat pindah. Dulunya ga diakui, sama pemerintah gaboleh bikin KTP dulu. Taun-taun 90 an gaboleh. Jadi nyuri-nyuri lah makanya alamat mereka dewi sartika harusnya sarikaya. Kan jauh baru bisa bikin ktp kan orang perumnas. Kalau kk ktp ada 36 yang punya kk. Kalau pemulung itu ga warga sini kebanyakan. ktpnya masih ktp jawa. Tidak semuanya ga jadi warga sini. kalau ada apa apa minta domisili saya. Ya boleh. Kalau yang tidak resmi banyak sekali ya daripada yang resmi 100 juga ada".[64]

Tidak semua warga DPR terdaftar menjadi warga Kota Depok. Warga DPR menyandang status ganda dalam menjalani kehidupannya. Baik dalam hal status maupun dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Dalam hal status kependudukan banyak yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) di dua tempat. Seperti warga DPR disatu sisi mereka tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak ingin kehilangan status sebagai

[64] Wawancara Masni Maret 2016.

warga asalnya. Dalam menjalani kehidupannya mereka berperan hanya sebagai warga dalam hal status tetapi aplikasinya banyak warga.

> "Ya surat pindah dari daerah. Ngasih surat pindah. Dulunya ga diakui, sama pemerintah gaboleh bikin KTP dulu. Taun-taun 90 an gaboleh. Jadi nyuri-nyuri lah makanya alamat mereka dewi sartika harusnya sarikaya. Kan jauh baru bisa bikin ktp kan orang perumnas. Kalau kk ktp ada 36 yang punya kk. Kalau pemulung itu ga warga sini kebanyakan. ktpnya masih ktp jawa. Tidak semuanya ga jadi warga sini. kalau ada apa apa minta domisili saya. Ya boleh. Kalau yang tidak resmi banyak sekali ya daripada yang resmi 100 juga ada." [65]

Selain yang memiliki KTP sebagai warga DPR beberapa warga tidak memiliki KTP dan beberapa masuk ke RT Perumnas. Untuk warga yang tidak memiliki KTP didasari alasan karena mereka bertempat tinggal dilokasi tersebut hanya sementara. Rumah utama mereka masih di kampung halaman, seperti yang dilakukan oleh Asmi yang membangun rumahnya di kampung halaman walaupun semua keluarganya bertempat tinggal di DPR. Rumah di DPR hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara selama mereka mencari nafkah di lokasi tersebut. Ia memperhitungkan jika rumahnya digusur ia sudah memiliki tempat untuk pulang.

> "Kalau profesi emang beda. Anak mantu ponakan dipasar baru tukang becak. Gemeter saya juga, gemeter kenapa ni. Saya karena kehendak Allah mungkin juga tidak sombong akan menjadi orang yang boleh dikata sukses. Anak saya yang dagang rujak. Di kampung sudah bangun rumah. Nah itu yang saya bina dilingkungan sini supaya kaya saya jangan enak pada ngontrak disini Cuma ga ada hasilnya. Disini tanah siapa, kalau umpama digusur mau kemana dulu. Sayanya waktu dari kampung kesini mau bangun rumah. Ini uang mati 15 rb sepuluh tahun ga pulang saking mau meningkatkan hidup. Satu bulan 450 satu tahun ada berapa. Akhirnya begitu tahun 2008 akhir digusur baru boleh bangun belum dipelur belum diapa. Disini saya dikasih lokasi untuk jualan dua taun orang mancing ratusan dulu disini. Orang dari mana-mana dateng. Ada yang jual indomi ada yang makan ngopi. Sampe saya hitung bungkus kopi bisa seratus". [66]

Lain halnya dengan Tia yang memiliki dua status di kedua tempat:

> "Kalau teteh ada KK kampung.tapi KK disini juga masih ada nama teteh". [67]

---

[65] Wawancara Masni Maret 2016.
[66] Wawancara Asmi April 2016.
[67] Wawancara Tia Oktober 2015.

1. Relasi dan Tindakan Sosial Warga DPR dengan Perumnas

Pada awal kependudukan *DPR* hubungan antara warga Perumnas dengan warga DPR bersifat individu. Penggarap hanya berperan sebagai penyedia tempat tinggal. Untuk keadaan selanjutnya jika tidak terjadi permasalahan yang serius terhadap sarana dan prasarana, pemodal tidak turut ikut campur. Seperti pada saat terjadi bencana banjir warga DPR. Bagi warga yang terkena musibah tersebut harus mencari caranya sendiri agar air tidak masuk ke permukimannya. Beberapa warga ada yang pindah ke tempat kontrak lain yang lebih baik tetapi masih banyak juga yang bertahan di lokasi karena keterbatasan biaya. Untuk menanggulangi datangnya banjir warga DPR meninggikan tempatnya masing-masing. Penyedia tempat hanya memberikan bahan untuk peninggian tempat seperti bahan-bahan puing.

Jika kondisi musibah sudah dalam tingkatan yang diatas ambang kewajaran. Melihat kondisi tersebut jika kondisinya sudah sangat memprihatinkan, penggarap seperti Amar memberikan bantuan yaitu berupa tempat pengungsian. Saat ini pun beberapa warga Perumnas sudah ada yang ikut membaur dengan warga DPR dibandingkan sebelumnya. Walaupun beberapa sudah membaur warga Perumnas masih menjaga ruang pribadinya, yaitu tidak mengijinkan warga DPR keluar masuk daerah tempat tinggalnya sebebas antar warga DPR. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Amar ketika terdapat anak-anak warga DPR yang bermain di lokasi depan rumahnya, Ia dengan sigap mengusir anak-anak tersebut untuk pindah ke lokasi lain.

Gambar III.5

Permukiman Perumnas dan *DPR*

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016

"Pada berisik..... pada seneng main disitu soalnya tempatnya enak...".[68]

Penjaggaan ruang pribadi warga RT 06 Perumnas pun terlihat dari gambar III.5 dimana seluruh rumah warga Perumnas RT 06 memiliki pagar yang sangat tinggi. Lain halnya dengan permukiman Perumnas di lokasi lain yang memiliki kondiri tinggi pagar yang beragam.

Menurut sebagian warga DPR sikap masyarakat Perumnas tergolong tidak peduli terhadap kehadiran mereka.

> "Mereka cuek, kadang kalau ngeliat kita gimanaa gitu... yaa elu elu gua gua. kalau dulu pas maen sama anaknya mah ada omongan-omongan".[69]

Untuk pelaksanaan kegiatan kolektif. Seperti acara perayaan kemerdekaan masyarakat membangun sendiri dengan iuran. Pelaksanaan kegiatan kolektif dilakukan

---

[68] Wawancara Amar Februari 2016.
[69] Wawancara Keluarga Tia Oktober 2015.

dengan berbagai cara yaitu terkadang terkadang terpisah dan terkadang dilakukan bersama dengan warga Perumnas. Namun menurut pengakuan Tia, mereka jika memiliki sumber daya yang cukup lebih memilih menyelenggarakan kegiatan tersebut sendiri dibandingkan bergabung dengan warga RT 06 Perumnas.

2. Relasi Sosial dan Tindakan Sosial Antara Sesama Warga DPR

Hubungan antara warga *DPR* terbagi kedalam dua kelompok yaitu *DPR* bagian barat dan utara. Warga bagian barat yaitu warga yang disebut 'Daerah Pinggir Rawa (*DPR*)' tidak mengenal warga tersebut sedekat daerah *DPR*. Dalam menyelenggarakan seperti kegiatan-kegiatan kolektif kedua warga tersebut terpisah kedalam kelompok barat dan utara. Bahkan warga *DPR* pun tidak begitu mengenal dengan warga bagian barat. Keberadaan ketua RT dalam DPR bagian barat berfungsi hanya sebagai 'penolong' yaitu membantu mereka dalam memperoleh pengakuan berupa status kependudukan serta ketika terjadinya musibah dan konflik antar warga. Mengenai perolehan tanah, rumah pemasangan listrik dan sebagainya ketua DPR tidak tahu menahu hal tersebut.

> "Engga sini-sini aja. Orang rawa ga pernah saya denger 17 an mereka minta. Dulu pernah diadain posyandu tapi ga ada yang aktif masyarakatnya. Sampe dicabut lagi ijinnya. Posyandu ya begitu kalau apa yang gratis-gratis".[70]

Sebagai sesama masyarakat pendatang warga DPR terutama warga DPR yaitu DPR memiliki hubungan yang erat dengan sesama penghuni. Warga tersebut saling membantu dalam hal bertahan hidup. Bantuan tersebut bisa berbentuk informasi, tempat tinggal dan pertolongan pertama ketika terjadi musibah dan sebagainya.

[70] Wawancara Masni Maret 2016.

Seperti yang terjadi dengan Tia, ia memperoleh pekerjaan dari jaringan warga sesama penghuni DPR. Warga saling bertukar informasi mengenai saluran-saluran pekerjaan yang dapat mereka isi. Umumnya pekerjaan yang ditawarkan merupakan pekerjaan pada sektor informal. Tia memperoleh pekerjaannya sebagai pegawai salon dan asisten rumah tangga dari tetangganya yang juga bekerja atau memiliki 'kenalan' ditempat tersebut. Pertukaran informasi tersebut pun Ia lakukan juga jika tetangganya memerlukan informasi mengenai pekerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh Tia:

> "Kalau nyari kerja dari temen. Minta ke tentangga ada kerjaan ga. Kaya kerja ke ibu ides minta ke bu siti. Paling kalau majikan yang dulu aja kadang-kadang suka ngubungin lagi."[71]

Namun hubungan kedekatan tidak meluas ke seluruh DPR seperti yang terjadi di Desa. Beberapa warga yang memiliki latar belakang atau status yang berbeda tidak membaur selekat antara sesama warga DPR yang memiliki kesamaan latar belakang. Seperti yang terjadi dengan Tia dan Nia. Tia yang berstatus sebagai warga Kampung Lio dan Nia yang mengikuti status sebagai warga Perumnas.

> "Ada tukang warung nikah disini, dijalan bikin tendanya. Orang perumnas rame juga. Engga bantu si, paling tetangga situ doang yang bantu".[72]

Untuk permukiman tidak semua warga pendatang yang tinggal di DPR menetap beberapa warga tinggal di lokasi tersebut untuk sementara. Ungkapan 'Sementara' dalam hal ini yaitu warga yang tinggal di DPR hanya untuk mencari nafkah sedangkan keluarganya masih menetap di kampung halaman. Warga antara sesama pendatang 'sementara' tersebut tinggal di kontrakan yang sama, yaitu satu kamar yang bisa berisi

---

[71] Wawancara Tia Oktober 2015.
[72] Wawancara Tia Oktober 2015.

5-10 orang. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pengeluaran dalam hal tempat tinggal ketika mencari nafkah di Kota Depok. Salah satu warga yang tinggal dikontrakan tersebut yaitu Tomi. Ia merupakan penarik becak yang sudah tinggal di tempat tersebut selama beberapa tahun. Becak yang saat ini Ia tarik merupakan hasil membeli dari Nanang, karena Nanang sudah lanjut usia untuk mengawasi becak Ia menjual becak-becaknya salah satunya kepada Tomi. Selain memperoleh pekerjaan Tomi juga memperoleh tempat tinggal yang dalam satu kontrakan Ia tempati dengan penarik becak lainnya.

Dalam hal terjadinya musibah masing-masing warga menangani dan membantu dengan modalnya masing-masing. Ketika terjadi musibah seperti banjir yang sering kali terjadi di DPR tersebut selain menanggulanginya sendiri ketika musibah yang terjadi sudah diambang batas maksimal. Para warga saling membantu seperti keluarga Tia yang dibantu tetangga dekatnya ketika banjir besar melanda. Tetangga yang memiliki mobil *Pick Up* memberikan tumpangan untuk tidur di mobil tersebut. Hal tersebut wajar terjadi diantara sesama tetangga.

> "Banjir sekaki. Dulu aja tidur di mobil bak mang Usep, mobil bak tetangga. Nanti aja ada pembersihan rawa terus jalan pinggirnya mau dikasih konblok. Yang di pinggir rawa banget mah ke urug kotorannya".[73]

Bantuan antara warga DPR sangat lekat. Karena kesamaan latar belakang mereka pun sering kali saling meminjamkan Modal yang mereka miliki. Seperti Tomi yang memiliki sebuah becak akan memberikan becak tersebut kepada salah satu temannya

[73] Wawancara Tia Oktober 2015.

yang membutuhkan becak untuk mengisi waktu luangnya. Dalam hubungan tersebut keduanya saling menguntungkan. Bahkan seringkali Tomi harus menanggung biaya perbaikan becaknya yang rusak ketika dipinjam orang lain tanpa meminta iuran dari orang tersebut. Untuk keluarga Tia yang memiliki kelebihan berupa MCK pribadi, ia dan keluarganya memperbolehkan siapa saja yang mau menggunakan MCK tersebut. Hal tersebut terlihat dari posisi MCK keluarga Tia yang berada di depan rumahnya.

Terlebih kondisi lahan pertanian yang sebagaian warga tidak memiliki tanah sendiri seperti keluarga Tia. Pada tahun mereka datang, Kota Depok sedang dalam masa pembangunan. Kurangnya fasilitas-fasilitas publik dan tenaga kerja menjadi peluang bagi mereka mengisi kekosongan tersebut dengan bekerja disektor informal.

Selain faktor tersebut, hubungan warga pendatang dengan warga yang telah menetap di Kota Depok pun mempengaruhi datangnya warga pendatang. Hal ini penting bagi mereka karena melalui hubungan dengan warga yang sebelumnya telah menetap memberikan informasi bahkan memasukkan mereka ke saluran-saluran pekerjaan. Hal ini seperti yang terjadi dengan Nanang:

> "Diajak teman dekat (teman satu sekolah) buat kerja di Perumnas depok 1 yang sedang dalam masa pembangunan, sebagai buruh 'borongan'. Waktu ikut borongan pembangunan Perumnas bapak bertugas mencatat barang masuk seperti paku, semen, kayu dll. Mandor menyerahkan semuanya pada bapak dan kalau ada yang kerja mau ngambil apa dicatat, bapak dibawahnya mandor lah. Narik becak sampe 4 bulan terus istri jemput kesini ngajakin pulang, kata bapak enggak, bapak udah betah disini. Kalau tinggal disini bisa kejamin daripada di desa, kalau di kampung tiga bulan kelamaan nunggu panen itu juga kalau memang kalau disini kan kalau kita rajin udah pasti ketemu. Jadi istilah kata ngedidik anak lima yang empatnya udah jadi, udah selesai kalau disana ga cukup lahan tanah dua hektar ga cukup buat empat orang dan biaya anak hingga SMA." [74]

[74] Wawancara Nanang Februari 2016.

Pada awal pembangunan dataran di DPR Nanang tidak menemui kesulitan seperti penolakan dari warga sekitar. Hal tersebut dikarenakan pada saat Ia melakukan pembangunan tersebut warga Perumnas seperti yang berada di Jl. Sawo dan Jl. Nangka beberapa sudah memiliki garapan, sehingga hal tersebut bukanlah hal yang asing bagi mereka. Untuk memperoleh lokasi Nanang tidak membeli kepada siapapun karena Ia menggunakan lokasi yang belum digunakan oleh siapapun. Begitu pun dengan pemerintah kota Depok yang pada saat tersebut tidak mengawasi dengan ketat fasilitas publik yang mereka miliki. Sebelum hadirnya permukiman Situ Rawa Besar direncanakan akan dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, hanya saja bantuan tersebut ditolak oleh pemerintah kota Depok.

> "Tapi kan pemerintah juga sempat bikin kurap dipinggiran, itu yang biayain juga jakarta lho. Itulah kan depok jakarta mau biayain mau dirawat ga dikasih sama depok. depok maunya duitnya biar kita yang ngerawat. Ya kan siapa yang mau kan, itu aja ga dirawat. Apalagi duit orang. Itukan buat resapan kalau ga ada itu banjir juga...Disana ada perumahan juga ga dirawat oleh pemda depok akhirnya menyempit. Ga ada kepedulian lingkungan pemda depok.". [75]

Para penggarap tersebut berperan hanya sebagai pemodal. Pemodal dalam hal tersebut yaitu seseorang yang membeli tanah dan memberikan sejumlah uang kepada para buruh sebagai balas jasa pengurugkan dan pembangunan rumah.

D. Dominasi di Dalam Ruang

Terjadinya dominasi dalam ruang oleh seorang dan sekelompok warga di Situ Rawa Besar menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan masyarakat. Bagi masyarakat Perumnas beranggapan bahwa dengan hadirnya DPR membuat mereka aman sekaligus

[75] Wawancara Robi April 2016.

resah. Untuk warga Perumnas yang senang akan hadirnya warga DPR terdiri dari beberapa alasan.

Pertama, warga Perumnas senang karena telah ‘membantu’ masyarakat kalangan menengah kebawah dalam hal penyediaan tempat tinggal yang murah dan strategis. Warga RT 06 Perumnas dalam hal ini membantu bagi masyarakat pendatang yang kesulitan ditengah harga sewa yang melambung di tempat yang strategis seperti kelurahan Depok Jaya. Kedua, dengan hadirnya DPR kondisi Situ Rawa Besar yang tadinya tidak terawat dan berisi ancaman bahaya dari binatang buas sudah hilang karena lokasi tersebut telah diubah menjadi permukiman. Sebelum diperbaiki oleh pemerintah banyak binatang seperti biawak dan ular yang meresahkan warga yang tinggal disekitarnya. Ketiga, dengan adanya warga DPR warga Perumnas dengan mudah mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang murah. Hal tersebut seperti Amar yang mempekerjakan salah satu warga DPR sebagai asisten rumah tangga serta Opik yang mempekerjakan orang tua Tia sebagai pegawai usahanya.

Bagi warga DPR kehadiran mereka di lokasi tersebut dengan status tanah yang ilegal memunculkan rasa senang, gelisah serta segan. Permukiman yang tidak resmi tersebut tidak memiliki standar khusus untuk siapa saja yang mau tinggal di lokasi tersebut. Berbagai permasalahan muncul karena beragamnya warga yang tinggal. Seperti terdapatnya pelanggaran norma-norma agama seperti minum-minuman keras membuat beberapa warga Perumnas bertindak untuk menghilangkan perilaku tersebut.

Namun tidak dapat dipungkiri dengan adanya DPR membuat warga DPR dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Beberapa warga memperoleh pendapatan yang

lebih baik dari kampung halamannya. Selain itu fasilitas publik yang lengkap menunjang kehidupan warga DPR hingga dapat memperoleh pendidikan sampai ke Sekolah Menengah Atas (SMA).

Bagan III.5

Alur Penjagaan Ketertiban *DPR*

Warga RT 06 Perumnas

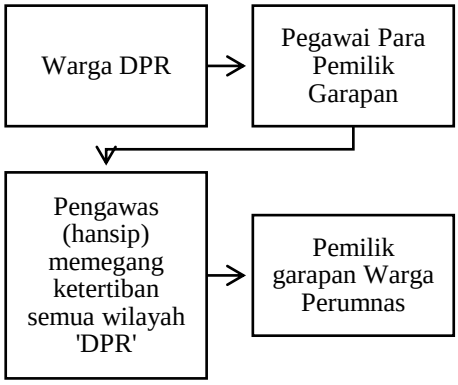

Warga *DPR*

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2016

Setiap pemilik garapan memiliki karakterisitiknya masing-masing baik dari segi modal ekonomi maupun modal simbolik hal tersebut menjadi salah satu faktor dominasi di DPR karena para penggarap memiliki kekuasaan *(Power)*. Modal simbolik yang besar dimiliki ketika semua para penggarap tersebut pernah memimpin di lokasi tersebut. Untuk warga perumnas yang memiliki garapan tersebut, pernah menjadi ketua RT 06

Perumnas seperti Yana, Amar dan sekarang ketua RT dipegang oleh Robi. Sedangkan warga pendatang seperti Nanang pernah memiliki usaha becak terbesar di Kota Depok.

Kelebihan modal tersebut yang membuat warga DPR memandang ‘segan’ dan hormat kepada mereka. Hal tersebut terlihat ketika warga diwawancarai oleh peneliti, setiap warga yang menyebutkan nama pemilik garapan tidak pernah lepas dari gelar pemilik garapan tersebut. Seperti gelar ‘Haji’ yang selalu menyertai nama pemilik garapan. Selain gelar tersebut ungkapan seperti ‘beliau’ pun dipakai sebagai kata ganti pemilik garapan.

Untuk penggarap yang berasal dari Perumnas seperti Amar. Amar sebagai salah satu penggarap tanah Situ Rawa Besar yang menjadi sebuah dataran. Kehadiran Amar selain sebagai pemilik juga berperan sebagai pengawas kontrakan tersebut. Dalam perjalanan kepemilikan kontrakan tersebut, Amar seringkali menghadapi kesulitan dalam menghadapi warga seperti fasilitas yang rusak dan uang bulanan yang menunggak. Hal tersebut Ia atasi dengan cara memberi peringatan terhadap warga yang menurutnya berbuat diluar batas kewajaran. Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi di wilayahnya adalah terdapatnya warga yang membawa minum-minuman keras, tindakan dengan cara mengusir pun ia lakukan. Cara yang Ia pakai dalam ‘menertibkan’ warga adalah dengan peringatan dan pengusiran. Hal tersebut cukup efektif untuk wilayah garapan Amar.

Sebagai penghuni pertama permukiman DPR, Nanang dipandang sebagai orang yang berkuasa di lokasi tersebut. Dengan jumlah pegawai dan relasi yang banyak membuat orang-orang yang tinggal di daerah tersebut ‘segan’ terhadapnya. Menurut

pandangannya peran Ia di lokasi tersebut selain sebagai pengusaha becak Ia merupakan ‘penyelamat’ orang-orang pendatang yang membutuhkan tempat tinggal. Dengan menyediakan tempat tinggal untuk masyarakat pendatang ia telah ikut membantu masyarakat tersebut memperoleh peluang mencari pekerjaan di Kota Depok.

Selain sebagai penyedia tempat untuk masyarakat pendatang, Nanang berperan mengawasi kelancaran kontrakan. Namun peran tersebut ia citrakan sendiri, seperti hal pernyataan Nanang:

> “.....Yang sebelah Opik mau digusur iya kan bapak yang ngawasin, orang itu soalnya gabisa diatur, jadi tuh apa harusnya ini silahkan deh di tempat ini tapi dia gamau. Harusnya kerjasama dengan saya mengenai tempatnya. Sekarang kan dia kelabakan. Karena batasnya. Pak umar juga sama kaya opung tadi orangnya puguh ga karuan. Orang perumnas kan berani karena ada gelarnya, tapi diadu ga mau. Kalau bapak kan eselon. Ga mihak apa-apa”.[76]

Lain halnya dengan apa yang dikatakan Masni :

> “Pak Nanang suka bikin sensasi. Dia juga udah kabur waktu itu. Udah pada diangkut barangnya ke jawa sampe dua truck. Ga ada yang ngelawan pas mau digusur. Ga ada yang berani..... Tinggal waktu itu saya inget warungnya bu darsinah. Pak nanang emang gitu orangnya suka gede ngomongnya. Dia orang PDI itu kampanye PDI. Gagah banget tapi gitu lah kurang pendidikan”.[77]

Berdasarkan hal tersebut terlihat antara warga pendatang dengan Perumnas tidak menjalin kerjasama dalam hal pembangunan. Nanang memperoleh lokasi tersebut dalam keadaan masih berupa rawa yang Ia garap bersama sesama warga DPR. Tetapi untuk warga perumnas, Untuk Kerja sama diantara warga perumnas yang memiliki garapan terlihat ketika warga perumnas bersama-sama membangun fasilitas publik di lahan tersebut dengan cara iuran. Pembangunan DPR dilakukan dalam jangka waktu yang

---

[76] Wawancara Nanang Februari 2016.
[77] Wawancara Masni Maret 2016.

sama. Warga perumnas memiliki tanah garapan yang sebelumnya juga milik warga perumnas sehingga sudah terbentuk ketika berpindah tangan.

Posisi pemilik garapan selain sebagai pemilik juga berperan sebagai ‘RT kedua’ sebutan ini muncul dikarenakan jika terjadi suatu pelanggaran norma, para pemilik garapanlah yang bertanggung jawab. Menurut pengakuan Amar jika terjadi pelanggaran pernah suatu kali polisi datang ke tempatnya. Pihak berwenang seperti polisi pun mempercayakan ketertiban lokasi tersebut kepada pemilik garapan.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari antara orang perumnas dan warga *DPR* tidak banyak membaur. Kondisi rumah antara Perumnas dan RT 03 Kampung Lio berbeda, rumah warga Perumnas yang berdampingan langsung memiliki pagar setinggi orang dewasa sehingga tidak terlihat aktivitas warga yang tinggal di dalam rumah tersebut. Berbeda halnya dengan permukiman *DPR* yang tidak memiliki pagar rumah, bahkan beberapa rumah memiliki ruangan terbuka pada bagian depan rumahnya yang diperuntukkan untuk duduk bersama antar warga *DPR*

E. Penutup

Kepemilikan suatu lahan di tanah ilegal tersebut dilakukan secara terorganisir. Berbagai pihak memperoleh keuntungan dari adanya pemukiman tersebut. Banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya permukiman di lahan tersebut mulai dari kebutuhan akan tempat tinggal dan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Antara penggarap memili karakteristik dan modalnya masing-masing yang menyebabkan seorang atau sekelompok orang bisa menguasai lahan tersebut.

Dalam menjalani kehidupannya warga DPR dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Mulai dari antar sesama warga karena kondisi tempat tinggal yang berdesakan yang memungkinkan munculnya konflik serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Hubungan masyarakat pun ikut berpengaruh, warga DPR memiliki hubungan yang lebih erat bahkan hampir tidak adanya ruang pribadi dalam hal kepemilikan tempat tinggal. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan untuk hidup di wilayah DPR. Berbeda halnya hubungan antara warga RT 06 Perumnas dan warga DPR, walaupun beberapa warga sudah ada yang membaur masyarakat masih menjaga jarak dengan warga Perumnas dimana warga Perumnas merupakan pemilik yang dihormati oleh warga. Selain ‘dihormati’ warga Perumnas juga ditakuti.

Ancaman dari pemerintah terhadap kehadiran permukiman warga DPR pun hadir. Beberapa kali wacana penggusuran timbul di lokasi tersebut yang membuat setiap warga harus siap jika terjadi penggusuran. Seperti beberapa warga yang memang menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat mencari nafkah. Tetapi walaupun isu tersebut pernah terjadi, hal tersebut tidak seluruh warga DPR untuk pindah ke lokasi yang lain. Ketika pemerintah tidak menjaga dengan ketat wilayah tersebut, beberapa warga kembali membangun rumah dan memulai hidup yang baru di lokasi tersebut.

BAB IV

PRAKTIK SOSIO SPASIAL KOMUNITAS DAERAH PINGGIR RAWA (DPR) DI PERUMNAS, DEPOK

A. Pengantar

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa pembangunan permukiman Daerah Pinggir Rawa (DPR) Kampung Lio dilakukan secara terorganisir. Berbagai pihak bekerjasama dalam terbentuknya dataran. DPR sebagai ruang publik yang terlepas dari pengawasan ketat pemerintah membuat warga setempat mengkomersialisasikannya. Komersialisasi ruang publik menjadi ruang privat tersebut sudah terjadi sejak zama Belanda.

Banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pemukiman DPR. Pertama, kebutuhan akan tempat tinggal. Tingginya harga rumah di pusat perkotaan menyebabkan masyarakat pendatang menempati daerah-daerah kumuh liar *(squatter).* Kedua, lemahnya pengawasan pemerintah. Lemahnya pengawasan pemerintah menjadi salah satu pendorong munculnya pemukiman kumuh liar. Meskipun permukiman tersebut pernah terkena gusuran, tidak adanya tindak lanjut dari penggusuran tersebut membuat beberapa warga kembali membangun rumah dan menata kembali kehidupannya di lokasi tersebut.

Dalam menjalani kehidupannya, warga DPR dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Permasalahan yang pertama kondisi tempat tinggal yang berdesakan.

Kepadatan permukiman yang tinggi menyebabkan munculnya sesama warga DPR. Selanjutnya, kondisi lingkungan yang kurang sehat. Lokasi permukiman DPR yang bersebelahan langsung dengan Situ Rawa Besar, menyebabkan terjadinya bencana banjir ketika hujan melanda. Terakhir, ancaman dari pemerintah. Kehadiran pemukiman warga DPR yang ilegal beresiko terkena penggusuran oleh pemerintah setempat. Beberapa kali wacana penggusuran timbul dilokasi tersebut yang membuat setiap warga harus siap jika terjadi penggusuran. Walaupun isu tersebut pernah terlaksana tidak membuat seluruh warga DPR pindah ke lokasi lain.

Bab ini ditulis dengan membagi kedalam tiga subbab. Pertama, beralihfungsinya suatu ruang, subbab ini mendeskripsikan beragam pemanfaatan ruang di Kota Depok serta di DPR. Kedua, alih fungsi ruang dalam praktik spasial. Subbab ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana suatu ruang di DPR diproduksi dan direproduksi. Penguasaan terjadi oleh aktor-aktor dalam hal ini salah satunya yang berperan secara signifikan adalah kelompok strategis lokal. Kelompok tersebut mengubah lahan publik menjadi suatu komoditi yang menjadi nilai ekonomi. Ketiga, alih fungsi ruang dalam representasi ruang. Subbab ini akan menjelaskan bagaimana produksi ruang yang terkandung dalam pola hubungan produksi di DPR. Terakhir, alih fungsi ruang dalam ruang representasional. Dalam hal ini berupa simbol-simbol yang terdapat di DPR.

Pengeksploitasian alam berdampak terhadap berkurangnya luas lahan Situ Rawa Besar yang juga berdampak menurunnya kualitas air bahkan menyebabkan banjir di Kampung Lio. Peningkatan jumlah penduduk yang hadir juga berdampak pada

peningkatan permintaan akan tempat tinggal yang dilihat oleh warga setempat sebagai peluang ekonomi. Daerah sempadan Situ Rawa Besar pun beralih dari sebuah dataran menjadi sebuah perkebunan yang kemudian beralih menjadi pemukiman padat penduduk.

Bagan IV.1

Proses Alih Fungsi Ruang di DPR

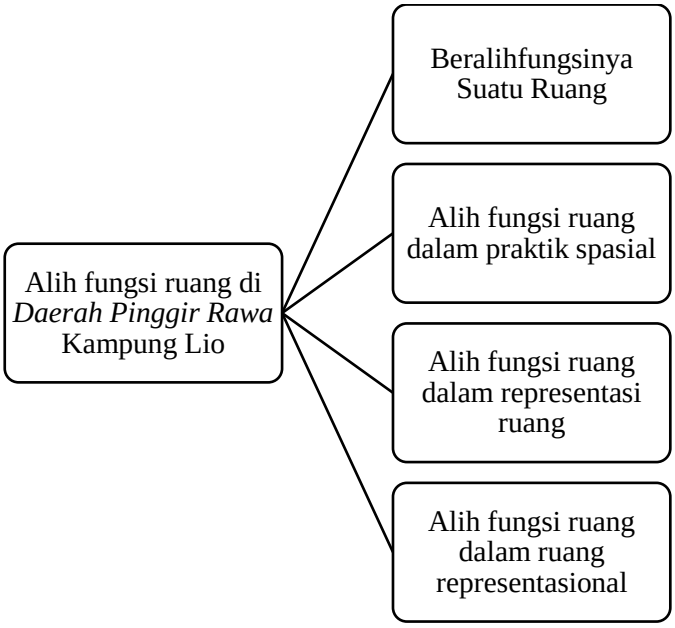

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2017.

B. Beralihfungsinya Suatu Ruang

Perebutan ruang di Kota Depok sudah terjadi sejak zaman belanda yaitu sejak Depok menjadi produsen dari salah satu komoditas *Verenidge Oost Indische Compagne* (VOC) untuk pasar dunia. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan *eigendom*, Cornelis Chastelein petinggi VOC, membeli perkebunan Depok dari Tio Tiong Ko. Belanda yang

pada saat itu tidak lain merupakan bagian utama penggerak roda kapitalisme, yang selanjutnya modal akan mengalir kembali kepada pemilik modal yaitu Belanda.

Kampung Lio dalam masa penguasaan Belanda pun ikut berperan terhadap kelancarannya. Situ Rawa Besar dikomersilkan oleh orang sekitar untuk pembuatan genteng. Orang-orang mengeruk dasar setu dengan cara diambil lempungnya yang kemudian lempung tersebut dibentuk menjadi genteng. Hasil dari penjualan tersebut pun kembali kepada penjual genteng.

Pertumbuhan Kota Depok berkembang ketika terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai. Transportasi umum seperti kereta menunjang masyarakat suburban serta masyarakat dari luar Kota Depok untuk pulang pergi dalam waktu yang relatif singkat. Pertambahan penduduk terjadi secara signifikan ketika hadirnya Perumnas yang menjadi perumahan pertama di Kota Depok serta Universitas Indonesia. Walhasil meningkatlah jumlah penduduk di Kota Depok.

Peningkatan penduduk yang semakin banyak membuat banyaknya permintaan akan rumah tinggal. Pengembang-pengembang perumahan dari perusahaan swasta mulai berdatangan. Kemudian dalam hal permukiman memasuki tahap kapitalisme selanjutnya sepeti yang disampaikan oleh Lefebvre, setelah melewati tahapan memproduksi barang dalam ruang, selanjutnya memperoduksi ruang itu sendiri. Ruang sudah menjadi komoditas. Keberadaannya diproduksi sebagai sebuah ruang abstrak oleh para perencana

ruang sebagai gambaran ideal kawasan perkotaan. Ruang yang hanya ideal pada dataran konsep dan perencanaan dihadapan para desainernya.[78]

Kekuatan modal telah mencengkeram arah perkembangan kota Depok dengan menciptakan ruang-ruang baru yang sarat dengan kepentingan modal. Contohnya munculnya pusat perbelanjaan modern yang tumbuh subur mengelompok di pusat Kota Depok seperti ITC, *Margo City*, Plaza Depok, *Depok Town Square* dan sebagainya. Akan tetapi Levebfre menegaskan bahwa *conceived space* selalu meninggalkan residu suatu permasalahan ketika bersinggungan dengan *lived space.* Banyaknya pusat perbelanjaan dan perkantoran di Kota Depok, di sekitar pusat perbelanjaan tersebut akan muncul kawasan permukiman kumuh dan ilegal serta kawasan usaha skala kecil yang tersebar secara sporadis di lahan-lahan tersisa di sekitar Pusat Kota Depok.

Ruang-ruang abstrak yang tersedia dalam hal ini rumah tinggal hanya ada untuk segmen masyarakat tertentu. Untuk perumahan Perumnas misalnya, walaupun ditujukan untuk masyarakat menengah kebawah kepemilikannya terbatas hanya bisa didapatkan dinikmati warga yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan pengembang Swasta lebih menargetkan keuntungan dari masyarakat menengah dan menengah atas. Melihat terbatasnya ruang untuk masyarakat miskin maka para Penggarap DPR mengambil kesempatan dengan membangun rumah kontrak dengan harga yang murah di lokasi yang strategis.

---

[78] Andi Setiawan, *Produksi Ruang Sosial Sebagai Konsep Pengembangan Ruang Perkotaan* (Kajian Atas Teori Ruang Henry Lefebvre), Universitas Sebelas Maret, hlm. 6.

Modernisasi terpusat di kota, dan dampak negatif bagi individu (berupa alienasi, anomi, kekecewaan, dst) dan kelompok (berupa eksploitasi kelas, wabah, kepadatan berlebih/ledakan penduduk, dll) akibat dari kapitalisme berusaha diperbaiki melalui akses dan penikmatan (*enjoyment*) terhadap alam buatan (*pseudo-nature*). Budaya dan peradaban tumbuh sebagai hasil penguasaan alam, yakni alam yang ditransformasi oleh penerapan sains, teknologi dan kerja manusia, dan pada saat yang sama mengakui kodrat manusia sebagai bagian dari alam, yang tidak mungkin terpisah darinya.[79] Situ Rawa Besar merupakan salah satu ruang dari alam yang diperebutkan aktor baik yang berasal dari Kampung Lio Sendiri maupun warga Perumnas dan warga yang berasal dari luar kota Depok. Seluruh warga yang memanfaatkan Situ Rawa Besar untuk kepentingan pribadi terlebih lagi untuk kepentingan komersil. Dengan pengetahuan mengenai bentuk lokasi tersebut serta kerja sama antara penggarap dengan pekerjanya para pendatang dari warga Perumnas membuat sebuah dataran buatan menjadi ruang dimana orang-orang dapat tinggal dan membangun kehidupan.

Keberadaan rumah kumuh dan ilegal tentu saja merusak rancangan ideal para perancang kota. Namun bagi para penghuni yang bekerja di pusat perbelanjaan atau perkantoran (seperti karyawan toko, satpam, tenaga kebersihan), keberadaan tempat tinggal dan tempat makan tersebut sangat membantu untuk mendapatkan tempat tinggal dan makanan yang murah. Seperti para penarik becak, asisten rumah tangga, supir ojek *Online*, Satpam dan lain sebagainya menghuni di DPR dengan status penguni tetap dan penghuni tidak tetap dengan tujuan yang sama bermigrasi dan tinggal di lokasi tersebut

[79] Andrej Zieleniec, Op.,Cit, hlm. 67

yaitu untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik dengan tetap bertempat tinggal di rumah yang murah. Selain itu warga RT 06 Perumnas pun terbantu dengan menghadirkan DPR. kebutuhan akan pekerja banyak dipenuhi oleh warga DPR.

Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan pemukiman yang cepat dan tidak terkendali di bagian kota. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodasi kepentingannya. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk pemukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan. Rencana tata ruang yang telah dibuat tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di perkotaan sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas.[80] Akibat dari penggunaan ruang di Daerah Pingir Rawa menyebabkan Situ Rawa Besar yang sebelumnya memiliki luas sebesar ± 35 hektar memanjang hingga ke kecamatan Beji menjadi ± 15 hektar.

Situ Rawa Besar yang saat ini mulai berkurang fungsi utamanya menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lokal maupun pemerintah. Lefebvre juga merinci beberapa kontradiksi yang menyertai berkembangnya ruang-ruang abstrak, salah satunya hilangnya ruang bersama yang dikuasai oleh rezim hak milik (*private property).* Akibat penguasaan lahan Situ Rawa Besar yang menjadi DPR lenyaplah ruang komunal Situ Rawa Besar sebagai ruang publik yang juga berfungsi sebagai daerah resapan.

---

[80] Roswidyatmoko Dwihatmojo, *Ruang Terbuka Yang Semakin Terpinggirkan*, (Badan Informasi Geospasial(BIG)) (URL: www.bakosurtanal.go.id), hlm. 1.

> *It is impossible to escape the notion that nature is being murdered by 'anti-nature' – by abstraction, by signs and image, by discourse, as also by labour and its products. Along with God, nature is dying. 'Humanity' is killing both of them – and perhaps committing suicide into the bargain.*[81]

Ruang yang terus diproduksi untuk kepentingan pribadi. Kekuatan modal menentukan rancangan dan peruntukan ruang-ruang baru sesuai kepentingannya. Ruang tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang konkret yang menghadirkan realita aktivitas manusia penghuninya, akan tetapi dilihat sebatas sebagai rancangan atau gagasan ideal dengan membawa kepentingan modal dibelakangnya.

Lefebvre memandang perkembangan kapitalisme sebagai sistem di mana ruang dilihat sebagai sumber daya langka dan diperlakukan seperti komoditas homogen dan kuantitatif (berjumlah, dapat dihitung), dengan nilai tukar untuk diperjualbelikan, selayaknya komoditas lain di pasar.[82] Situ Rawa Besar sebagai "*locus of production"* menjadi ruang komoditas yang akan terus berkembang. Saat ini Situ Rawa Besar saat ini memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat rekreasi, perikanan komersil, transportasi, pembuangan limbah serta pemukiman. Sebagai tempat rekreasi Situ Rawa Besar dimanfaat oleh warga setempat maupun warga dari luar untuk melepaskan penat. Terlihat dari sekeliling Situ Rawa Besar bagian selatan terdapat kursi-kursi permanen buatan pemerintah setempat. Selain itu terdapat juga warung kecil yang cukup ramai berisi para penjual makanan.Perikanan komersil terlihat dari banyaknya *Anco* serta penangkaran ikan air tawar yang dibangun oleh warga setempat. Perolehan ikan bisa menghasilkan berkilo-kilo selain dapat dikonsumsi sendiri juga diperuntukkan untuk dijual kembali.

---

[81] Andrej Zielenic, *Op., Cit.*,hlm. 63.
[82] Andrej Zieleniec, *Op., Cit*, hlm 67

Transportasi disediakan oleh warga setempat yaitu berupa getek sebuah perahu kecil yang dikayuh dengan tenaga manusia. Getek tersebut dimanfaatkan oleh warga setempat yang ingin pergi dari Kampung Lio ke daerah Perumnas begitupun sebaliknya. Pemanfaatan Getek seringkali digunakan oleh siswa sekolah serta masyarakat yang membawa barang belanjaan maupun dagangannya menuju ke daerah Perumnas yang terdapat berbagai fasilitas publik. Untuk setiap penumpang yang menggunakan transportasi tersebut dikenakan biaya RP 1.000,- /orang.

Selain hal-hal tersebut, fungsi Situ Rawa Besar ini digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak resmi oleh warga Kampung Lio. Terlihat dari Situ Rawa Besar bagian selatan terdapat penumpukan sampah rumah tangga, hal ini jugalah yang menjadi salah satu penyebab air Situ Rawa Besar menjadi keruh. Selain sebagai TPA, pembuangan limbah dilakukan untuk memadatkan sisi sempadan Situ Rawa Besar untuk dijadikan dataran dan kemudian mejadi pemukiman.Hal tersebut seperti yang terdapat di Situ Rawa Besar bagian Barat dan Utara.

Setelah digunakan sebagai perkembangbiakan ikan air tawar oleh warga RT 06 Perumnas, beberapa penggarap mengubah lahan tersebut sebagai tempat bercocok tanam. Bercocok tanam yang dilakukan adalah seperti menanam pisang, singkong, ubi, serta sayur mayur yang hasil dari tanaman tersebut dikonsumsi untuk pribadi.

Pada tahun 1987 an saat dilakukannya relokasi Universitas Indonesia salah satu yang menjadi daya tarik warga pendatang untuk mengisi kebutuhan anggota kampus tersebut dalam sektor informal. Pada tahun tersebut jugalah, warga RT 06 Perumnas melihat perkembangan pendatang serta kebutuhan akan tempat tinggal murah yang cukup

tinggi dari pendatang. Warga RT 06 Perumnas kemudian mengubah lahan yang sebelumnya untuk bercocok tanam menjadi lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan pemukiman komersil berupa rumah kontrakan, tempat usaha, tempat parkir dan sebagainya.

Bagan IV.2

Kepemilikan wilayah Situ Rawa Besar di DPR

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2016

Hubungan antara warga RT 06 Perumnas dengan warga DPR sudah terjalin dalam waktu yang cukup lama. Contohnya Opik, ia mengenal lama dengan orang tua Tia yang sudah bertahun-tahun bekerja menjadi pegawainya hasil dari relasi tersebut membuat keluarga Tia mendapatkan ijin untuk mengelola ruang di DPR. Wewenang yang didapat untuk mengelola ruang garapan milik Opik dimiliki dengan cara membayar sejumlah uang. Tidak ada perpindahan kepemilikan tanah seperti pada umumnya yang terjadi dalam hal ini hanyalah pemindahan wewenang pengelolaan ruang. Oleh sebab itu, keluarga Tia tidak memiliki surat-surat resmi seperti sertifikat tanah ataupun membayar pajak bangunan.

Tabel IV.I

Tiga Rangkaian Konseptual Henri Lefebvre di Daerah Pinggir Rawa

	Warga RT 06 Perumnas	**Warga DPR**
Representasi Ruang	• Mengamankan wilayah Perumnas • Menampung warga menengah kebawah • Pembangunan fasilitas publik untuk warga perumnas • Tempat usaha • Bangunan tambahan rumah inti • Pemasukan ekonomi	• Membangun tempat tinggal • Rumah sebagai tempat menetap sekeluarga • Rumah sebagai tempat berteduh sementara selama masa bekerja • Tempat usaha
Praktek Spasial (*Lived Space)*	• Tempat usaha (penyewaan tenda, penyewaan tempat parkir, pembuatan warung kelontong, dll) • Fasilitas publik : PAUD, mushola, masjid, lapangan • Bangunan tambahan rumah inti : parkiran pribadi • Rumah kontrak	• Rumah tinggal • Rumah kontrak • Tempat usaha: warung kelontong • Tempat tinggal • Tempat belajar mengajar (pengajian
Ruang Representasional	• Pengguna Jasa (majikan) • Pemilik garapan • Penjaga Ketertiban	• Pekerja (asisten rumah tangga, karyawan, dll) • Pengguna garapa • Pemelihara fasilitas publik

Sumber : diolah peneliti, 2016

Tingginya permintaan akan rumah tinggal dan rumah kontrak di *DPR* tergambarkan dengan tidak adanya rumah kontrak yang kosong dalam jangka waktu yang lama. Produksi ruang dibarengi dengan kampanye dari warga DPR. Masing-masing warga DPR yang tinggal untuk pertama kali ketika kembali dari ‘pulang kampung’ ketika hari raya tiba diikuti dengan sanak saudaranya yang ikut mencari peruntungan di Kota Depok.

Kampung Lio yang strategis terletak di kecamatan Pancoran Mas, bersebelahan langsung dengan pusat kota menyebabkan pertumbuhan perekonomian yang lebih cepat daripada kecamatan lain. Hal tersebutlah menjadi salah satu faktor yang membuat ruang publik Situ Rawa Besar dimanfaatkan oleh warga setempat untuk kepentingan pribadi melihat besarnya peluang ekonomi di lokasi tersebut. Warga yang memiliki modal berlebih membangun dan mempertahankan hegemoninya di DPR. Para penggarap di DPR didominasi oleh warga Perumnas yang tinggal bersebelahan langsung dengan Situ Rawa Besar. Sedangkan para penggarap yang berasal dari warga pendatang jumlahnya hanya sedikit dan pengaruhnya tidak sebesar warga Perumnas yang dapat membangun fasilitas-fasilitas publik di lokasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut memperlihatkan bahwa ruang tidak akan berhenti berproduksi. Ruang akan terus memproduksi dirinya sendiri. Para pemilik modal yang mengendalikan ruang pada akhirnya harus menyerah dengan *lived space.* Yaitu ruang abstrak yang meninggalkan residu sebagai bahan memproduksi ruang baru yaitu ruang sosial.

C. Alih Fungsi Ruang dalam Praktik Spasial

Ruang sosial diproduksi dan direproduksi berbagai kekuatan. Kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi bukan sekedar kompetisi atau ruang yang hampa dan netral. Kekuatan ini tidak semata-mata saling bertentangan. Melainkan tarik menarik berbagai kepentingan untuk menghuni ruang fisik yang sudah ada. Perbedaan kepemilikan modal menghasilkan pola relasi patron klien antar aktor. Seperti yang terlihat dalam bagan IV.3

Hubungan antara penggarap dan penghuni DPR bersifat hubungan sosial sekunder yaitu bertindak berdasarkan asas manfaat. Asas manfaat dalam hal ini lebih kepada urusan pekerjaan yang berbentuk patron dan klien.

Bagan IV.3

Bentuk Hubungan Antara Warga Perumnas dengan Warga *DPR*

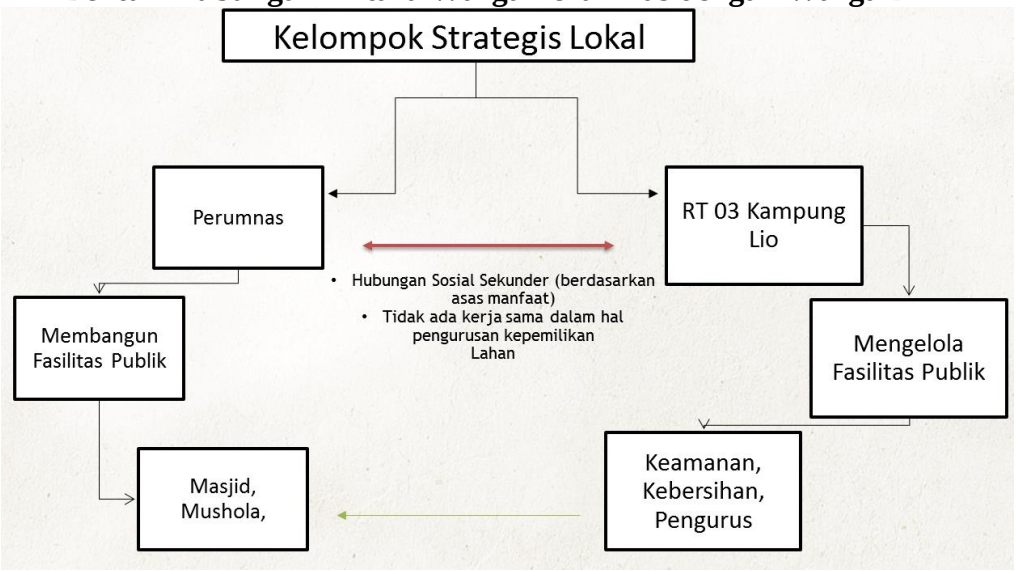

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2016

Pada awal kehadirannya warga DPR dengan warga RT 06 Perumnas terdapat batas pemisah karena perbedaan status sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Tia bahwa mereka lebih memilih untuk melakukan kegiatan kolektif seperti acara kenegaraan (pemilu, perayaan kemerdekaan, dan lain-lain) dilakukan bersama warga DPR tidak bercampur dengan warga Perumnas. Terdapatnya pembicaraan mengenai pandangan negatif warga DPR yang dilakukan oleh warga Perumnas membuat warga DPR menarik diri. Begitupun dengan Nanang yang mengakui bahwa warga Perumnas mempunyai status dan stratifikasi yang lebih tinggi dari segi pendapatan dan pendidikan membuat

Nanang tidak bekerjasama dengan warga Perumnas walaupun statusnya sama dalam hal menggarap tanah di DPR.

Seiring berjalannya waktu, terjadi berbagai interaksi yang membuat kondisi tersebut lebih ‘cair’ saat ini. Keberadaan warga DPR lebih diakui terlihat dari terdapatnya beberapa hubungan pertemanan dengan warga Perumnas. Bantuan seadanya ketika warga DPR tertimpa bencanapun diberikan kepada warga ketika suatu kali menghadapi bencana banjir yang membuat warga tidak bisa tinggal di rumahnya. Namun, tindakan simpatik diberikan kepada warga, beberapa warga tetap menjaga jarak dengan warga Perumnas ketika bencana banjir dan bantuan diberikan warga DPR hanya menempati pekarangan rumah untuk mengungsi walaupun sudah diberikan ijin untuk mengungsi di dalam rumah warga Perumnas.

Dalam hal pengelolaan lahan terlihat bahwa aktor yang memiliki modal yang lebih besar dalam hal ini warga perumnas hanya berperan sebagai pemodal dan pengawas sedangkan untuk memelihara keberlangsungan DPR perannya diberikan kepada warga DPR. Warga Perumnas hanya bertindak ketika terdapat suatu kerusakan yang cukup parah dalam hal sarana dan prasarana serta terdapatnya norma-norma sosial yang dapat mengancam ketertiban di DPR. Keberadaan warga DPR yang seringkali dianggap mengganggu oleh warga Perumnas, namun kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan warga Perumnas. Hubungan Patron Klien terjadi seperti yang dilakukan oleh Amar. Untuk membantu keberlangsungan hidupnya, Amar bergantung oleh kehadiran orang lain yaitu seperti dengan adanya Yati warga DPR yang bekerja

sebagai asisten rumah tangga di rumahnya. Selain sebagai asisten rumah tangga, Yati juga berperan sebagai penagih iuran bulanan kontrakan Amar. Dengan hal tersebut Amar dapat menghemat waktu dan tenaga dalam menjaga keberlangsungan kontrakannya.

Warga DPR berfungsi mengisi kekosongan pekerja disektor informal. Penggarap dari warga DPR seperti Nanang selain menyediakan tempat tinggal untuk warga pendatang ia juga membuka usaha dalam bidang jasa transportasi yaitu becak. Nanang dalam hal ini sebagai penyedia jasa untuk warga Perumnas, banyaknya jumlah rumah di perumnas serta belum terdapatnya kendaraan yang memadai membuat permintaan akan becak tinggi pada awal kehadirannya. Hal ini dibuktikan dengan Nanang menjadi pengusaha becak terbesar di lokasi tersebut menurut penuturannya. Begitupun dengan keluarga Tia, orang tua Tia bekerja sebagai penjaga WC umum kemudian beralih menjadi supir air minum isi ulang, untuk Tia sendiri ia bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pekerjaan tersebut dipilih Tia dan Nanang karena pemasukan pendapatan di Kota Depok perputarannya lebih cepat daripada di kampung halamannya.

1. Peran Pemerintah Lokal

Pada kerangka pemikiran Lefebvre, pemerintah sebagai regulator tidak dapat mengabaikan nilai guna atas suatu ruang. Artinya, pemerintah secara ideal harus menjadi fasilitator dan regulator dalam menjembatani kepentingan masyarakat kapitalis. Pemerintah tidak bisa bersikap netral terhadap kepentingan masyarakat dan berpihak kepada kepentingan kapitalis. Pertama kali pemerintah menaruh perhatian terhadap Situ Rawa Besar datang dari kepemerintahan yang datang dari luar yaitu DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta berniat untuk merenovasi daerah Situ Rawa Besar yang

kemudian hal tersebut ditolak oleh pemerintah lokal Kota Depok. Perhatian pemerintah selanjutnya datang dari pemerintah pusat Republik Indonesia pada masa kepemerintahan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai presiden Republik Indonesia kehadirannya pada saat tersebut dalam rangka meresmikan Perumnas. Presiden Soeharto berencana untuk mengubah lokasi tersebut menjadi sebuah Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman. Namun rencana tersebut tidak dilaksanakan seiring mundurnya Presiden dari jabatan.

Pada tahun 2009 pemerintah Kota Depok memberikan perhatian dengan bentuk perapihan pinggir Situ Rawa Besar. Pembangunan batas permanen antara Situ Rawa Besar dengan dataran DPR. Pemerintah lokal dalam hal ini hanya menaruh perhatian terhadap kerapihan Situ Rawa Besar dengan pembangunan batas permanen yang batas tersebut dapat dilihat hingga saat ini. Mengenai terbentuknya dataran ilegal di daerah Situ Rawa Besar pemerintah tidak menaruh perhatian. Hal tersebut terlihat tidak terdapatnya perluasan kembali secara berarti yang dilakukan oleh pemerintah terhadap berkurangnya luas Situ Rawa Besar. Luas Situ Rawa Besar sedikit bertambah akibat pembangunan tanggul tersebut, akibat dari tindakan tersebut area pemancingan liar yang sebelumnya hadir cukup ramai kini sudah menghilang.

Pembangunan pembatas berupa tanggul cukup berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah warga yang tinggal di DPR pada saat tersebut. Beberapa rumah warga hancur untuk dijadikan tempat penumpukan limbah pengerukan Situ Rawa Besar. Selang beberapa waktu dari pembangunan tersebut warga DPR kembali membangun pemukiman. Hingga saat ini wacana pembongkaran pemukiman ilegal oleh pemerintah muncul terus kepermukaan.

Untuk pemerintah lokal pada ranah kelurahan pernah mencanangkan akan memberdayakan wilayah tersebut mengembalikan fungsinya sebagai ruang publik. Namun rencana tersebut belum adanya pergerakan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Madi seorang ketua RT Perumnas untuk wilayah Jalan Nanas Perumnas. Madi yang aktif dengan pemimpin RT dan RW lainnya mengungkapkan bahwa ia pernah mengikuti rapat antar pemimpin setempat, namun tindakan dan kabar selanjutnya setelah rapat tersebut tidak ada.

> "dulu pernah ikut rapat, katanya mau diberdayain itu rawa,.. tapi engga tau deh sampe saat ini belum ada kelanjutannya dari panitia lain"

Selain itu sistem pemerintahan lokal pemerintah Kota Depok terdapat juga ketua RT 06 Perumnas yang bersebelahan langsung dengan pemukiman DPR dan DPR yang berperan terhadap keberlangsungan DPR. Pemerintahan dari RT 06 Perumnas bersifat permisif terhadap keberadaan DPR. Hal ini dikarenakan mayoritas aktor yang membangun pemukiman DPR merupakan warga Perumnas yang pernah menjabat sebagai ketua RT 06 Perumnas. Perolehan kekuasaan *(power)* sebagai pemilik kekuasaan di daerah perumnas tersebut memudahkan warga dalam hal penguasaan ruang dalam hal perizinan. Ketua RT 06 Perumnas yang seharusnya berperan menjaga wilayahnya dari pihak luar justru yang membangun serta menampung warga pendatang dari luar Kota Depok.

Beberapa pendatang yang menetap di DPR saat ini sudah ada yang membangun rumah dipemukiman tersebut secara permanen. Melihat hal tersebut pemimpin setempat seperti ketua DPR maupun ketua RT 06 Perumnas, tidak mengambil tindakan hanya berupa pembiaran. Hubungan antara pemilik garapan yang satu dengan yang lain tidak

saling ikut campur dalam artian selama tidak berhubungan dengan garapannya dan tidak melanggar norma-norma sosial yang berlaku di tempat tersebut, para pemilik garapan sekaligus pemimpin setempat memberikan kebebasan pembangunan.

Tidak hanya pembiaran yang diberikan, seperti yang dilakukan oleh Ketua DPR ikut terlibat terhadap pembangunan sebuah bangunan yayasan yang berdiri secara permanen di lokasi tersebut. Penggarap yang lain seperti Robi maupun Amar tidak tahu menahu proses berdirinya bangunan yayasan.

Dengan kata lain, politik (perampasan) ruang tersebut menunjukkan tidak adanya *political will* dari pemerintah untuk mengembangkan ekonomi subsisten berbasis komunal, akibat pengaruh sebuah ideologi besar untuk kepentingan akumulasi modal. Kepentingan melipatgandakan surplus ini harus didukung dengan praktek awal akumulasi atau dikenal dengan akumulasi primitif. Sebuah praktek mentransfer penguasaan tanah skala besar dengan berbagai cara kepada korporasi untuk kepentingan investasi dan mencari keuntungan, dan tentu saja dengan mengabaikan hak-hak warga setempat dalam menguasai dan/atau menggunakan tanah untuk keberlanjutan hidupnya, untuk memelihara keberlanjutan budayanya, maupun untuk turut serta dalam memlihara lingkungan.[83]

Beberapa warga RT 06 Perumnas yang pernah dan sedang menjabat sebagai ketua RT 06 Perumnas sekaligus pemilik garapan yaitu Yana, Amar, dan Robi. Sehingga dalam hal pembangunan garapan di wilayah tersebut bukanlah sesuatu yang ‘aneh’. Warga

[83] Dedi Gustiawan, dkk, *Politik Ruang dan Perlawanan:* Kisah konflik Atas Ruang Ditingka Lokal (Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), 2014) hlm. 24.

Perumnas yang memiliki garapanpun berperan sebagai ‘RT kedua’ untuk DPR dalam hal ini berfungsi sebagai pengawas keberlangsungan kehidupan DPR. Dalam hal keamanan ‘RT kedua’ menjadi penanggung jawab jika terjadi penyimpangan sosial.

Pemerintah lokal lain yang ikut terlibat terhadap keberlangsungan DPR yaitu ketua DPR. Seperti halnya RT 06 Perumnas, ketua DPR pun bersikap permisif terhadap keberadaan DPR bagian barat. Dalam hal ini ketua DPR berperan sebatas memberikan wadah terhadap warga DPR terutama dalam hal status kependudukan. Lokasi DPR bagian barat atau yang disebut sebagai Daerah Pinggir Rawa (DPR) tidak memiliki keberadaan lokasi yang jelas. Pihak Perumnas terutama ketua RT 06 berlepas diri terhadap status kependudukan warga DPR. Wilayah dataran DPR yang tidak termasuk kedalam wilayah Perumnas walaupun secara lokasi lebih dekat ke Perumnas daripada Kampung Lio membuat warga DPR mencari cara sendiri agar mendapatkan pengakuan dari penduduk setempat.

Selain status kependudukan DPR bertindak sebagai ‘wasit’ dalam hal ini jika terjadi konflik antar warga serta membantu jika terdapat warganya yang tertimpa musibah. Mengenai terdapatnya warga tidak resmi yang tidak memiliki status kependudukan tidak terlalu diperhatikan oleh ketua DPR. Perhatian dalam hal hubungan sosial oleh ketua DPR dilakukan karena selain menjadi ketua RT 03 Kampung Lio Ia berperan sebagai guru dan pekerja sosial. Profesi sebagai guru tersebutlah yang membuat ketua DPR mengayomi warga sekitarnya serta memberikan contoh kepada warga setempat. Perhatian yang kurang terlalu mendalam seperti ketua RT pada umumnya dikarenakan Ia mengakui bahwa DPR merupakan pemukiman ilegal terlebih jika dilihat

dari peta wilayah DPR lebih masuk ke wilayah Perumnas daripada ke wilayah Kampung Lio.

D. Alih Fungsi Ruang dalam Representasi Ruang

Representasi ruang dalam produksi ruang tergantung pada pola hubungan produksi dan tatanan yang bertujuan memaksakan suatu pola hubungan tertentu atas "pemakaian" suatu ruang. Maka, representasi ruang berkenaan dengan pengetahuan, tanda-tanda, atau kode-kode, bahkan sikap atau suatu hubungan yang bersifat representasi-representasi yang dihasilkan oleh suatu ruang oleh karena itu menjadi "beragam".[84] Pada konteks inilah ruang merupakan suatu produksi merupakan merupakan suatu prodeuksi yang muncul dari konsepsi orang atau beberapa orang pada umumnya, "ruang" yang dikonsepsikan (*conceived space).*

Bagi warga yang berkunjung maupun pemerintah pusat, pemikiran ruang mereka dan keadaan yang mereka rasakan dalam Situ Rawa Besar mungkin dapat berhubungan. Yaitu Situ Rawa Besar sebagai tempat rekreasi dan daerah resapan. Untuk pada penggarap dan penghuni garapan mereka akan merasakan Situ Rawa Besar di DPR, mereka merasakan *conceived space dan perceived space* mereka dikarenakan sudah mengenali ruang tersebut terlebih dahulu dan mengamati secara dekat pemahaman mereka akan bertolak belakang dengan masyarakat dan pemerintah. Bagi penggarap Situ Rawa Besar ini merupakan lokasi untuk menambah penghasilan dan bagi penghuni garapan wilayah ini merupakan lokasi strategis dan biaya sewa rumahnya yang murah

[84] Andriej Zieleniec, *Op., Cit.,* hlm .69.

maka mereka dapat menjadikan tempat ini sebagai tempat istirahat dan mencari mata pencaharian.

Ruang represantasional (*Representational Space)* mengacu pada ruang yang secara nyata "hidup" (*lived space)* dan berkaitan secara langsung dengan berbagai bentuk pencitraan serta simbol yang terkait dengannya. Hal ini termasuk bagaimana para penghuni atau orang-orang yang menggunakannya saling berinteraksi melalui praktik dan bentuk visualisasi di dalam suatu ruang. Konsepsi atas ruang pun muncul berdasarkan berbagai pengalaman nyata yang dialami oleh seiap orang sebagai sebab-akibat dari suatu hubungan yang bersifat dialektis antara praktik spasial dan representasi ruang. Ruang menjadi sesuatu yang secara khusus dipersepsikan oleh individu, kelompok, atau suatu masyarakat; ruang yang dipersepsikan (*preceived space).*[85]

Kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk memengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.[86] Dalam penelitian ini seorang atau sekelompok orang yaitu warga DPR dan warga RT 06 Perumnas yang mengambil lahan publik Situ Rawa Besar untuk dijadikan sebuah dataran yang kemudian menjadi bangunan untuk berbagai kepentingan.

Menurut KBBI penguasaan merupakan (1) proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasakan: atas tanah perkebunan itu tidak sah; (2) pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan (pengetahuan, kepandaian, dsb): bahasa anak didik perlu

---

[85] Andriej Zieleniec, *Op., Cit.,* hlm. 72.

[86] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 60.

ditingkatkan.[87] Penguasaan dalam hal ini yaitu bagaimana aktor yaitu warga RT 06 Perumnas dan warga *DPR* proses terbentuknya lahan ilegal yang dikomersialkan untuk kepentingan pribadi serta cara yang dilakukan dalam menguasai lahan pemerintah.

Penguasaan merupakan (1) pemilikan; (2) aneksasi, pencaplokan, pendudukan, penyerobotan, perebutan; penaklukan, penundukan; (3) kebiasaan, kecakapan, kemahiran, kemampuan, keterampilan, kompetensi.[88] Berdasarkan hal tersebut penguasaan *DPR* merupakan pengambilalih lahan publik menjadi lahan pribadi oleh warga setempat.

Warga pendatang sebagai warga yang pertama kali datang kewilayah tersebut, merasa bahwa ruang tersebut dapat digunakan secara gratis. seperti yang dilakukan oleh Nanang pada awal kedatangannya, sebagai buruh yang bekerja dalam pembangunan Perumnas yang artinya ia merupakan warga yang hadir lebih awal sebelum datangnya warga Perumnas sesungguhnya dapat memperoleh lahan di Situ Rawa Besar yang bersebelahan langsung dengan Perumnas. Karena hal tersebutlah Nanang menjadi warga pendatang yang pertama kali menguasai lahan di lokasi tersebut.

Lain halnya dengan warga Perumnas yang kemudian hadir berdampingan langsung dengan Situ Rawa Besar. Hadirnya warga Perumnas di lokasi tersebut terjadi ketika pembangunan Perumnas Depok Jaya sudah mencapai tahap terakhir dengan selesainya pembangunan rumah di Jl. Sarikaya. Warga di Jl. Sarikaya yang tergabung kedalam RT 06 Perumnas harus mengeluarkan sejumlah uang kepada warga Perumnas di JL. Nangka dan Jl. Sawo untuk pemindahan kekuasaan lahan publik Situ Rawa Besar

---

[87]Kamus Bahasa Indonesia,(Url: http://kamusbahasaindonesia.org/penguasaan), diakses pada 20 Oktober 2015, pukul 13:24 WIB.

[88] *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 264.

yang sebelumnya telah digarap oleh warga tersebut. Pembayaran tersebut dilakukan sebagai kompensasi dari hilangnya lahan garapan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh warga Jl.Nangka dan Jl. Sawo berupa empang-empang air tawar.

Menurut Dahrendorf, kekuasaan adalah kemampuan potensial dari seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi yang lainnya didalam sistem yang ada. Perbedaan yang penting antara kekuasaan dengan otoritas terletak pada kenyataan bahwa kalau kekuasaan pada hakikatnya dilekatkan pada kepribadian individu, maka otoritas selalu dikaitkan dengan posisi atau peranan sosial – kekuasaan, melulu merupakan suatu hubungan yang faktual, sedangkan otoritas merupakan suatu hubungan yang logis.[89] Aktor dalam hal ini bisa berupa seorang, sekelompok orang, atau kolektivitas. kekuasaan yaitu ketua RT 06 Perumnas yang berperan sebagai aktor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi yang lainnya yaitu warga Perumnas dan warga pendatang kedalam sistem yang ada berupa kepemilikan lahan. Otoritas ketua RT 06 terletak dari kepribadian dimana peran dan posisinya yang strategis kebagai pemegang kekuasaan secara resmi di wilayah tersebut.

> *Space is nothing but the inscription of time in the world; spaces are the relisations, inscriptions in the simultaneity of the external world of a series of times, the rhythms of the city, the rhythms of the urban population.*[90]

Berdasarkan hal tersebut Ruang tak lain hanya persembahan waktu dalam dunia; ruang adalah realisasi, persembahan yang terjadi dalam waktu bersamaan terhadap dunia luar sebagai tahapan dari zaman, irama kota, irama populasi penduduk kota. Teori ini

---

[89] Andrej Zielenic, *Op*., *Cit* hlm.71.
[90] Andrej Zielenic, *Op., Cit* .hlm.60.

menekankan ruang sebagai penekanan untuk mempertimbangkan ruang sebagai produk dan faktor penentu (proses) dari hubungan sosial dan tindakan.

Konsep Lefebvre mengenai ruang, dimana di dalamnya terdapat satu dinamika yang mengiringi penggunaan sebuah ruang dan diasumsikan bahwa *space is political*. Ruang juga merupakan produk dari ideologi, ekonomi dan kekuatan politik (daerah dari kekuasaan) yang mencoba membatasi, aturan dan mengontrol tindakan yang terjadi dalam dan melalui hal tersebut. Aktor yang berperan dalam penguasaan DPR ini menggunakan siasat dengan memanfaatkan semua modal yang mereka miliki dalam mempertahankan dominasi serta keberadaan wilayah DPR. Jadi ruang disini sebagai penekanan kebutuhan untuk mempertimbangkan ruang, baik sebagai produk (sesuatu) dan penentu (proses) dari sebuah hubungan sosial dan tindakan.[91]

> *...is not a thing among other things, nor a product among other products: rather, it subsumes things produced, and encompasses their interrelationships in their coexistence and simultaneity – their (relative) order and /or (relative) disorder. It is the outcome of a sequence and set of operations, and thus cannot be reduced to the rank of a simple object . . . Itself the outcome of past actions, social space is what permits fresh actions to occur, whilst suggesting others and prohibiting yet others. Among these actions, some serve production, others consumption.*[92]

Ruang merupakan suatu proses yang diproduksi secara terus menerus. Ruang sosial bukanlah suatu hal atau suatu hal atau objek yang secara khusus menjadi sesuatu yang khusus dibandingkan objek atau beberapa hal pokok lainnya. Bukan juga produk yang bisa diproduksi dengan yang lainnya melainkan sesuatu yang diprouksi yang dikaitkan berbagai hal tersebut dari berbagai hubungan koeksistensi secara simultan. Melainkan sesuatu yang berisi berbagai produk yang diproduksi melalui hubungan yang dihasilkan secara simultan.

---

[91]Andi Setiawan, *Op., Cit.* hlm. 46.
[92] Andrej Zielenic., *Op, Cit.*, hlm. 69.

E. Alih Fungsi Ruang dalam Ruang Representasional

Dimensi ketiga dari produksi ruang merupakan kebalikan dari "representasi ruang". Ruang representasi menyangkut dimensi simbolik ruang. Ruang representasi tidak mengacu pada ruang itu sendiri tetapi pada sesuatu lain: kekuatan adi kodrati, pikiran, negara, prinsip maskulin atau feminin, dan sebagainya.[93]

Ruang representasional mengacu pada ruang yang secara nyata "hidup" *(Lived Space)* dan berkaitan secara langsung dengan berbagai bentuk pencitraan serta simbol yang terkait dengannya. Hal ini termasuk bagaimana para penghuni ruang atau orang-orang yang menggunakannya saling berinteraksi melalui praktik dan bentuk visualisasi didalam suatu ruang. Konsepsi atas ruang pun muncul berdasarkan praktik spasial dan representasi ruang. Ruang menjadi sesuatu yang secara khusus dipersepsikan oleh individu, kelompok, atau masyarakat; ruang yang dipersepsikan *(perceived space).*

Selain para penggarap yang berasal dari RT 06 Perumnas warga yang berperan sebagai penggarap di DPR juga terdapat Nanang yang sudah hadir sejak pembangunan Perumnas. Statusnya yang juga sebagai 'orang lama' membuat Nanang tidak ragu-ragu membuat dataran di DPR. Dominasi yang cukup kuat juga dimiliki oleh Nanang. Ia menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang ahli bela diri, memiliki koneksi dengan 'orang-orang penting' serta mampu membuat pemerintah lokal patuh terhadapnya.

Kemampuan dapat membuat pemerintah lokal patuh ia gambarkan ketika akan terjadi penggusuran di lokasi yang ia miliki. Pada saat itu nanang mampu membuat

---

[93] Andi Setiawan, *Op, Cit.,* hlm. 4.

pemerintah membatalkan niatnya untuk menggusur rumah yang saat ini ia tempati. Namun citra sebagai orang yang ahli bela diri dan berani membuat pemerintah patuh hanyalah sesuatu yang ia citrakan untuk melindungi dirinya.

Dalam hal keamanan para penggarap tidak melakukannya seorang diri. Penggarap warga Perumnas dalam hal tersebut dibantu oleh petugas keamanan. Hal ini dilakukan dalam hal mengehemat waktu dan tenaga untuk mengawasi seluruh DPR terutama Daerah Pinggir Rawa (DPR). Petugas keamanan tersebut merupakan petugas keamanan yang bertugas mengawasi daerah Perumnas di RT 06. Atas permintaan penggarap petugas tersebut yang biasa disebut sebagai ‘pak guru’ ikut juga mengawasi DPR. Perolehan sebutan ‘pak guru’ oleh warga setempat karena selain sebagai petugas kemanan, Asmi juga mengajarkan pengajian ilmu agama kepada anak-anak yang tinggal di DPR. Kegiatan pengajian tersebut selain mengorganisir anak-anak DPR untuk mengkaji ilmu agama, Asmi juga mengorganisir jika terdapat kegiatan di luar pengajian untuk pendatang yang akan memberikan bantuan kepada anak-anak tersebut.

Pengawasan DPR dilakukan Asmi secara rutin. Warga Perumnas DPR tidak dipungut bayaran atas jasanya. Sebagai gantinya ‘pak guru’ memperoleh penghasilan dari warga Perumnas. Atas loyalitas yang telah dilakukan secara bertahun-tahun ‘pak guru’ memperoleh bantuan berupa domisili dan fasilitas tempat tinggal. Tempat tinggal diberikan oleh penggarap Yana berupa tanah garapan miliknya yang boleh digunakan secara gratis. Walaupun tinggal di DPR ‘pak guru’ memperoleh domisili sebagai warga Perumnas. Bahkan oleh penggarap diajukan menjadi warga Perumnas secara resmi.

Petugas keamanan yang dikenal sebagai ‘pak guru’ dipilih oleh warga perumnas atas berbagai pertimbangan. Dominasi dimiliki cukup kuat menjadi salah satu faktor. Sebutan panggilan berupa ‘pak guru’ diperolehnya karena selain berprofesi sebagai petugas keamanan ‘pak guru’ juga berprofesi sebagai guru ngaji menjadi modal simbolik petugas tersebut. Sebuah ruangan terbuka yang ia bangun sendiri disamping rumahnya ia gunakan sebagai mushola yang semua muridnya berasal dari warga *DPR*. ‘Pak guru’ juga seringkali diberikan tugas sebagai penceramah dan pengganti imam masjid di salah satu masjid Kampung Lio.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Peningkatan suatu kota bagi masyarakat pendatang yang membutuhkan tempat tinggal mencari cara untuk mempertahankan kehidupannya. Melihat potensi tersebut warga yang memiliki kapital yang berlebih membuat suatu pemukiman murah dilokasi strategis. Salah satu pembangunan permukiman tersebut merupakan pembangunan DPR. Warga pendatang yang membutuhkan tempat tinggal dengan cepat mengisi lahan yang merupakan ruang negara tersebut. Kepemilikan suatu lahan di ruang ilegal tersebut dilakukan secara terorganisir. Berbagai pihak memperoleh keuntungan dari adanya pemukiman tersebut. Banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya permukiman dilahan tersebut mulai dari kebutuhan akan tempat tinggal dan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Antara penggarap memili karakteristik dan kapitalnya masing-masing yang menyebabkan seorang atau sekelompok orang bisa menguasai lahan tersebut.

Peningkatan penduduk yang semakin banyak membuat banyaknya permintaan akan rumah tinggal. Pengembang-pengembang perumahan dari perusahaan swasta mulai berdatangan. Kemudian dalam hal permukiman memasuki tahap kapitalisme selanjutnya sepeti yang disampaikan oleh Lefebvre, setelah melewati tahapan memproduksi barang dalam ruang, selanjutnya memperoduksi ruang itu sendiri. Ruang sudah menjadi komoditas. Situ Rawa Besar sebagai "*locus of production"* menjadi ruang komoditas

yang akan terus berkembang. Saat ini Situ Rawa Besar saat ini memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat rekreasi, perikanan komersil, transportasi, pembuangan limbah serta pemukiman.

Situ Rawa Besar merupakan sebuah arena yang diperebutkan aktor baik yang berasal dari Kampung Lio Sendiri maupun warga Perumnas dan warga yang berasal dari luar kota Depok. Seluruh warga yang memanfaatkan Situ Rawa Besar untuk kepentingan pribadi terlebih lagi untuk kepentingan komersil. Penggarap dari warga Perumnas membangun beberapa fasilitas publik, meskipun fasilitas tersebut dapat diakses oleh siapapun namun pada awal pembangunan dan penggunaannya ditujukan untuk kepentingan warga Perumnas.

Bagi warga yang berkunjung maupun pemerintah pusat, pemikiran ruang mereka dan keadaan yang mereka rasakan dalam Situ Rawa Besar mungkin dapat berhubungan. Yaitu Situ Rawa Besar sebagai tempat rekreasi dan daerah resapan. Untuk pada penggarap dan penghuni garapan mereka akan merasakan Situ Rawa Besar di DPR, mereka merasakan *conceived space dan perceived space* mereka dikarenakan sudah mengenali ruang tersebut terlebih dahulu dan mengamati secara dekat pemahaman mereka akan bertolak belakang dengan masyarakat dan pemerintah. Bagi penggarap Situ Rawa Besar ini merupakan lokasi untuk menambah penghasilan dan bagi penghuni garapan wilayah ini merupakan lokasi strategis dan biaya sewa rumahnya yang murah maka mereka dapat menjadikan tempat ini sebagai tempat istirahat dan mencari mata pencaharian.

B. Rekomendasi

Berdasarkan peneletian ini, adapun rekomendasi yang dapat diberikan salah satunya adalah pembangunan perkotaan yang menjadikan berbagai kalangan sebagai objek pembangunan terutama kalangan menengah kebawah. Pembangunan yang hanya berpusat pada satu bagian menyebabkan warga yang tinggal di daerah lain melakukan migrasi dikota-kota dengan tingkat pembangunan yang tinggi. Pembangunan yang cepat memberikan peluang warga menengah kebawah untuk memperoleh pekerjaan. Masyarakat menengah kebawah yang memiliki kapital ekonomi dan simbolik yang lemah bergantung dengan pembangunan tersebut yaitu mengisi pekerjaan dalam sektor informal. Jarak antara rumah dan tempat pekerjaan juga berpengaruh besar terhadap lokasi tempat tinggal mereka, semakin dekat rumah dengan tempat pekerjaan memungkinkan masyarakat menengah kebawah menghemat pengeluaran dan waktu menuju ketempatk kerja dan fasilitas publik lainnya.

Permukiman milik masyarakat permukiman *squatter* DPR yang berada dekat dengan pusat perkotaan. Berdasarkan penelitian mendeskripsikan bahwa para penghuni DPR mayoritas merupakan warga yang berimigrasi dari kota lain untuk mencoba peruntungannya di Kota Depok. Kondisi perekonomian yang tidak menentu didaerah asalnya menjadi salah satu alasan masyarakat imigran atau yang disebut masyarakat pendatang pergi ke Kota Depok bahkan menetap di Kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Budiarjo, Miriam (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Creswell, John W (2010), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Depok Dalam Angka (2012).

Evers, Hans Dieter (1985) *Sosiologi Perkotaan Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: LP3ES

Gustiawan, Dedi dkk (2014), *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah konflik atas ruang ditingkat Lokal*, Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)

Martin, Roderick (1993), *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Jellinek, Lea (1994), *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*, Jakarta:LP3ES.

Suryana, Asep (2004), *Growing Metropolitan Suburbia A Comparative Sociological Study on Tokyo and Jakarta*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kumorotomo, Wahyudi, Darwin, Muhadjir, dkk (1995),*The Implementation of slum and squatter improvement programs in the river basins of yogyakarta.*

Lefebvre, Henri (1991) *The production of Space*, English translation first published, Massachusetts: Basil Blackwell.

Menno, S, Alwi, Mustamin (1992), *Antropologi Perkotaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Merrifield, Andy (2006) *Henri Lefebvre a critical introduction*, Great Britain: Routledge.

Mitlin, Diana, Satterthwaite,David (2004), *Empowering Squatter Citizen : Local Government, Civil Society and Urban Poverty Reduction*, United Kingdom: Earthscan.

Suyanto, Sutinah (2007) *Metode Penulisan Sosial Bebagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana

Sztompka, Piotr (2010), *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada.

Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional.

Zielenic, Andrej (2007), *Space and Social Theory,*London: Sage Publications.

Majalah :

H.Harun Nurochadi, Tiga Dasawarsa Perumnas Depok 1, Gemari Edisi 69/Tahun VII/Oktober 2006, hlm. 45.

Karya Ilmiah :

Aminah, Siti (2015) *konflik dan kontestasi penataan ruang kota surabaya* ,Masyarakat : Jurnal Sosiologi.

Dwihatmojo, Roswidyatmoko, *Ruang Terbuka Yang Semakin Terpinggirkan. http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/artikel/BIGRuangTerbukaHijauyangSemakinTerpinggirkan.pdf*

Freek Colombijn, Johni A. Khusyairi, dkk, *Kampung Perkotaan Indonesia: Kajian Historis-Antropologis terhadap Kesenjangan Sosial dan Ruang Kota.* Sumber: http://www.academia.edu/11474439/Kampung_Perkotaan_Indonesia

Nuraeni, Reni Siti (2005), *Pola Persebaran Permukiman Squatter*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Geografi, Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, Depok.

Roswidyatmoko Dwihatmojo, *Ruang Terbuka Yang Semakin Terpinggirkan*,(Badan Informasi Geospasial(BIG)), www.bakosurtanal.go.id)

Setiawan, Andi, *Produksi Ruang Sosial Sebagai Konsep Pengembangan Ruang Perkotaan*, Universitas Sebelas Maret. file:///C:/Users/User/Downloads/77-182-1-PB%20(2).pdf

Suryana, Asep (2005), *Suburbanisasi dan Kontestasi Ruang Sosial di Citayam: Depok*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Sosiologi, Universitas Indonesia, Depok.

Surono, Agus (2013) *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)*, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia. http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/990/1/Buku%20P4T_OK%20FINAL.pdf

Susilowati, Hanif (2009), *Perubahan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tanjung Priok*, Universitas Indonesia, Depok. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20181713-025-09-Perubahan%20permukiman.pdf

Heryati, *Kampung Kota Sebagai Bagian dari Permukiman Kota Studi Kasus: Tipologi Permukiman RW 01 RT 02 Kelurahan Limba B dan RW 04 RT 04 Kel.Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/728*

Wendt, Susanne (1997) *Slum and Squatter Settlements in Dhaka: A Study of Consolidation Processes in Dhaka's Low Income Settlement areas*, Disertasi,Inggris. dspace.ruc.dk:8080/bitstream/1800/536/1/Slum_and_Squatter.pdf

Internet :

Depok.go.id, www.depok.go.id/profil-kota/demografi, diakses pada 17 Desember 2016.

Kualitas Air Situ Rawa Besar di atas Ambang Baku Mutu, Digilib-ampl.net/detail/detail.php?row=3&tp=kliping&ktg=drainase&kode=451

http://perumnas.co.id/sejarah-perumnas/

Pramono, http://depoknews.id/situ-lio-depok-riwayatmu-dulu/, 6 September 2013.

Situ Rawa Besar Depok tak Terurus, M.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/01/10/nhy8zx-situ-rawa-besar-di-depok-tak-terurus, diakses pada 09 Oktober 2015

Statistik Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2000, 2010-2014, (URL: http://bappedajakarta.go.id/?page_id=1131).

Kamus Bahasa Indonesia, http://kamusbahasaindonesia.org/penguasaan, diakses pada 20 Oktober 2015

Marieska, Harya Virdhani, 17 Februari 2015, Warga Desak Situ Rawa Besar Depok Dinormalisasi,metro.sindonews.com/read/965562/31/warga-desak-situ-rawa-besar-depok-dinormalisasi-1424162060

https://www.google.co.id/maps/place/Situ+Rw.+Besar,+Pancoran+MAS,+Kota+Depok/@-6.3944151,106.8122125,16z/data=!4m2!3m1!1s0x2e69e958f536c897:0x44b49fddf3eadf74, diakses pada 3 Februari 2016, Pukul 12:58.

RIWAYAT PENELITI

ASTARAH FATHU JANNAH, lahir di Bogor, 09 Juni 1993. Anak kedua dari dua bersaudara. Jenjang pendidikan yang ditempuh, antara lain di MI Nurul Iman Bogor (1999-2005), SMP Islam Al-Muhajirin Depok (2005-2008), dan SMA Sejahtera 1 (2008-2011). Pendidikan tinggi ditempuh di Universitas Negeri Jakarta, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial melalui seleksi SNMPTN (2011-2016).

Penelitian yang pernah dilakukan, antara lain "Peran Pendidikan dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga" di Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian lain, mencakup "Evaluasi Program Pembangunan Depok Kota Hijau (Studi Kasus Pembangunan dan Pengelolaan Lembah Gurame) di Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Penelitian lainnya, "Proses Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)" di Desa Ciasmara, Bogor, Jawa Barat. Selain penelitian tertulis, penelitian lain yang pernah dilakukan adalah video dokumentasi berjudul "Kata Mereka... #UdahGusurinAja" di Depok, Jawa Barat.

Pengalaman kerja di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan (2014). Posisi yang ditempati saat itu sebagai mahasiswa PKL di Hubungan Masyarakat. Informasi kontak yang dapat dihubungi, email: astarahfj@gmail.com.